



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

## DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

### TAHUN 2021

---

## KATA PENGANTAR

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan serta program-program pemerintah diantaranya di Bidang Perekonomian. Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit kerja Eselon I pada Sekretariat Kabinet terus berupaya meningkatkan peran dalam memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang berkualitas kepada Presiden di bidang perekonomian, Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2021 yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024, Deputy Bidang Perekonomian, telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian, dituangkan dalam bentuk Laporan kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang didalamnya menjabarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut serta realisasi anggaran serta menguraikan keberhasilan maupun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Dalam rangka penyempurnaan/peningkatan kinerja, Deputy Bidang Perekonomian berharap saran dan masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Deputy Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.



Jakarta, Januari 2022

Deputy Bidang Perekonomian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Satya Bhakti Parikesit'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'S'.

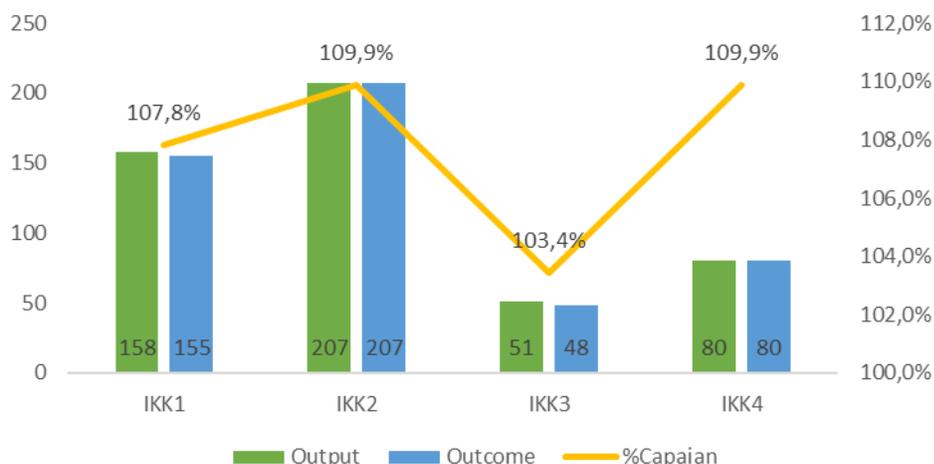
Satya Bhakti Parikesit

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2021 disusun dalam rangka evaluasi dan pelaporan atas realisasi dan capaian kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian.

Dalam rangka memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian, pada tahun 2021 **Deputy Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan menghasilkan 496 rekomendasi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 dengan target 91 % adalah 108.6%.**

Realisasi tersebut didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 2.651.569.000,-** dengan capaian anggaran sebesar **Rp. 2.641.509.204,-** atau sebesar **99,62%.**



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian per IKK Deputy Bidang Perekonomian lebih dari target 91% sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet, dan rekomendasi tersebut juga telah dimanfaatkan oleh *Stakeholders* Sekretariat Kabinet.

Laporan **evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kedeputan Bidang Perekonomian** yang dikeluarkan oleh inspektorat Sekretariat Kabinet memperoleh nilai sebesar **80,47** dengan katagori **A (memuaskan).**

Dalam pelaksanaannya, pencapaian *outcome* Deputy Bidang Perekonomian menghadapi beberapa kendala yaitu

1. terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat pandemi COVID-19;

2. terbatasnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
3. belum terpenuhinya sarana dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan kapasitas pegawai sehingga tidak terlaksana secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
4. koordinasi dengan stakeholders terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja yang masih perlu untuk ditingkatkan;
5. sistem informasi yang belum optimal,

namun demikian Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* dan meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan melalui pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan, melakukan rapat internal bagi seluruh pejabat/pegawai Kedeputian Bidang Perekonomian secara rutin setiap bulan, serta pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA) yang telah dikembangkan secara internal sejak akhir tahun 2019 dan telah diimplementasikan sejak tahun 2020.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Perekonomian.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis .....	8
D. Tantangan dan Peluang.....	9
E. <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja pada SIKT.....	11
<b>Bab II Perencanaan Kinerja.....</b>	<b>13</b>
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2021 .....	13
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	14
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama.....	21
D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	22
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	26
C. Gambaran Kegiatan .....	27
D. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	115
E. Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA).....	118
F. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 .....	119
G. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 .....	135
<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>137</b>
A. Dinamika Capaian Kinerja.....	138
B. Langkah-langkah Strategis.....	138
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Capaian Kinerja.....	12
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.2 Rincian Anggaran Berdasarkan Pagu Alokasi Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 .....	17
Tabel 2.3 Data <i>Refocussing</i> Anggaran dan Optimalisasi Anggaran Tahun 2021 .....	18
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021.....	21
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	115
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2016-2021 .....	116
Tabel 3.4 Pelaksanaan Anggaran dan Ketercapaian Output & Outcome .....	116
Tabel 3.5 Capaian Outcome Program Tahun 2021 .....	117
Tabel 3.6 Rincian Penilaian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 .....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambaran Sasaran Strategis dan Tugas Deputi Bidang Perekonomian.....	2
Gambar 1.2 Gambaran Fungsi Deputi Bidang Perekonomian.....	3
Gambar 1.3 Gambaran Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian.....	3
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian.....	6
Gambar 1.5 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 1.6 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	7
Gambar 1.7 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 1.8 Analisis SWOT Deputi Bidang Perekonomian.....	9
Gambar 1.9 <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021.....	12
Gambar 2.1 Gambaran Sasaran Strategis Deputi Bidang Perekonomian.....	13
Gambar 2.2 Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Perekonomian.....	14
Gambar 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021.....	19
Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021.....	25
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	26
Gambar 3.3 Tindak Lanjut SISUKA per Asdep Tahun 2021.....	118
Gambar 3.4 Perbandingan Kementerian/Lembaga yang mengisi Kuesioner.....	119
Gambar 3.5 Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir.....	120
Gambar 3.6 Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.....	120
Gambar 3.7 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.....	121

Gambar 3.8 Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian .....	122
Gambar 3.9 Tingkat Kepuasan terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.....	122
Gambar 3.10 Tingkat Kepuasan terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian.....	123
Gambar 3.11 Kementerian/Lembaga pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir.....	124
Gambar 3.12 Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden .....	124
Gambar 3.13 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden .....	125
Gambar 3.14 Tingkat Kepuasan kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga .....	126
Gambar 3.15 Tingkat Kepuasan terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.....	127
Gambar 3.16 Tingkat Kepuasan terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet.....	127
Gambar 3.17 Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian .....	128

Gambar 3.18 Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.....	129
Gambar 3.19 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.....	129
Gambar 3.20 Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian .....	130
Gambar 3.21 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian....	131
Gambar 3.22 Tingkat Kepuasan terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.....	131
Gambar 3.23 Kementerian/Lembaga yang pernah pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian .....	132
Gambar 3.24 Tingkat Kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian .....	133
Gambar 3.25 Tingkat Kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.....	133
Gambar 3.26 Tingkat Kepuasan terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian .....	134
Gambar 3.27 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian .....	135

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga.

Selanjutnya Pasal 18 mengamanatkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden dimaksud dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Sekretariat Kabinet diatur juga melalui Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet

Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputi Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja ini juga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang berkelanjutan.

## B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Perekonomian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, serta Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Adapun gambaran sasaran strategis, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Deputy Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Gambaran Sasaran Strategis dan Tugas  
Deputy Bidang Perekonomian



### Gambar 1.2 Gambaran Fungsi Deputi Bidang Perekonomian

- 1 Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- 2 Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
- 3 Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- 4 Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5 Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
- 6 Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian;
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

### Gambar 1.3 Gambaran Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Perekonomian didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu :

- 1 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha;
- 2 Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- 3 Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
- 4 Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi.

Gambaran umum nomenklatur dan tugas 4 (empat) Asisten Deputi pada Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

2. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

### 3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

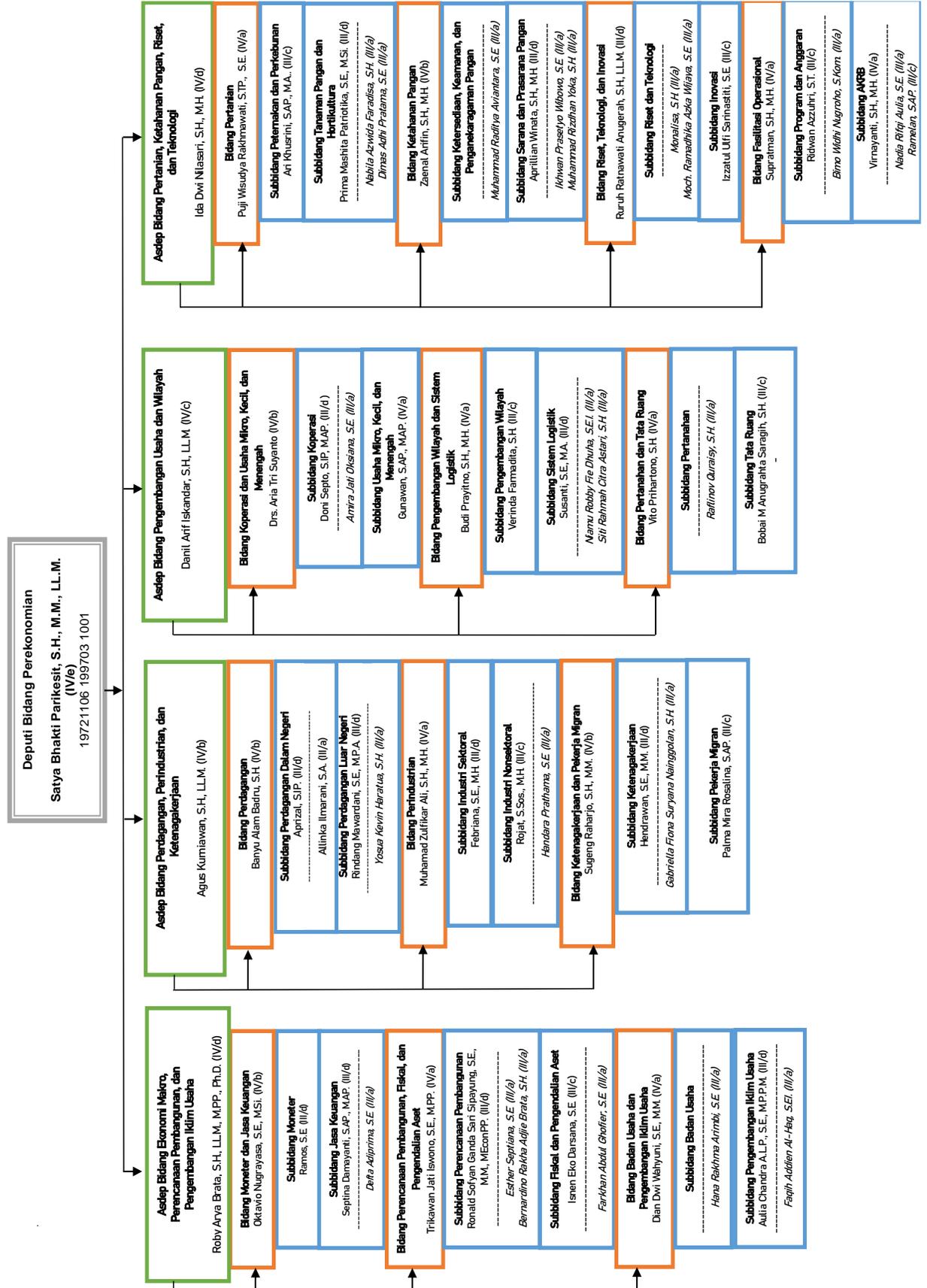
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

### 4. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi.

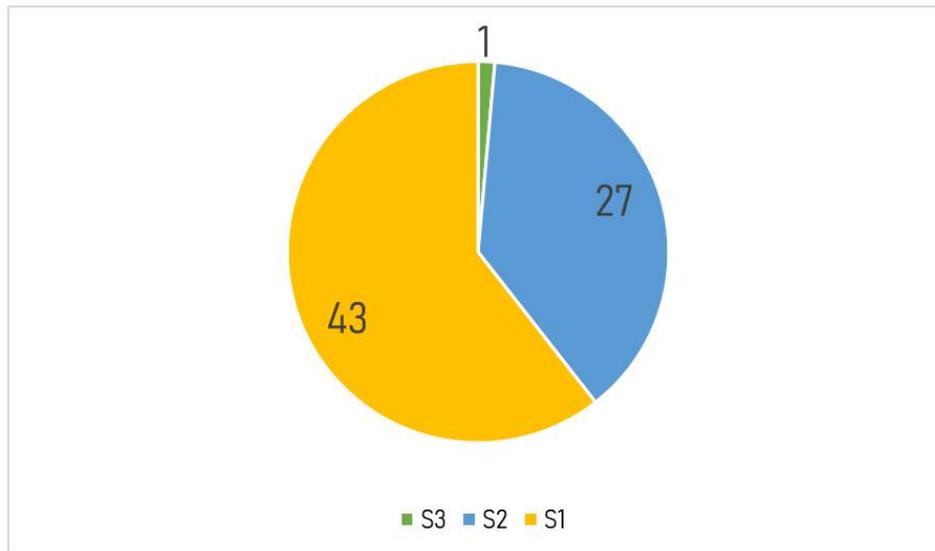
Gambaran struktur organisasi Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

**Gambar 1.4**  
**Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian**

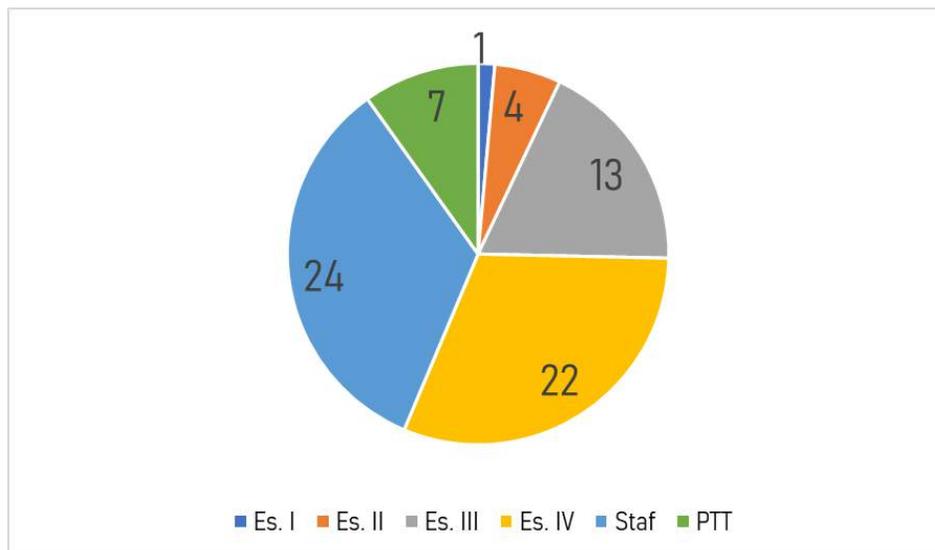


Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian yaitu 71 (tujuh puluh satu) orang terdiri dari 64 (enam puluh empat) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil dan 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun formasi pejabat/pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut yaitu:

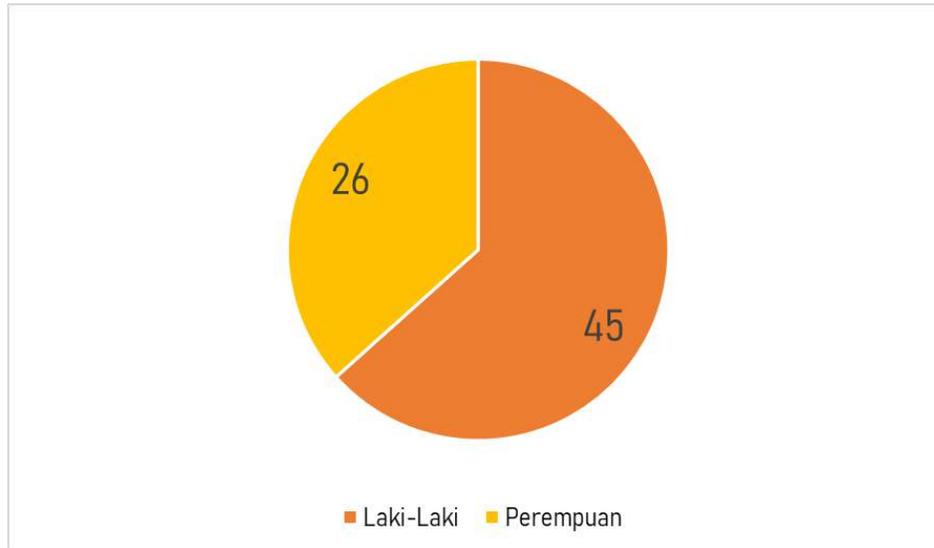
Gambar 1.5  
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.6  
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.7  
Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



### C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja (nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian, penyampaian rekomendasi atas rencana

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Perekonomian, penyampaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian serta penyampaian rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian.

#### D. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya menghadapi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputi Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.8  
Analisis SWOT Deputi Bidang Perekonomian



Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang

sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait izin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya *debotlenecking* dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi (dan *Road Map*) Sektor, antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.
3. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan/atau lintas sektoral wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui Sekretariat Kabinet. Hal ini semakin memperkuat peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam rangka membantu Presiden dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.
4. Membangun *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop*/ *Focus Group Discussion* (FGD) dan

rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.

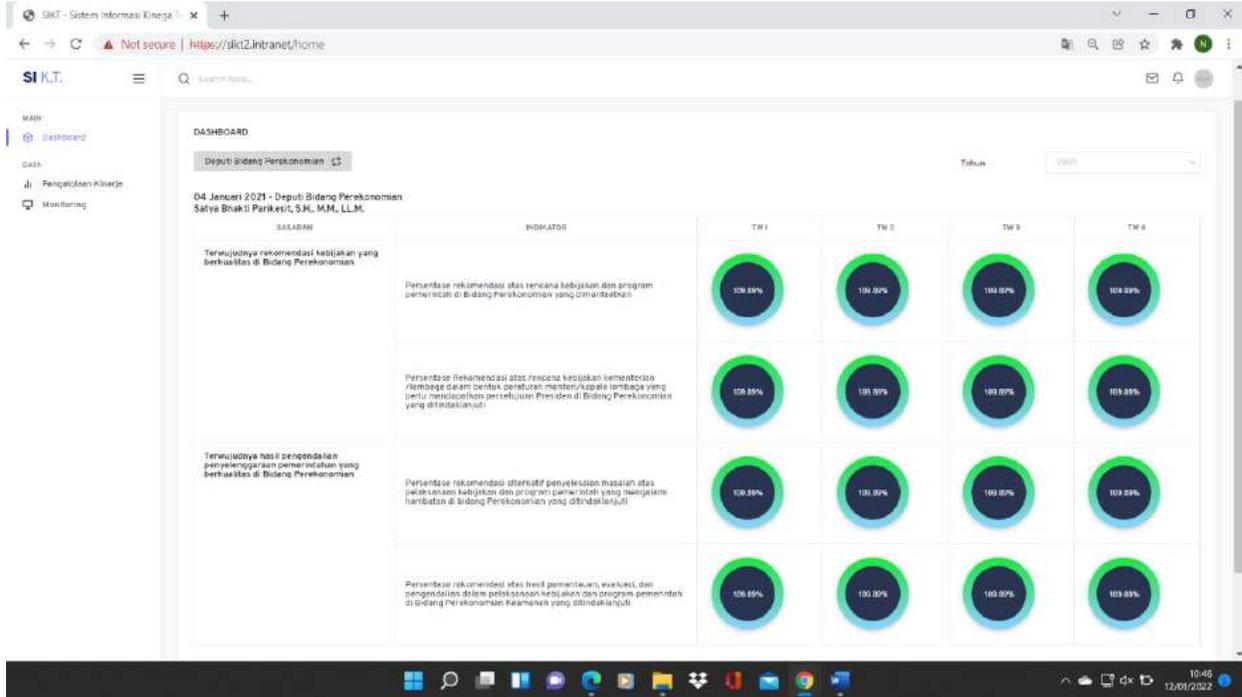
6. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dengan membangun pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas baik substansi maupun administrasi; dan sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan SOP).
7. Pelaksanaan Working from Home (WFH) guna membatasi mobilitas dan mengurangi kapasitas orang yang bekerja di kantor. Pengaturan jadwal dan perubahan posisi (layout) tempat duduk bertujuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yaitu menjaga jarak di kantor. Pelaksanaan WFH dimungkinkan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)

## E. Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT

Sekretariat Kabinet memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang dapat diakses oleh seluruh pejabat/pegawai guna dilakukan penginputan realisasi kinerja beserta data dukung setiap triwulan. SIKT juga dimanfaatkan sebagai *tools* dalam pengendalian dan evaluasi realisasi kinerja oleh pimpinan.

Tampilan *dashboard* SIKT Deputy Bidang Perekonomian tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.9**  
**Dashboard Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2021**



Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian guna mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

No	Interval	Interpretasi
1	≥100%	Memuaskan
2	85%–<100%	Sangat baik
3	70%–<85%	Baik
4	55%–<70%	Cukup
5	≤55%	Kurang

Informasi pada gambar 1.9 menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian mendapat hasil memuaskan pada seluruh IKK

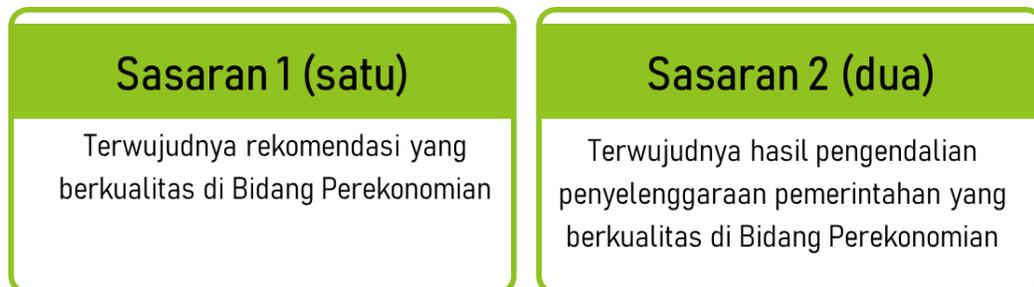
## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun perencanaan mengacu pada tugas dan fungsi berdasar amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

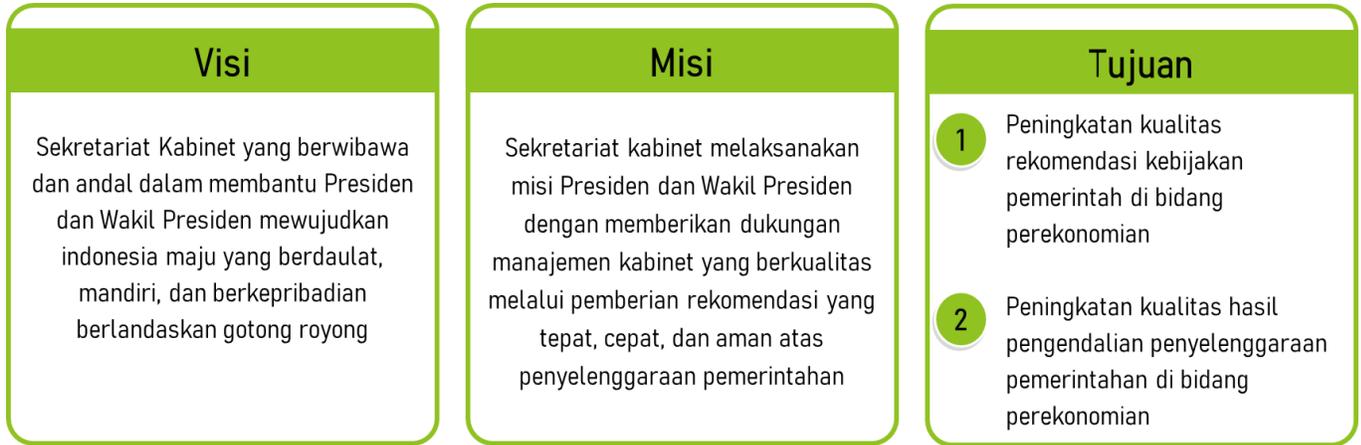
Dalam rangka memberikan gambaran lebih jelas tentang kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021, berikut penjelasan mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. Pada tahun 2021, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis guna mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Gambaran Sasaran Strategis  
Deputi Bidang Perekonomian



Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Perekonomian mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Visi, Misi dan Tujuan**  
**Deputi Bidang Perekonomian**



## B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, penyusunan perjanjian kinerja di Sekretariat Kabinet memanfaatkan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu). Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 memiliki 2 (dua) sasaran program/kegiatan pada Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Strategis tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan 4 (empat) kategori rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian;
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian;
3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian;
4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian, dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang existing/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas.

Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (debottlenecking). Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum.

Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai hasil analisis berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan 4 (empat) rekomendasi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang telah diubah dan disesuaikan, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian  
Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91 Persen
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen

Sedangkan pada Tahun 2021 Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.100.000.000 (empat miliar seratus juta rupiah). Pagu tersebut digunakan untuk menjalankan Tugas Fungsi Deputi Bidang Perekonomian yang terbagi menjadi 2 (dua) Program yaitu:

- **Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden** (Rp. 3.600.000.000,-), yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
  1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perekonomian; dan
  2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian.
 Dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon II yang berada lingkungan Deputi Bidang Perekonomian
- **Program Dukungan Manajemen** (Rp. 500.000.000,-), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu “Penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah”, yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Asdep yang membawahi Bidang Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian).

Adapun detail rincian anggaran berdasarkan Pagu Alokasi Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rincian Anggaran Berdasarkan Pagu Alokasi  
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021

No	Unit Kerja	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
<b>KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN</b>			<b>4.100.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha</b>		<b>900.000.000</b>
		<b>Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>900.000.000</b>
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
		2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
<b>2</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan</b>		<b>900.000.000</b>
		<b>Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>900.000.000</b>
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
		2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
<b>3</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah</b>		<b>900.000.000</b>
		<b>Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>900.000.000</b>
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
		2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
<b>4</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi</b>		<b>1.400.000.000</b>
		<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>500.000.000</b>
		Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	500.000.000
		<b>Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>900.000.000</b>
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
		2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	

## Refocussing dan Realokasi Anggaran

Dalam tahun berjalan, terjadi perubahan dinamika kebijakan pemerintahan maupun kebijakan internal, salah satunya karena dampak pandemi COVID-19, sehingga semua Kementerian/Lembaga diharuskan melakukan *refocussing* anggaran (pemotongan anggaran) untuk dialihkan ke dalam penanganan dampak COVID-19. Selama kurun waktu Tahun 2021, Kedeputan Bidang Perekonomian melakukan *refocussing* anggaran sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan . Disamping itu mengacu kebijakan internal dalam rangka pemenuhan kebutuhan gaji pegawai, Kedeputan Bidang Perekonomian juga melakukan optimalisasi/realokasi anggaran guna pemenuhan kebutuhan dimaksud. Adapun data *refocussing* anggaran dan optimalisasi anggaran pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Data *refocussing* Anggaran dan Optimalisasi Anggaran  
Tahun 2021

Keterangan	Pagu Sebelum	Refocussing/Optimalisasi	Pagu Akhir
Refocussing I	Rp. 4.100.000.000,-	Rp. 410.000.000,-	Rp. 3.690.000.000,-
Refocussing II	Rp. 3.690.000.000	Rp. 367.146.000,-	Rp. 3.322.854.000,-
Refocussing III	Rp. 3.322.854.000,-	Rp. 589.985.000,-	Rp. 2.732.869.000,-
Optimalisasi Pemenuhan Gaji Pegawai Catatan: Hanya dilakukan pada Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 2.732.869.000,-	Rp. 81.300.000,-	Rp. 2.651.569.000,-

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan 4 (empat) kategori rekomendasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2021**

Kategori Rekomendasi	Indikator Kinerja Sasaran
<b>01</b>	<b>01</b>
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian 	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan 
<b>02</b>	<b>02</b>
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian 	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti 
<b>03</b>	<b>03</b>
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian 	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti 
<b>04</b>	<b>04</b>
Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian 	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti 

Adapun pengertian yang “dimanfaatkan” dan “ditindaklanjuti” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori dimanfaatkan, apabila:
  - a) Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet.
  - b) Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
  - c) Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan

kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.

- d) Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti, mencakup hal:
    - a) Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.
    - b) Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.
  3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
  4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti apabila rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

### C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. IKU Deputy Bidang Perekonomian tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian  
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan
	b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Perekonomian	c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti
	d. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

#### D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur persentase pencapaian target tahun 2021 sesuai Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet digunakan rumus sebagai berikut:

##### 1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

- a. IKU1 : Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

- b. IKU2 : Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## 2. Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di Bidang Perekonomian

- a. IKU1 : Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

- b. IKU2 : Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Deputy Bidang Perekonomian secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Deputy Bidang Perekonomian dalam memberikan gambaran pertanggungjawaban berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terkait dengan capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2021 dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan analisis menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Kategori Capaian Kinerja

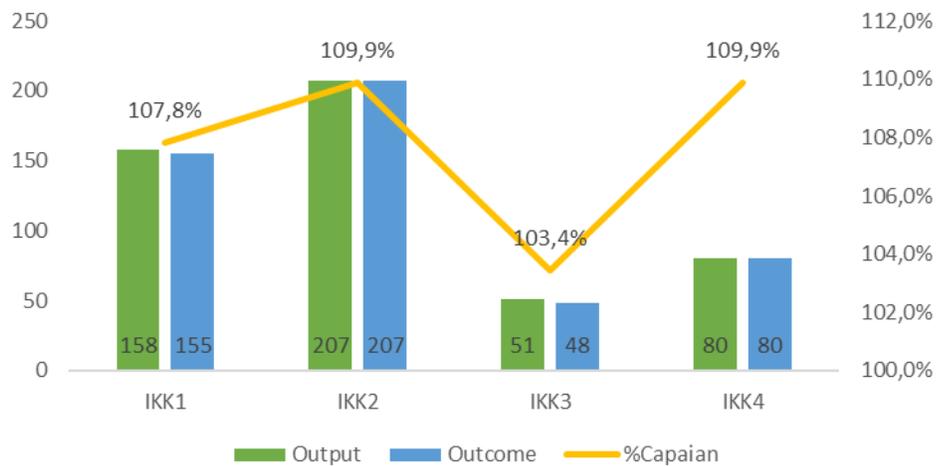
No	Interval	Interpretasi
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	85% - <100%	Sangat baik
3	70% - <85%	Baik
4	55% - <70%	Cukup
5	$\leq 55\%$	Kurang

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputy Bidang Perekonomian terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Perekonomian. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

## A. Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Strategis yakni “terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perekonomian” dan “terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian” digunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Gambaran realisasi *output* dan *outcome* Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Realisasi Kinerja Deputi Bidang Perekonomian  
Tahun 2021

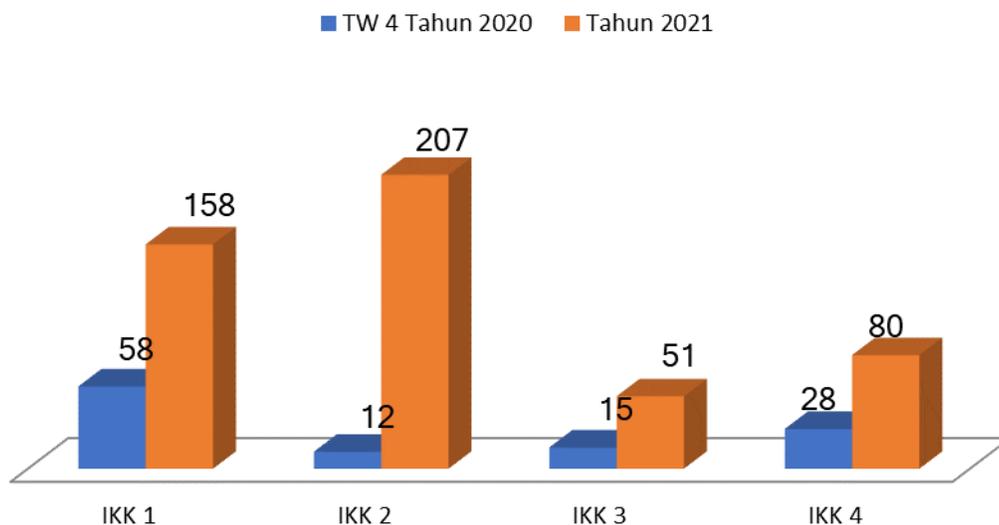


Berdasarkan gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2021 dapat dirinci menjadi 4 (empat) kategori rekomendasi yaitu *output* rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian berjumlah 158 rekomendasi sementara *outcome* berjumlah 155 rekomendasi, rekomendasi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga memiliki *output/outcome* berjumlah 207 rekomendasi, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah memiliki *output* berjumlah 51 rekomendasi sementara *outcome* berjumlah 48 rekomendasi dan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah memiliki *output/outcome* berjumlah 80 rekomendasi, sehingga **total realisasi *output* sebanyak 496 rekomendasi dan realisasi *outcome* sebanyak 490 rekomendasi, dengan demikian persentase capaian kinerja dengan target 91 % adalah 108,6%**. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian dikategorikan memuaskan.

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dengan adanya restrukturisasi dalam rangka penyempurnaan tugas dan fungsi pada bulan Oktober Tahun 2020, sehingga IKK yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) disesuaikan menjadi 4 (empat) IKK, maka perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja triwulan IV tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2021.

**Gambar 3.2**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Deputy Bidang Perekonomian  
Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021



Berdasarkan gambar 3.2 di atas, jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan pada tiap IKK di tahun sebelumnya, namun persentase capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 108,6% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 113,33%, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 90% untuk target tahun 2020 menjadi 91% untuk target tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, pencapaian *output* dan *outcome* Deputy Bidang Perekonomian menghadapi beberapa kendala, salah satunya kondisi pandemi yang menyebabkan banyaknya rencana kegiatan yang tertunda sehingga beberapa hal tidak tercapai. Selain itu, terbatasnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta sistem informasi yang belum optimal, namun Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian. Dalam mencapai kategori memuaskan tersebut, Deputy Bidang Perekonomian telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Meningkatkan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. Mengusulkan *capacity building* dan meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan melalui pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan;
5. Pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Melaksanakan rapat internal rutin setiap bulannya bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian demi menjaga keselarasan capaian kinerja.

### C. Gambaran Kegiatan

Sedangkan, gambaran kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Periode 2 (dua) Tahun 2021 sebagai berikut:

IKK 1 (Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

#### 1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan pembentukan *Indonesia Investment Authority*

Dalam rangka terobosan baru pengembangan iklim investasi, Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang selanjutnya disebut *Indonesia Investment Authority* (INA) sebagai Badan Hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. INA dengan pendekatan model *Sovereign Wealth Fund* (SWF) memiliki kewenangan khusus (*sui generis*) untuk melakukan pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat guna meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi secara jangka panjang dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Terobosan investasi melalui Lembaga dengan model SWF ini diperlukan mengingat rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi dan kapasitas pembiayaan BUMN juga semakin terbatas, namun kebutuhan investasi masih tinggi dan minat investor luar negeri masih terjaga.



**Surat Seskab kepada Ketua Dewan Pengawas INA/Menteri Keuangan tentang Persetujuan Presiden atas Pemenuhan Modal INA**

Modal INA bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan struktur organisasi INA terdiri atas: (1) Dewan Pengawas (Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN, dan (2) 3 orang dari unsur profesional) dan Dewan Direktur (berjumlah 5 orang unsur profesional).

Dasar hukum pendirian INA yaitu 9 pasal (mandat) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan ke dalam pembentukan 3 (tiga) PP yaitu: (a) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI; (b) PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI; dan (c) PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan LPI dan/atau Entitas yang Dimilikinya.

Peran Setkab dalam pembentukan LPI: memberikan saran masukan dan arahan Presiden dalam beberapa kali Rapat pimpinan terkait LPI yang dipimpin oleh Presiden yaitu:

- a. Rapat Internal tanggal 2 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 5 November 2020, dan 26 November 2020,
- b. Pemberian saran, rekomendasi dan pertimbangan atas surat Ketua Dewan Pengawas INA tanggal 28 April 2021 mengenai permohonan persetujuan pemenuhan modal INA di Tahun 2021.

## 2. Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Kebijakan Ekspor (Mineral dan Batubara)

Dalam Rapat Intern Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Ekspor pada tanggal 21 Januari 2021, Presiden memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet untuk:

- a. membahas mengenai defisit neraca perdagangan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batubara (minerba), yang memberikan sumbangan negatif dalam neraca perdagangan komoditas;
- b. melaporkan komoditas ekspor minerba yang akan direlaksasi, rencana kebijakan relaksasi, serta mekanisme kontrol Pemerintah;

- c. melaporkan data (kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku industri serta konsumsi di dalam negeri) komoditas mineral yang konkret dan mengkalkulasikan total nilai tambah ekspor komoditas dimaksud beserta turunannya.

Sehubungan dengan arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet mengoordinasikan rapat Tingkat Eselon I dengan hasil kesepakatan antara lain:

- a. Prioritas pemberian relaksasi ekspor mineral batubara, yang memberikan peningkatan nilai ekspor dan PNBPN yang signifikan, dengan skema relaksasi peningkatan rencana produksi dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan peningkatan rencana produksi batubara yaitu melalui penyesuaian Peraturan Menteri ESDM.

- b. Komoditas mineral lainnya yang menjadi prioritas untuk diberikan relaksasi ekspor yaitu konsentrat besi dan bauksit, yang dapat meningkatkan nilai ekspor cukup signifikan yaitu senilai Rp8,61 triliun dan PNBPN sebesar Rp483,72 miliar.

Sedangkan untuk komoditas ilmenit, relaksasi diberikan dengan membuka peluang ekspor bagi ilmenit, yang sebelumnya dilarang untuk ekspor. Hal tersebut selain menambah nilai ekspor sebesar Rp244,90 miliar, juga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan perusahaan tambang ilmenit.

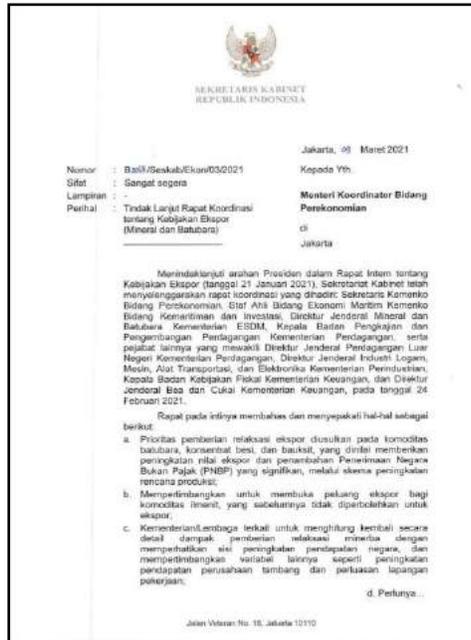
- c. Jangka waktu pemberian relaksasi ekspor komoditas mineral yang diusulkan dibatasi hanya selama 1 (satu) tahun guna menjaga supply dan stabilitas harga komoditas di dalam negeri.

Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan hasil kesepakatan rapat koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 24 Februari 2021 di Sekretariat Kabinet, dan meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penajaman rencana relaksasi ekspor mineral bersama Kementerian/Lembaga terkait sesuai arahan Presiden (surat Nomor: B.0068/Seskab/Ekon/03/2021, tanggal 9 Maret 2021).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan hasil kesepakatan rapat, dan Menteri ESDM telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri ESDM, yaitu:

- a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021; dan
- b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 67.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Produk Mineral Tertentu pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kedua Kepmen ESDM mulai berlaku tanggal 6 April 2021, dan berakhir tanggal 31 Desember 2021. Dalam dua Keputusan Menteri ESDM tersebut, relaksasi ekspor mineral, tetap dikenakan bea keluar.



**Surat Sekretaris Kabinet menyampaikan Tindak Lanjut  
Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Ekspor (Mineral dan Batubara)**

### 3. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan penyelenggaraan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden untuk membahas sejumlah topik yang dinilai mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Percepatan pelaksanaan PSN tersebut juga diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun sub-topik yang akan dibahas antara lain adalah :

- a. Perubahan daftar PSN;
- b. Pemenuhan kebutuhan dana untuk pengadaan lahan proyek PSN sektor jalan tol;
- c. Percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Bantuan Teknis di Kementerian ATR/BPN; dan
- d. Payung hukum alternatif skema pembiayaan melalui Land Value Capture (LVC).

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pra-Ratas pada tanggal 21 Juni 2021 secara daring dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktur Jenderal Anggar.

## Latar Belakang

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. IPW.145/M.EKON/06/2021



**Inti Surat:**

Menyampaikan usulan Rapat Terbatas dengan isu pembahasan terkait:

1. Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
2. Kebutuhan Tambahan Dana Untuk Pengadaan Lahan PSN
3. Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang Dalam Rangka Mendukung *Online Single Submission*
4. Perlunya Payung Hukum Untuk Alternatif Skema Pembiayaan Melalui *Land Value Capture*

2

Rapat Koordinasi Pra-Ratas Percepatan Pelaksanaan PSN, 21 Juni 2021

Selain itu dalam rangka mengoordinasikan dan mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat, Sekretariat Kabinet beserta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginventarisir PSN di Jawa Barat yang kemudian akan disusun payung hukum guna mempercepat implementasinya. Inventarisir dilakukan dengan peninjauan lapangan dan juga serangkaian rapat koordinasi di Jawa Barat.







#### 4. Mengawal Pengembangan Vaksin Merah Putih (VMP)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Prioritas Nasional Ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, memiliki arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka optimalisasi tingginya bonus demografi yang dimiliki agar Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* dengan mencapai pertumbuhan negara di atas 5% dan menjadi negara maju pada tahun 2045. Program Prioritas yang telah ditetapkan adalah Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Prioritas yaitu Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan; dan Proyek Prioritas yaitu Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Namun, adanya pandemi COVID-19 secara global pada tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Penyebaran COVID-19 di Indonesia secara langsung berdampak pada kondisi perekonomian serta mempengaruhi sasaran pembangunan SDM.

Oleh karena itu, percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus segera dilaksanakan di antaranya adalah prioritas pengembangan Vaksin Merah Putih (VMP) sebagai wujud kemandirian pengadaan vaksin dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelayanan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) jo. Perpres No. 14 Tahun 2021 yang mengatur bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tersebut sesuai dengan pasal 1 meliputi; (a) pengadaan vaksin COVID-19; (b) pelaksanaan vaksinasi COVID-19; (c) pendanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan (d) dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, percepatan pengadaan vaksin dan vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

Dalam Rapat Terbatas tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi pada tanggal 26 Oktober 2020, Presiden memberikan arahan, yakni:

- a. VMP siap diproduksi massal pada triwulan III tahun 2021;
- b. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) dan para pemimpin K/L terkait lainnya agar mendesain sejak awal untuk mengerem pembelian vaksin dari luar negeri dan mendorong VMP untuk segera dapat masuk paling tidak pada kuartal IV tahun 2021;
- c. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) agar mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma dalam pengembangan vaksin buatan dalam negeri, yaitu VMP yang diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2021;
- d. VMP benar-benar dihitung dan didesain sehingga dapat segera masuk dan terlibat dalam vaksinasi; dan
- e. Pemerintah akan memberikan “panggung” kepada VMP pada saatnya nanti telah siap untuk diproduksi massal. Hal yang sama juga berlaku untuk dukungan dana terhadap pengembangan VMP.

Sebagai tindak lanjut atas Arahan Presiden tentang Pengembangan VMP, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi tanggal 10 Februari 2021 untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut yang dihadiri oleh perwakilan dari: (i) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon); (ii) Kemenristek/BRIN; (iii) Kemen BUMN; (iv) BPOM; dan (v) Lembaga Bio Molekuler Eijkman (LBM Eijkman), dengan kesepakatan:

- a. Terdapat 6 (enam) institusi yang mengembangkan VMP, yaitu LBM Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair);
- b. Kemenko Ekon diharapkan segera menyusun *roadmap* penyelesaian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai dasar awal dan upaya percepatan pengembangan target produksi massal VMP untuk selanjutnya dilakukan monitoring bersama Sekretariat Kabinet.



Rapat Koordinasi Koordinasi via Zoom di Sekretariat Kabinet, 10 Februari 2021

Penyampaian kesepakatan hasil rakor tersebut melalui surat Seskab Nomor B.46/Seskab/Ekon/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Menko Ekon perihal Percepatan Proses Pengembangan Vaksin Merah Putih.



Surat Seskab Nomor B.46/Seskab/Ekon/02/2021 tanggal 16 Februari 2021

Kemenko Ekon telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang merupakan tindak lanjut surat dari Sekretaris Kabinet dimaksud tanggal 22-23 Februari 2021 yang dipimpin oleh Deputy Director of Business, Innovation, and SME Development Coordination, Ministry of Economy and attended by representatives from (i) Secretary of the Cabinet; (ii) BPO; (iii) LBM Eijkman; (iv) (LPI); (v) Unair; (vi) PT Bio Farma (Persero); and (vii) PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, with results as follows:

- a. Savings *timeline* acceleration development VMP with using yeast (*yeast based*) from LBM Eijkman that done by PT Bio Farma is optimization process started in June 2021 and done during 24 (twenty four) weeks after receiving *seed vaccine*, pre-clinical test and production *clinical lot* done during 8 (eight) weeks that ended in December 2021, third phase clinical test that will be done during 8 (eight)

bulan, dan secara paralel memperoleh izin penggunaan darurat pada bulan Juni 2022. Penghematan *timeline* sebagaimana terlampir pada Lampiran II;

- b. Perlu dilakukan strategi dan kebijakan dari pemerintah dalam persiapan dan rekrutmen relawan yang memenuhi kriteria dan penentuan wilayah uji klinis sedari awal (misalnya dari tahap uji preklinik) mengingat saat ini proses vaksinasi sedang berjalan yang dikhawatirkan dapat menciptakan *herd immunity* (sehingga tidak memenuhi kriteria) dan mempertimbangkan bahwa kebutuhan sampel yang cukup banyak antara 5.000 sampai 20.000 orang;
- c. Perlu dukungan lain dari pemerintah untuk mempermudah proses pengembangan VMP, antara lain insentif fiskal, kemudahan pengiriman impor penyediaan sarana dan prasarana, misalnya bioreaktor, serta jaminan penggunaan vaksin dari pelaku industri (jika memenuhi standar dan berkualitas baik).
- d. Pertemuan rutin akselerasi pengembangan VMP akan dilakukan 2 (dua) minggu sekali.

Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pemantauan bersama di 4 (empat) lokasi, yaitu: (i) LBM Eijkman, Jakarta Pusat tanggal 13 April 2021; (ii) PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat tanggal 22-24 April 2021; dan (iii) PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bogor, Jawa Barat tanggal 26-28 April 2021, dan; (iv) Unair, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 27-29 Mei 2021.

Tujuan dilakukannya kegiatan pemantauan bersama ke lokasi pengembangan VMP adalah untuk mengidentifikasi: (i) kondisi eksisting, yaitu tahapan dan progres yang sedang dan telah dilakukan; (ii) kendala atau permasalahan yang dihadapi; serta (iii) dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait atas pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden tentang pengembangan VMP, yang dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan ke lokasi pengembangan VMP (lembaga penelitian dan industri) bersama dengan Kemenko Ekon, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemenristek/BRIN, Kemen BUMN, BPOM, dan Sekretariat Kabinet.



Rapat Konsinyasi Pengembangan VMP di Hotel Sheraton, Bandung, 22 dan 23 Februari 2021



Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di LBM Eijkman, Jakarta Pusat, 13 April 2021



Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di PT Bio Farma (Persero), Bandung secara *hybrid*, 22 s.d. 24 April 2021



Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bogor, 26 s.d. 28 April 2021



Rapat Koordinasi di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, 27 s.d. 29 Mei 2021

Identifikasi permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan arahan Presiden dimaksud, sebagai berikut:

- a. ketidakpastian anggaran dan pendanaan yang berpotensi menghambat percepatan pengembangan VMP dari sisi hulu dan hilir. Pada sisi hulu, ketidakpastian pencairan anggaran yang akan digunakan untuk pemberian gaji para peneliti tenaga kontrak VMP dapat memperlambat proses penelitian. Sementara pada sisi hilir, skema bantuan dari pemerintah untuk mendampingi proses produksi masal sangat dibutuhkan oleh pelaku industri mengingat kebutuhan jumlah vaksin yang sangat besar.
- b. tantangan pada pelaksanaan uji klinik terkait kebutuhan sampel yang cukup banyak sekitar 5.000 hingga 20.000 orang untuk uji klinik fase 1 s.d. 3, sementara proses vaksinasi saat ini sedang berjalan sehingga hal tersebut berpotensi menciptakan *herd immunity* dan jumlah relawan yang akan dijadikan sampel menjadi sangat terbatas.
- c. masalah keterbatasan bahan baku dan peralatan pengembangan vaksin, baik hewan uji makaka, *mice*, bahan baku *seed vaccine* seperti sel vero dan peralatan seperti reagen kit yang mulai langka, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang membutuhkan bahan baku dan peralatan yang sama dalam pengembangan vaksin di masing-masing negara, seperti India dan Amerika Serikat .
- d. pengaturan regulasi terkait penggunaan VMP, perlu adanya dukungan dari Kemenkes agar dapat mengubah Perpres sehingga dapat memasukkan VMP sebagai salah satu vaksin yang dapat digunakan untuk vaksinasi. Di samping itu, perlu dilakukan persiapan pendaftaran VMP ke World Health Organization (WHO).

Lebih lanjut, dalam Rapat Internal Presiden tentang Vaksin Bio Farma pada tanggal 5 Mei 2021, Presiden memberikan arahan lanjutan terkait pengembangan VMP, yaitu:

- a. Menteri BUMN, laporkan terkait perkiraan perhitungan (kalkulasi) produksi VMP di tahun 2022 diperkirakan total jumlah produksi vaksin baik oleh PT Bio Farma (Persero) maupun PT Biotis Pharmaceutical Indonesia dapat mencapai 1 miliar dosis, terdiri dari produksi oleh PT Bio Farma (Persero) sebesar 250 juta dosis dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia sebesar 750 juta dosis;
- b. Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan, pastikan 1 miliar dosis vaksin tersebut hanya ditujukan khusus untuk vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan, pastikan tidak terdapat masalah pada sisi anggaran terkait pengembangan VMP. Meski demikian, Menteri BUMN menambahkan bahwa diperlukan kalkulasi lebih lanjut terkait skema komersialisasi vaksin tersebut antara dibeli oleh Menteri Kesehatan atau dijual ke luar negeri;
- d. Perkiraan sementara harga VMP oleh Menteri BUMN dianggap telah bagus dan kompetitif. Biaya produksi VMP diprediksi berkisar US\$5 per dosis vaksin (disamakan dengan harga vaksin AstraZeneca saat ini) sehingga penetapan harga untuk penjualan ke luar negeri maupun harga yang diberlakukan di dalam negeri masih akan mengalami penyesuaian;
- e. Menteri Keuangan, pastikan anggaran untuk pengadaan vaksin di tahun 2022 sebesar Rp77 triliun tetap ada meskipun VMP mulai diproduksi pada Maret hingga Mei 2022;
- f. Para pimpinan K/L terkait, tindak lanjuti berbagai skema kerja sama pengembangan VMP baik di berbagai universitas, LBM Eijkman, BUMN, maupun pihak swasta. Jangan sampai Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada impor vaksin COVID-19.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: B.0231/Seskab/Ekon/07/2021, tanggal 1 Juli 2021 perihal Percepatan Penyelesaian Vaksin Merah Putih, yang pada intinya menyampaikan agar

Menko Bidang Perekonomian dapat mengoordinasikan beberapa hal guna percepatan tindak lanjut arahan Presiden tersebut, sebagai berikut:

- 1) Menteri Keuangan:
  - a. untuk dapat menindaklanjuti percepatan realokasi dan rencana anggaran kepada BRIN sebesar Rp700 miliar, Kemenkes sebesar Rp257 miliar, dan anggaran terkait penelitian dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - b. untuk melakukan kajian penghapusan Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk untuk alat-alat penelitian;
- 2) Menteri Badan Usaha Milik Negara bersama dengan Menteri Kesehatan untuk terus mengawasi, mengawal, dan memberikan dukungan terkait produksi 1 miliar dosis VMP, yang terdiri dari 250 juta dosis PT Bio Farma (Persero) dan 750 juta dosis PT Biotis Pharmaceutical Indonesia;
- 3) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau Kepala BRIN untuk memberikan kepastian dan kejelasan terkait Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dan pendanaan pengembangan VMP sehubungan dengan masa transisi dan atas pelaksanaan **Perpres No. 31 Tahun 2021** tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kemendikbudristek dan Kementerian Investasi/BKPM, Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Keppres No.72/P Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara, dan Keppres No.19/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala BRIN;
- 4) Kepala BPOM untuk terus memberikan pendampingan yang intensif dan relaksasi persyaratan kepada pelaku industri untuk pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi pembuatan vaksin sesuai dengan GMP dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik.



**Surat Sekretaris Kabinet Nomor:  
B.0231/Seskab/Ekon/07/2021, tanggal 1 Juli 2021**

## 5. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam Rapat Internal mengenai 'Regulasi Pinjaman Online'

Presiden mengadakan Rapat Internal dengan pokok pembahasan terkait masalah 'Pinjaman Online' pada tanggal 15 Oktober 2021 di Istana Merdeka Jakarta. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban terilit hutang akibat tingginya bunga pinjaman yang menjerat, bahkan ada yang mencapai 60% per tahun, yang diibaratkan seperti rentenir online. Bunga

yang melebihi batas wajar tersebut umumnya diberikan oleh lembaga pinjaman online ilegal yang juga menjadi masalah tersendiri. Regulasi yang ada harus lebih dipertegas agar pinjaman online ilegal tidak menjamur dan tidak semakin meresahkan masyarakat.

Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui dukungan briefing sheet untuk Rapat Internal terkait. Dalam dokumen dimaksud, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan pinjaman online yang antara lainnya adalah:

- a. Agar seluruh stakeholder termasuk aparat keamanan secara keseluruhan bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal agar bisa terus mengawasi dan mengawal perkembangan pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan masyarakat, serta menciptakan skema-skema mitigasi resikonya.
- b. Kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas *fintech lending ilegal* ialah dengan meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat.
- c. OJK dan Kemenkominfo agar bisa menguatkan proses pembinaan, evaluasi, dan verifikasi terhadap fintech maupun Koperasi Simpan Pinjam yang sudah ada maupun yang baru terbentuk kedepannya. Proses tersebut harus dilakukan secara prosedural bertahap mulai dari proses pendaftaran, penyertaan permodalan, hingga memastikan adanya sistem teknologi yang reliabel dan aman secara maksimum.

Adapun tindak lanjut dan perkembangan dari Rapat Internal tersebut antara lain:

- a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru.
- b. Per 22 Oktober 2021, Kepolisian telah menangani 13 kasus pinjol ilegal dengan 57 tersangka yang terungkap serta tertangkap.
- c. Per 16 Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penutupan terhadap 1.856 lembaga pinjaman online ilegal yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

#### 6. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam Rapat Internal mengenai "Pembentukan *Single Entity* Gula (Sugar Co)"

Presiden menyelenggarakan Rapat Internal dengan pokok pembahasan rencana kebijakan pembentukan sebuah entitas bisnis baru yang bertanggungjawab dan menjadi *holding* baru di bidang produksi gula.

Sejarah mencatat, Indonesia pernah berjaya sebagai negara produsen gula terbesar di dunia, yang memiliki pabrik pengolahan mencapai 179 unit dan menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir ke-2 terbesar di dunia setelah Kuba. Berangkat dari catatan tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 peningkatan produksi Gula Kristal Putih (GKP) menjadi target yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya swasembada gula konsumsi. Berdasarkan data Kementerian BUMN kebutuhan gula nasional diprediksi akan mengalami peningkatan hingga mencapai 3,8 juta ton di tahun 2025 dan 4,4 juta ton di tahun 2030. Namun demikian, hingga saat ini produksi komoditas gula ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kelangkaan komoditas gula dan tingginya harga di tingkat konsumen merupakan permasalahan yang berulang kali terjadi.

Kementerian BUMN memiliki inisiatif untuk merestrukturisasi bisnis gula melalui restrukturisasi PTPN Grup sebagai BUMN penghasil GKP dengan pembentukan *Single Entity Gula* (Sugar Co).

Berdasarkan kajian Sekretariat Kabinet, beberapa permasalahan pada bisnis gula PTPN Grup seperti tersebarnya portofolio di seluruh Indonesia, kegiatan operasional yang belum terstandarisasi, produktifitas tebu yang hanya mencapai 50-85ton/ha (rata-rata kompetitor 110-120 ton/ha), utilitas pabrik yang hanya mencapai 80-90% (rata-rata kompetitor 90-92%), Harga Pokok Produksi (HPP) yang mencapai Rp9.899, serta ketergantungan kepada petani rakyat dalam hal supply tebu menyebabkan kinerja keuangan PTPN Group belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi:

- a. Menteri BUMN agar memastikan dan menjamin bahwa restrukturisasi PTPN melalui **pembentukan Sugar Co.** dimaksudkan untuk **meningkatkan kinerja bisnis gula PTPN**, serta untuk mendukung **pemenuhan kebutuhan stok gula nasional**, **menjaga stabilitas harga gula** dalam negeri di tingkat **konsumen**, dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu
- b. Menteri BUMN agar memastikan setelah terbentuknya Sugar Co. segera dilakukan **revitaliasi pabrik gula** melalui **peremajaan mesin** untuk **mengembangkan kapasitas giling** dan **menurunkan HPP**; **revitalisasi tanaman tebu on-farm** dengan pemilihan **tanaman tebu yang memiliki kandungan gula tinggi**. Selain itu, PTPN dan Sugar Co. agar dapat **bersinergi** mendukung ekosistem  **Holding Pangan**. Menteri BUMN agar mengkondisikan terhindarinya persaingan dan perebutan pangsa pasar antar BUMN.
- c. Terkait rencana divestasi saham yang dilakukan Sugar Co. Menteri BUMN agar tetap menjaga **PTPN III sebagai pemegang saham mayoritas pada Sugar Co.**, dengan **proporsi minimal 51%**. Sementara besaran proporsi saham investor pada Sugar Co. maksimal sebesar **49%**. Menteri BUMN juga agar memperhatikan bahwa **gula merupakan barang strategis ke-2 setelah beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat**, sehingga jika kepemilikan mayoritas adalah investor berpotensi menimbulkan gejolak dan polemik publik.
- d. Menko Ekon dan Menteri Perindustrian agar dalam **memberikan kuota impor kepada BUMN**, memperhatikan : (a) perhitungan besaran alokasi impor *raw sugar* produk GKP telah **memaksimalkan kecukupan produksi dalam negeri**; (b) tidak memberikan izin impor pada masa giling tebu; (c) mengkalkulasi jadwal kedatangan izin impor; dan (d) **mekanisme penentuan kuota impor sesuai Permendag 14/2020**.
- e. Menteri BUMN, Menteri Keuangan agar terus mengawal proses pembentukan Sugar Co. dan mengawasi dengan baik sehingga proses pembentukannya **tidak mengganggu pelaksanaan produksi gula**. Mitigasi secara cermat potensi resiko yang akan terjadi dan siapkan solusinya. Dalam hal ini, termasuk **resiko penyesuaian kebijakan dan target penyelesaian** pembentukan Sugar Co pada **31 Desember 2021**.

## 7. Penyesuaian Anggaran BP2MI Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 Tahap IV

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kepada Presiden mengajukan permohonan arahan Presiden terkait penyesuaian anggaran BP2MI, sebagai tindak lanjut dari *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV, yaitu pemotongan Pagu APBN BP2MI sebesar Rp 30.940.189.000, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV.

Refocusing anggaran tersebut dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI yang dilakukan oleh BP2MI, antara lain dikarenakan:

- a. Meningkatnya jumlah kepulungan PMI yang diakibatkan oleh kebijakan *lockdown* dari negara penempatan, kebijakan *amnesty* khusus untuk *overstayers* di Arab Saudi, kepulungan akibat deportasi, pemulangan reguler dan habis kontrak, termasuk rencana memulangkan PMI Terkendala dari Malaysia sebanyak 7.300 orang. Kepulungan PMI selanjutnya difasilitasi dan

dibiayai oleh BP2MI mulai dari debarkasi sampai ke daerah asal PMI tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan pagu APBN BP2MI dengan jenis Belanja Tidak Mengikat.

b. Antisipasi fasilitasi layanan proses penempatan PMI kembali apabila Covid-19 telah berakhir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, Kedeputusan Bidang Perekonomian (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan) melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan hasil kesepakatan antara lain:

a. Pemerintah akan melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp 55,21 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang digunakan untuk penanganan Covid-19, untuk penanganan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid-19.

b. **Refocusing dilaksanakan bersumber dari jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang berasal dari belanja barang operasional dan non operasional.** Kriteria refocusing K/L, antara lain sisa anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 yang belum terserap di luar program pemulihan ekonomi nasional, tetapi dapat meliputi alokasi program prioritas nasional dan anggaran *multiyear contract* yang dapat direkomposisi/diluncurkan di tahun anggaran berikutnya, yang antara lain berasal diantaranya dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat bukan arahan Presiden, pembangunan gedung, serta belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.

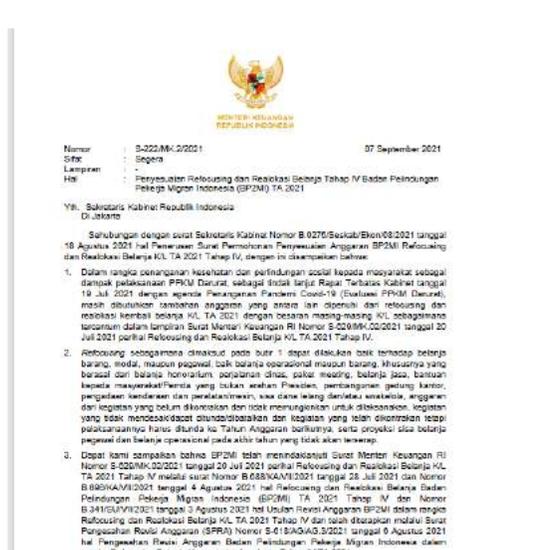
c. Sebagaimana yang telah diatur dalam surat Menteri Keuangan tersebut, *refocusing* dapat dilakukan melalui jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang berasal dari belanja barang operasional dan non operasional (belanja yang produktif sehingga kualitas belanja menjadi kunci). **Oleh karena itu, BP2MI dapat melakukan refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021 Tahap IV yang tidak hanya bersumber dari Belanja Tidak Mengikat, namun berasal dari Belanja Mengikat APBN BP2MI.**

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0275/Seskab/Ekon/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 kepada Menteri Keuangan, yang menyampaikan permohonan Kepala BP2MI tersebut.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan melalui surat nomor Nomor: S-222/MK.2/2021, tanggal 7 September 2021 menyampaikan Hasil Penyesuaian Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) TA 2021, yang telah ditetapkan melalui Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor S-618/AG/AG.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka Refocusing Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV TA 2021.



Surat Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penyesuaian anggaran BP2MI, sebagai tindak lanjut dari refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV



**Surat Menteri Keuangan menyampaikan Hasil Penyesuaian Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) TA 2021**

**8. Permohonan Kesiapan Presiden dalam Peresmian Pabrik PT. Yili Indonesia Dairy**

Menteri Perindustrian menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk kesiapan meresmikan pabrik PT Yili Indonesia Dairy (PT YID), disertai dengan pelaksanaan vaksinasi massal anak sekolah di Cikarang, Jawa Barat.

PT YID merupakan industri pengolahan susu, penanaman modal asing dari Yili International Development Co Limited dan Hongkong Jingang Trade Holding Co. Limited. Yili masuk dalam 5 (lima) besar perusahaan susu skala global dan produsen pengolahan susu di Asia.

Sampai dengan kuartal II tahun 2021, PT YID telah merealisasikan investasinya sebesar Rp1,8 triliun dari total investasi sebesar Rp2,5 triliun. Dari total 17 hektar luas lahan yang dimiliki oleh PT YID, 10 hektar telah terbangun dan sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 270 orang tenaga kerja (dari total 800-1000 orang rencana penyerapan tenaga kerja).

Kehadiran Presiden untuk meresmikan pabrik PT YID dimaksud merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam mendukung masuknya investasi baru dan mendorong pelaku usaha lokal untuk juga berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan investasi dimaksud.

Menindaklanjuti surat Menteri Perindustrian tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Presiden menyampaikan memo permohonan kepada Presiden untuk meresmikan pabrik PT Yili Indonesia Dairy (memorandum Nomor: M.0936/Seskab/11/2021, tanggal 8 November 2021).



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor: M.0836/Seskab/11/2021

Tanggal: 08 November 2021

Kepada Yth: Presiden RI  
Dari: Sekretaris Kabinet  
Perihal: Permohonan Kesenjangan Presiden untuk Meresmikan Pabrik PT Yili Indonesia Dairy

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut pada pokok memo, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menteri Perindustrian melalui surat kepada Presiden, menyampaikan permohonan kesediaan Presiden untuk meresmikan pabrik PT Yili Indonesia Dairy (PT YID) di Greenland International Industrial Center (GIC) Kabupaten Bekasi.
2. Dalam suratnya, Menteri Perindustrian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PT YID merupakan industri pengolahan susu (es krim dengan merek dagang "Joyday") peranakan modal asing dari Yili International Development Co. Limited dan Hongkong-Jingang Trade Holding Co. Limited. Yili masuk dalam 5 (lima) besar perusahaan susu skala global dan produsen olahan susu nomor 1 (satu) di China dan Asia.
  - b. Sampai dengan kuartal III tahun 2021, PT YID telah merealisasikan investasinya sebesar Rp1,8 triliun dan total investasi sebesar Rp2,5 triliun. Dan total 17 hektar luas lahan yang dimiliki oleh PT YID, 10 hektar telah terbangun dan sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 270 orang tenaga kerja (dari total 800-1000 orang rencana penyerapan tenaga kerja).
  - c. PT YID membutuhkan bahan baku susu antara lain whole milk powder sebesar 500 ton/tahun, skim milk powder sebesar 600 ton/tahun, dan anhydrous milk fat sebesar 200 ton/tahun. Dengan kebutuhan yang besar tersebut, PT YID berencana untuk melakukan komitmen dengan peternak sapi perah dan industri pengolahan buah lokal sebagai bagian dari investasi baru.
  - d. Permohonan kepada Presiden untuk berkenan hadir dan meresmikan pabrik PT YID yang sekaligus dilaksanakan vaksin massal anak sekolah di Cikarang, Jawa Barat.
3. Terhadap surat Menteri Perindustrian tersebut, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:
  - a. PT YID merupakan cabang usaha dari Yili Group Oceania Dairy berskala global yang bergerak di bidang pengolahan susu dengan pertumbuhan bisnis mencapai USD 6,2 milyar pada periode 2017. Hal ini dapat memunculkan sentimen positif kepada dunia global apabila PT YID dapat berinvestasi secara baik dan optimal di Indonesia.

b. Komitmen...

Memo Sekretaris Kabinet  
menyampaikan permohonan kepada Presiden

## 9. Kehadiran Presiden dalam *National Day* pada Expo 2020 Dubai Expo

Menteri Perdagangan menyampaikan undangan dari *Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai* untuk memohon kehadiran Presiden pada perhelatan *National Day* pada Expo 2020 Dubai, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Expo 2020 Dubai akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2021 s.d. 31 Maret 2022 (182 hari) di Dubai, Persatuan Emirat Arab, yang diharapkan dapat menjadi *platform* bagi Indonesia untuk menarik investasi, mempromosikan kerja sama perdagangan dan pariwisata internasional, sekaligus momentum bangkitnya citra bangsa setelah pandemi. Tema paviliun Indonesia adalah *Transforming Future Civilization through Innovation and Diversity* dengan *tagline Home of Diversity A Feeling of Tomorrow*, dengan konsep keberagaman budaya, kreativitas dan inovasi anak bangsa, serta pencapaian dan prestasi Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk kiranya dapat menghadiri acara dimaksud dengan pertimbangan:

- a. Indonesia menjadi salah satu dari 200 negara dan organisasi internasional yang turut berpartisipasi dalam Expo 2020 Dubai.
- b. Expo 2020 Dubai merupakan kegiatan bergengsi dan terbesar kedua setelah Olimpiade yang diadakan setelah adanya pandemi COVID-19.
- c. Kesempatan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Negara Persatuan Emirat Arab dan Negara peserta Expo 2020 Dubai lainnya.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M.736 Seskab/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dan sekaligus dalam rangka kunjungan kerja kenegaraan, Presiden dapat hadir dalam *National Day* pada Expo 2020 Dubai di Persatuan Emirat Arab.

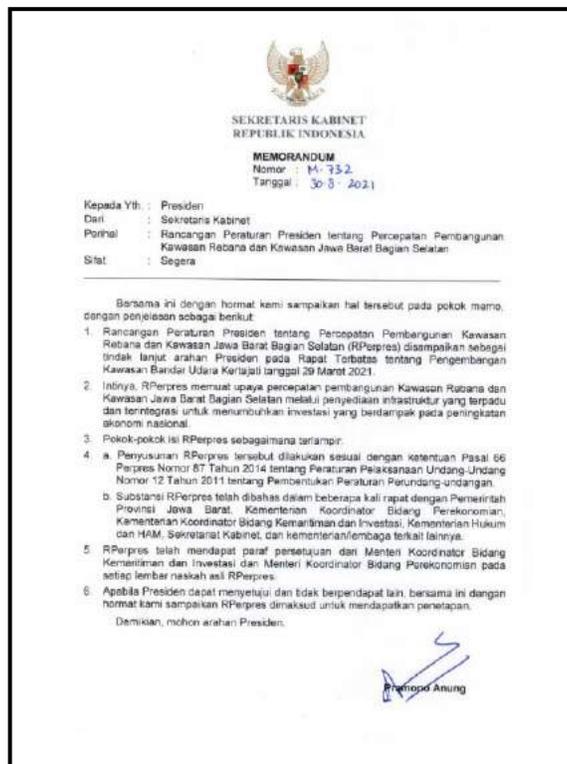


Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Paviliun Indonesia dan menghadiri National Day Expo 2020 Dubai, tanggal 4 November 2021 di Persatuan Emirat Arab

#### 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Penyusunan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Pengembangan Kawasan Bandar Udara Kertajati tanggal 29 Maret 2021. Sekretariat Kabinet mengawal penyusunan Perpres tersebut dan ikut dalam pembahasan substansinya dalam sejumlah rapat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.



Memo Seskab kepada Presiden tentang  
Penyampaian RPerpres untuk mendapatkan  
penetapan dari Presiden

Pokok-pokok isi Perpres Nomor 87 Tahun 2021 yaitu:

1. Penyusunan RPerpres dimaksudkan untuk percepatan pembangunan Kawasan Rebanan dan Jawa Barat Bagian Selatan yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Percepatan pembangunan Kawasan Rebanan dilakukan melalui pembangunan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
3. Percepatan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan melalui pembangunan pada 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
4. Percepatan pembangunan Kawasan Rebanan dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden.
5. Rencana Induk tersebut berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebanan dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sesuai kewenangan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
  - b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebanan dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

6. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden.
7. Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan Rencana Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, melaksanakan:
  - a. pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan Rencana Induk; dan
  - b. penyelesaian hambatan dan pengawasan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
12. Perubahan proyek dalam Rencana Induk, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional.
13. Perubahan Rencana Induk dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
14. Pada saat Peraturan Presiden mulai berlaku, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

#### **11. Tindak Lanjut Rapat Internal Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)**

Pada tanggal 7 Juli 2021, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Internal tentang Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Deputi Perekonomian menindaklanjuti penyelenggaraan Rapat Internal tersebut dengan menyiapkan bahan berupa briefing sheet dan infografis yang telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (melalui memorandum Deputi Perekonomian nomor M.0318/Ekon/07/2021 tanggal 7 Juli 2021) dan kepada Presiden (melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0566 tanggal 7 Juli 2021). Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet diantaranya adalah mencari cara agar mekanisme *disposal stok* dapat diimplementasikan, memanfaatkan stok CBP yang masih banyak untuk bantuan sosial beras, serta percepatan pembentukan badan pangan nasional.

Dalam Rapat Internal tersebut, Presiden memberikan arahan dan persetujuan atas usulan Menteri Keuangan terkait jumlah stok beras Perum BULOG yang akan disalurkan melalui bansos sebesar 200 ribu ton dan diberikan kepada nama-nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan tambahan 10 kg beras. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan pastikan untuk:

- a. Memberikan tambahan anggaran kepada Menteri Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat membeli beras ke Perum BULOG; dan
- b. Bersama Menteri Sosial, Dirut Perum BULOG, dan para pimpinan K/L terkait, untuk segera mengatur terkait mekanisme penyaluran stok beras tersebut sehingga dapat terealisasi. Apabila memungkinkan, lakukan penyaluran beras tersebut dalam kurun waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.
- c. Total kebutuhan anggaran Rp.2,3 triliun dihitung berdasarkan kebutuhan Perum BULOG untuk menyerap 500 ribu ton gabah petani dengan harga Rp.4.250 per kg. Menteri Keuangan menghitung kembali kebutuhan anggaran penyaluran stok beras Perum BULOG sebanyak 200 ribu ton melalui bansos oleh Menteri Sosial.

Menindaklanjuti Arahan Presiden di atas, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I dengan mengundang K/L terkait (utamanya Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) pada tanggal 8 Juli dan 9 Juli 2021 untuk mendetailkan program penyaluran/bantuan beras CBP tersebut agar segera dapat dilaksanakan di masa PPKM.

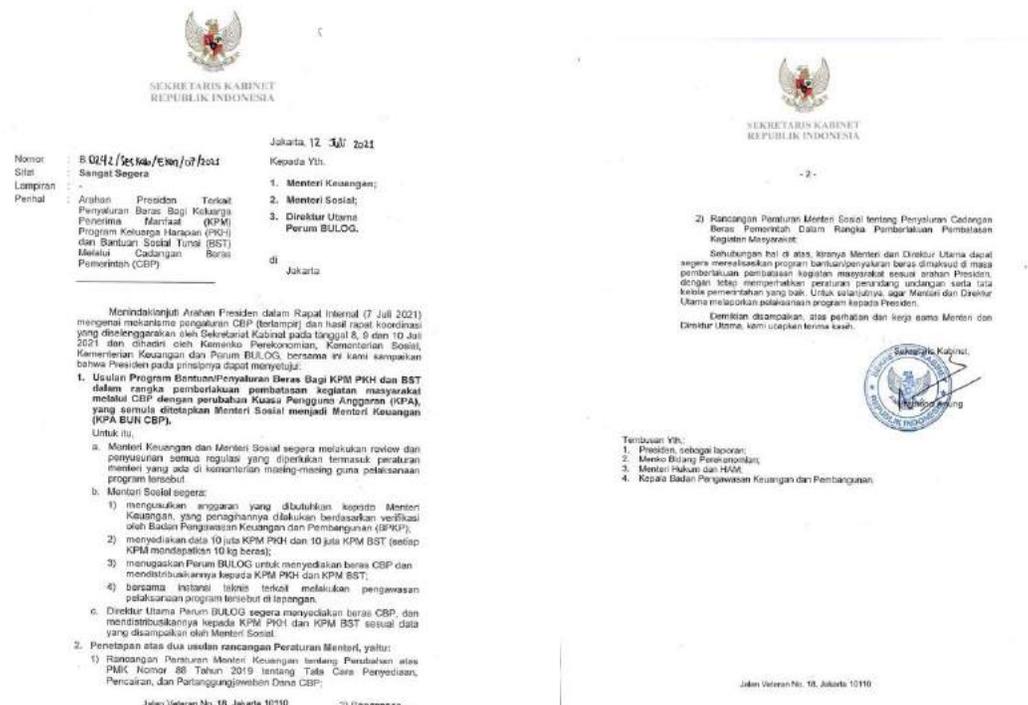


Rakor Tingkat Es. I, 8 Juli 2021 Sekretariat Kabinet



Rakor Tingkat Es. I, 9 Juli 2021 Sekretariat Kabinet

Rakor Es. I tersebut menyepakati beberapa hal diantaranya adalah persetujuan perubahan KPA dari Menteri Sosial menjadi Menteri Keuangan, selanjutnya K/L terkait untuk segera merealisasikan program ini dengan tetap menjaga *governance* yang baik, memenuhi aspek formil dan materil, serta persetujuan Presiden terhadap RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 dan RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan penyaluran beras dimaksud. Hasil kesepakatan rakor tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada K/L terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Perum BULOG) melalui surat Sekretaris Kabinet (surat nomor B.0242/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP).



Surat nomor B.0242/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Arahan Presiden Terkait Penyaluran Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam rapat/forum guna menindaklanjuti hasil Rakor tanggal 8 dan 9 Juli 2021 serta surat Seskab tanggal 12 Juli 2021 yaitu yaitu Rapat Harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas RPMK Nomor 88 Tahun 2019 (10 Juli 2021), Rapat Harmonisasi RPermensos tentang Perubahan atas RPermensos Nomor 22 Tahun 2019 (11 & 13 Juli 2021), serta beberapa penyelenggaraan Rakornis Tingkat Es. I oleh Kemenko Perekonomian (10, 14, 15, & 30 Juli 2021). Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan PMK Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 pada tanggal 28 Juli 2021.

**Arahan Presiden pada Ratas Tanggal 7 Juli 2021**

**Program Bantuan Beras** → agar dibagikan beras kepada penerima bantuan dalam rangka PPKM Darurat

1. Penyaluran **200 ribu ton beras Perum BULOG**
2. Kebijakan diarahkan untuk menyerap gabah petani dan pengelolaan stok beras Bulog yang sudah turun mutu
3. Pemerintah mengganti pembelian gabah → setara dengan sekitar **200 rb ton beras Bulog** (@Rp10.769/kg)

Harmonisasi RPermensos tentang Perubahan atas Permensos Nomor 22 Tahun 2019, 11 & 13 Juli 2021

Rakor Tingkat Es. I, 10 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian

Rakor Tingkat Es. I, 14 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian



Rakor Tingkat Es. I, 15 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian



Rakor Tingkat Es. I, 30 Juli 2021  
Kemenko Perekonomian

Menindaklanjuti Arahan Presiden dan surat Seskab, Perum BULOG telah menyalurkan beras CBP tersebut kepada masyarakat pada masa PPKM dimulai pada pertengahan Juli 2021 dan mencapai 100% sebesar 200.000 ton pada tanggal 8 Juli 2021.

**Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021**  
Per 08 Agustus 2021

NO	PROVINSI	TRANS PORTER	BST			PKH			TOTAL		% DO : PAGU
			PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	% DO : PAGU	PAGU	REAL	
1	ACEH	POS	1,859,360	1,852,860	99.65%	2,402,380	2,408,880	100.27%	4,261,740	4,261,740	100.00%
2	SUMUT	POS	5,233,480	5,230,430	99.94%	4,291,830	4,294,880	100.07%	9,525,310	9,525,310	100.00%
3	RIAU	POS	1,660,210	1,660,210	100.00%	1,496,020	1,496,020	100.00%	3,156,230	3,156,230	100.00%
4	KEPRI	POS	414,070	414,070	100.00%	392,200	392,200	100.00%	806,270	806,270	100.00%
5	SUMBAR	POS	1,758,440	1,754,530	100.35%	1,703,960	1,697,870	99.64%	3,462,400	3,462,400	100.00%
6	JAMBI	POS	594,990	688,410	98.96%	946,310	951,490	100.66%	1,539,900	1,539,900	100.00%
7	SUMSEL	DNR	1,232,990	1,218,490	98.82%	3,075,090	3,089,590	100.47%	4,308,080	4,308,080	100.00%
8	BABEL	DNR	298,160	298,160	100.00%	242,740	242,740	100.00%	540,900	540,900	100.00%
9	BENGKULU	DNR	448,910	448,910	100.00%	777,470	777,470	100.00%	1,226,380	1,226,380	100.00%
10	LAMPUNG	POS	2,284,730	2,284,730	100.00%	4,603,160	4,603,160	100.00%	6,767,890	6,767,890	100.00%
11	DKI JAYA	POS	6,374,540	6,355,590	99.77%	951,190	970,140	101.99%	9,325,730	9,325,730	100.00%
12	BANTEN	POS	7,852,520	7,843,320	99.88%	3,381,460	3,370,660	100.27%	11,213,980	11,213,980	100.00%
13	JABAR	POS	20,690,810	20,690,810	100.00%	18,139,560	18,139,560	100.00%	38,730,370	38,730,370	100.00%
14	JATENG	DNR	15,742,430	15,708,430	99.78%	16,185,250	16,199,250	100.21%	31,907,680	31,907,680	100.00%
15	JOGJA	POS	1,348,490	1,348,490	100.00%	1,969,880	1,969,880	100.00%	3,318,370	3,318,370	100.00%
16	JATIM	DNR	14,847,700	14,846,120	99.99%	17,440,940	17,442,820	100.01%	31,988,640	31,988,640	100.00%
17	KALBAR	POS	1,149,470	1,149,470	100.00%	1,639,090	1,639,090	100.00%	2,788,560	2,788,560	100.00%
18	KALTIM	POS	510,820	510,820	100.00%	604,340	604,340	100.00%	1,115,160	1,115,160	100.00%
19	KALTARA	POS	154,360	154,360	100.00%	137,100	137,100	100.00%	301,460	301,460	100.00%
20	KALSEL	POS	1,098,430	1,098,430	100.00%	863,810	863,810	100.00%	1,962,240	1,962,240	100.00%
21	KALTENG	POS	574,130	666,680	98.53%	489,060	477,510	101.80%	1,043,190	1,043,190	100.00%
22	SULUT	DNR	972,110	978,750	100.69%	841,660	834,980	99.21%	1,813,770	1,813,770	100.00%
23	GORONTALO	DNR	622,340	622,340	100.00%	585,250	585,250	100.00%	1,207,590	1,207,590	100.00%
24	SULTENG	DNR	914,260	914,260	100.00%	1,394,350	1,394,350	100.00%	2,308,610	2,308,610	100.00%
25	SULTRA	DNR	1,018,260	1,018,260	100.00%	1,195,870	1,195,870	100.00%	2,214,130	2,214,130	100.00%
26	SULSEL	DNR	2,628,820	2,602,170	99.99%	3,241,630	3,268,280	100.82%	5,870,450	5,870,450	100.00%
27	SULBAR	DNR	513,450	513,450	100.00%	638,030	638,030	100.00%	1,151,480	1,151,480	100.00%
28	BALI	DNR	1,185,250	1,185,250	100.00%	988,410	989,410	100.00%	2,174,660	2,174,660	100.00%
29	NTB	DNR	1,888,600	1,888,600	100.00%	3,366,350	3,366,350	100.00%	5,254,950	5,254,950	100.00%
30	NTT	POS	1,620,980	1,620,980	100.00%	3,721,670	3,721,670	100.00%	5,342,650	5,342,650	100.00%
31	MALUKU	POS	243,850	243,850	100.00%	957,440	957,440	100.00%	1,201,290	1,201,290	100.00%
32	MALUKU UTARA	POS	221,910	221,910	100.00%	354,480	354,480	100.00%	576,390	576,390	100.00%
33	PAPUA	DNR	384,520	384,520	100.00%	773,750	773,750	100.00%	1,158,270	1,158,270	100.00%
34	PAPUA BARAT	DNR	167,010	167,010	100.00%	368,080	368,080	100.00%	535,090	535,090	100.00%
Jumlah			100,000,000	99,883,710	99.88%	100,000,000	100,116,290	100.12%	200,000,000	200,000,000	100.00%

Realisasi Penyaluran Bantuan CBP per 8 Agustus 2021 sebesar 100%

Selanjutnya, pasca realisasi 100% penyaluran bantuan beras dimaksud, Sekretariat Kabinet tetap terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi terhadap program penyaluran bantuan beras tersebut, yaitu dengan mengikuti FGD Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Pendistribusian BB-PPKM Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Perum BULOG (27 Agustus 2021), serta melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring dan evaluasi) bersama Perum BULOG ke Banyuwangi, Jawa Timur (16-18 September 2021) dan provinsi Lampung (22-24 September 2021).



FGD Evaluasi BB-PPKM Tahun 2021, 27 Agustus 2021, Park Regis Kemang Jakarta



Pemantauan (Monev) BB-PPKM Tahun 2021  
16-18 September 2021, Banyuwangi, Jawa Timur



Pemantauan (Monev) BB-PPKM Tahun 2021  
22-24 September 2021, Provinsi Lampung

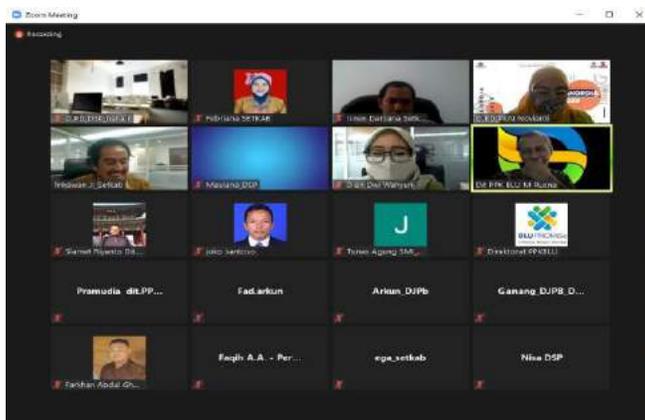
Hasil pelaksanaan kegiatan BB-PPKM Tahun 2021 yang telah mencapai 100 % dan dilengkapi dengan kegiatan pemantauan (monev) ke Jawa Timur dan Lampung telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputi Bidang Perekonomian (memo nomor M-0442/Ekon/09/2021 tanggal 29 September 2021) dan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet (memo nomor M-820 tanggal 29 September 2021).

## IKK 2 (Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

### 1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Tarif BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Presiden dalam Rapat Internal tentang Kebijakan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Kelapa Sawit pada tanggal 12 April 2021 memberikan arahan yang intinya *meminta agar tarif Pungutan Ekspor (PE) dihitung kembali dengan mempertimbangkan daya saing produk kelapa sawit, kesejahteraan petani, dan kelangsungan layanan BLU BPDPKS antara lain insentif program Biodiesel B30 dan layanan Peremajaan Sawit Rakyat*.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dalam mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Kedua PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.



Rapat Pembahasan RPKM BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Sekretariat Kabinet juga melakukan pengkajian guna pemberian rekomendasi kepada Presiden pada saat pengajuan persetujuan Presiden atas RPermen dimaksud dengan tujuan untuk memastikan bahwa substansi RPermen tidak berpotensi menimbulkan polemik dan sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Internal tersebut.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas penerbitan RPermen dimaksud. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet memproses surat persetujuan Presiden atas kedua peraturan dimaksud setelah sebelumnya memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa kedua rancangan peraturan dimaksud tidak berpotensi menimbulkan masalah secara substansi. **Persetujuan Presiden telah diberikan melalui surat Seskab Nomor B.0212/Seskab/Ekon/06/2021 dan telah terbit PMK dengan**

Nomor 76/PMK.05/2021 yang mengatur tarif BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

## 2. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Menteri Perindustrian yang Memerlukan Persetujuan Presiden

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan terjadinya reformasi secara struktural atas proses kemudahan berusaha yang berdampak pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan teknis penyederhanaan perizinan berusaha kedalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Di bidang perindustrian, amanat Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dimana dalam peraturan pemerintah ini diatur teknis pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perindustrian dengan semangat penyederhanaan proses dalam hal pengurusan perizinan berusaha dengan menggunakan kriteria berbasis risiko.

Lebih lanjut, teknis pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian tersebut diatur kedalam 7 (tujuh) Peraturan Menteri sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- c. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; dan
- g. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Perusahaan Industri Strategis yang Telah Ditetapkan Jumlah Produksi, Distribusi, dan Harga Produknya.

Sekretariat Kabinet secara aktif melaksanakan pembahasan dan pengharmonisasian atas substansi pengaturan dalam ketujuh rancangan peraturan menteri perindustrian tersebut, dimana apabila tidak ada lagi permasalahan secara substantif atas peraturan menteri tersebut, Sekretaris Kabinet akan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Presiden atas Peraturan Menteri tersebut agar bisa ditetapkan dan diundangkan.

Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021 menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021. Sedangkan 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian lainnya masih dalam proses harmonisasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.



Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

### 3. Percepatan Daftar Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Jenis Kegiatan Perusahaan Rintisan (*Start-up*) Berbasis Teknologi dan Vokasi

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Sebagai amanat UU CK telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. PP Nomor 34 Tahun 2021 diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tersebut diatur bahwa Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang bersifat wajib. Namun, pengesahan RPTKA Pengesahan tidak berlaku bagi:

- direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, **vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi**, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Guna mengakselerasi daftar jabatan yang dapat diduduki TKA dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi, Sekretariat Kabinet dalam hal ini Kedeputan Bidang Perekonomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terkait hasil rapat koordinasi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah menyampaikan surat nomor B.0205/Ekon/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 kepada Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dapat menyampaikan daftar jabatan yang dapat diduduki TKA, termasuk daftar jabatan yang dapat diduduki secara rangkap jabatan dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi.

Selanjutnya menindaklanjuti surat Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat nomor 405/DJAI/AI.02.02/05/2021 tanggal 10 2021 menyampaikan daftar jabatan untuk TKA Perusahaan Rintisan *Startup*. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui surat 3787/D/TI.00.04/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyampaikan usulan daftar jabatan yang dapat diduduki TKA bidang vokasi dan surat nomor 0813/D4/TI.00.04/2021 tanggal 8 Juni 2021 menyampaikan pula usulan rangkap jabatan TKA yang dapat diduduki oleh TKA bidang vokasi.

Hasil daftar jabatan yang dapat diduduki TKA dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat nomor B.0235/Ekon/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan B.0276/Ekon/05/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk selanjutnya daftar jabatan tersebut dapat digunakan dalam penyempurnaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh TKA, sebagaimana amanat PP Nomor 34 Tahun 2021.

Dengan telah ditetapkan jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki dan dirangkap oleh TKA, maka pelaksanaan amanat dari UU CK terkait penggunaan TKA secara selektif dapat terlaksana.



Rapat Koordinasi

**Surat B.0205/Ekon/05/2021**



**Surat B.0235/Ekon/05/2021**

**Surat B.0276/Ekon/05/2021**

**Surat Deputi Bidang Perekonomian terkait Percepatan Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Jenis Kegiatan Perusahaan Rintisan (Start-up) Berbasis Teknologi dan Vokasi**

#### 4. Peraturan Menteri Pelaksana UU CK di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serangkaian paket kebijakan diterbitkan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam rangka pemulihan perekonomian dari perlambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Terobosan utama yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pemerintah juga telah menerbitkan serangkaian aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri. Paket regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, sekaligus memulihkan perekonomian pascapandemi.

Peraturan yang disusun tentunya harus bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan serta permasalahan yang selama ini menjadi hambatan, utamanya dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Sekretariat Kabinet mengawal proses penyusunan aturan pelaksana UU Cipta Kerja, termasuk substansi pengaturan Peraturan Menteri yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja. Sekretariat Kabinet terlibat aktif baik dalam proses penyusunan, proses harmonisasi serta perolehan persetujuan Presiden. Selama Semester I Tahun 2021, terdapat 32 Peraturan Menteri di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang telah diberikan persetujuan Presidenya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Nomor Surat Persetujuan Presiden
1	RPermen Koperasi dan UKM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	B.0078/Seskab/Ekon/03/2021
2	RPermenko tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	B.0178/Seskab/Ekon/05/2021
3	RPermenko tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	B.0178/Seskab/Ekon/05/2021
4	RPermen Koperasi dan UKM tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	B.0180/Seskab/Ekon/05/2021

5	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah	B.0220/Seskab/Ekon/06/2021
6	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Penegasan Tanah Musnah	B.0220/Seskab/Ekon/06/2021
7	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
8	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
9	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
10	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
11	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
12	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
13	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
14	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021

15	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
16	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
17	RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan	B.0164/Seskab/Ekon/05/2021
18	RPeraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional	B.0165/Seskab/Ekon/05/2021
19	RPeraturan BIG tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia	B.0189/Seskab/Ekon/05/2021
20	RPeraturan BIG tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial	B.0189/Seskab/Ekon/05/2021
21	RPeraturan BIG tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri Bidang Informasi Geospasial	B.0189/Seskab/Ekon/05/2021
22	RPeraturan BIG tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial	B.0189/Seskab/Ekon/05/2021
23	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK	B.0103/Seskab/Ekon/04/2021
24	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	B.0154/Seskab/Ekon/04/2021

Peraturan Menteri tersebut selain menjadi acuan teknis dalam implementasi tetapi juga sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini menghambat pengembangan usaha dan wilayah. Sebagai contoh, sebelum UU Cipta Kerja berlaku, Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Penerbitan Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan dinilai lambat dengan memerlukan waktu 22 hari. Namun, pada implementasinya pelaksanaan tersebut dapat berlangsung lebih lama, terlebih apabila suatu kegiatan tidak terdapat dalam rencana tata ruang maka izin lokasi tidak bisa diberikan. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan dalam kegiatan berusaha. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menghapus Izin Lokasi dan mengubahnya menjadi pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang atau KKPR. KKPR juga telah mencakup pertimbangan teknis pertanahan. Ketentuan detail mengenai KKPR diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

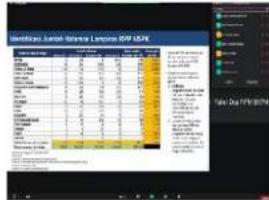
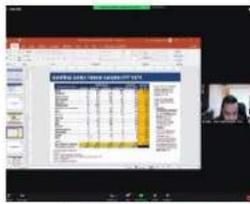
Sekretariat Kabinet dalam mengawal penyusunan aturan pelaksana tersebut, memastikan bahwa prinsip utama untuk menyelesaikan permasalahan izin lokasi sudah termuat dalam batang tubuh peraturan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah tersedia, terbit paling lambat 1 hari.
2. Dalam hal tidak tersedia RDTR, KKPR terbit paling lambat 20 hari dan berlaku fiktif positif.
3. Bagi kegiatan usaha yang belum tercantum dalam rencana tata ruang dan merupakan suatu kegiatan yang bersifat strategis nasional, kegiatan tersebut tetap dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi KKPR oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang terhambat hanya karena belum tercantum dalam rencana tata ruang.
4. Selain itu, terdapat pula kemudahan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK), kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok UMK tidak melalui proses penerbitan KKPR, melainkan cukup dengan membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan rencana tata ruang yang dilakukan melalui Sistem OSS.

#### **5. Mengawal Penyusunan RPermen sebagai pelaksanaan PP turunan UU CK**

Dalam rangka mengawal dan memastikan bahwa substansi dari Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sejalan dengan maksud dan tujuan disusnya UU CK yaitu untuk mewujudkan ekosistem investasi yang bersahabat dan mendukung penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dalam mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pelaksanaan UU CK, sekaligus melakukan pengkajian guna pemberian rekomendasi kepada Presiden pada saat pengajuan persetujuan Presiden atas RPermen dimaksud. Pengkajian dimaksud untuk memastikan bahwa substansi RPermen tidak berpotensi menimbulkan polemik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Bidang Pertanian, Sekretariat Kabinet telah terlibat dalam mengawal proses penyusunan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Dan selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas penerbitan RPermentan dimaksud dan telah dikeluarkan persetujuan Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.149/Seskab/ Ekon/4/2021, tanggal 26 April 2021 dan Surat Sekretaris Kabinet Nomor Nomor B.163/Seskab/ Ekon/05/2021, tanggal 7 Mei 2021.



Pembahasan dan Finalisasi RPP NSPK dan RBA, Minggu 24 Januari 2021

Rapat Pembahasan Penyusunan Permentan sebagai Pelaksanaan PP NSPK, 24 Februari 2021

Rapat Penyusunan R-Permentan Tindak Lanjut PP No. 5 Tahun 2021 (Biro Hukum Kementan), 3 Maret 2021



Pengharmonisasian RPermentan tentang Kajian Lapangan dan Pengawasan Obat Hewan, 13 April 2021, Avenzel Hotel



Rapat Harmonisasi RPermentan tentang Pembenihan Hortikultura Aston Hotel Bekasi, Sabtu 17 April 2021



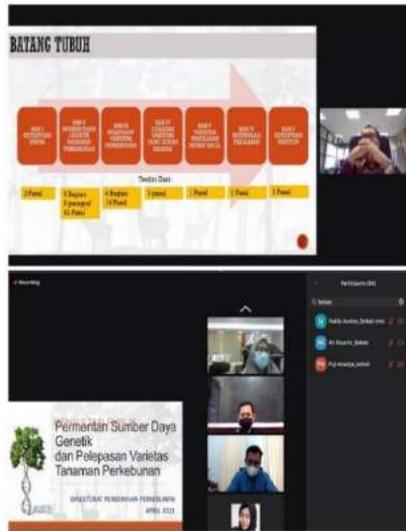
Rapat Pengharmonisan RPermentan tentang Pembenihan Perkebunan, 14 April 2021, Avenzel Hotel



Rapat Harmonisasi RPermentan tentang Pedoman Praktik Hortikultura yang Baik



Pengharmonisan RPermentan tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum, 13 April 2021, Avenzel Hotel



Konsultasi Publik RPermentan tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan, 23 April 2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.149/Seskab/ Ekon/4/2021, tanggal 26 April 2021 dan Surat Sekretaris Kabinet Nomor Nomor B.163/Seskab/ Ekon/05/2021, tanggal 7 Mei 2021

Untuk Bidang Riset dan Teknologi, Sekretariat Kabinet telah terlibat dalam mengawal proses penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran, dan telah memproses persetujuan Presiden atas substansi Peraturan dimaksud dengan mengeluarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.116/Seskab/ Ekon/04/2021, tanggal 12 April 2021. Lebih lanjut, pada tanggal 31 Mei 2021 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.



Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk via Zoom, 5 Maret 2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.116/Seskab/Ekon/04/2021, tanggal 12 April 2021.

**6. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas PMK No.9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19**

Menteri Keuangan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat nomor S-275/MK.3/2021 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sebelumnya, Menteri Keuangan juga pernah mengajukan Persetujuan Presiden atas PMK mengenai Perubahan Pertama insentif perpajakan Nomor 9/2021. Presiden telah memberikan persetujuan atas RPMK dimaksud.

RPMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha.

Perubahan kedua mencakup sektor eligible untuk jenis insentif Pengurangan PPh Pasal 25, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan Restitusi PPN dipercepat. Selain itu, RPMK dimaksud juga mencakup elaksasi penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif Pengurangan PPh Pasal 25 untuk Masa Oktober 2021 paling lambat 15 November 2021, serta perpanjangan jangka waktu pembetulan laporan realisasi PPh DTP Masa Pajak Jan-Jun 2021 paling lambat 30 November 2021.

Sehubungan dengan permohonan dimaksud dan berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut atas materi substansi RPMK, Sekretaris Kabinet berpendapat kiranya Presiden dapat menyetujui penetapan RPMK sebagaimana terlampir dengan pokok pertimbangan:

- a. RPMK memuat pengaturan mengenai penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dengan tujuan untuk memperluas dukungan kepada Wajib Pajak (WP) pada sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- b. Pokok substansi penyesuaian antara lain: (1) penambahan sektor penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dari sebelumnya mencakup 132 kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menjadi 397 kode KLU; (2) penambahan sektor penerima insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari sebelumnya berjumlah 216 kodel KLU menjadi 481 kode KLU, dan dapat dimanfaatkan sejak Masa Pajak Oktober 2021 dengan penyampaian pemberitahuan paling lambat 15 November 2021; (3) penambahan sektor penerima insentif

pengembalian pendahuluan PPN lebih bayar dari sebelumnya berjumlah 132 kode KLU menjadi 229 kode KLU, dan dapat dimanfaatkan untuk Masa Pajak Oktober 2021 s.d. Masa Pajak Desember 2021 serta disampaikan paling lambat 31 Januari 2022; dan (4) pembetulan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh Final DTP, dan PPh Final DTP atas penghasilan WP Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk Masa Pajak Januari 2021 s.d. Juni 2021 disampaikan paling lambat 30 November 2021 (sebelumnya 31 Oktober 2021).

Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPKM tersebut, dengan pokok pertimbangan diatas dan disampaikan melalui **surat Sekretaris Kabinet Nomor B.360/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, **Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 149/PMK.03/2021** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021.

## **7. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi luran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar Sekretariat Kabinet dapat memproses lebih lanjut sebelum ditetapkan. Kedua RPermenaker tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Sekretariat Kabinet secara aktif melaksanakan pembahasan dan pengharmonisasian atas substansi pengaturan dalam kedua rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, dimana apabila tidak ada lagi permasalahan secara substantif atas peraturan menteri tersebut, Sekretaris Kabinet akan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Presiden atas Peraturan Menteri tersebut agar bisa ditetapkan dan diundangkan.

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi luran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2021 menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021.

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 April 2021

Kepada Yth.  
Menteri Ketenagakerjaan

di  
Jakarta

Amor : B.0151/Seskab/Ekon/04/2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menyebutkan surat dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.135/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Rancangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu kiranya, agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sebab itu, saya, Menteri Ketenagakerjaan, dengan ini menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Ditandatangani, atas perintah dan tugas saya sebagai Sekretaris Kabinet.



Tembusan Yth. :  
1. Presiden, sebagai laporan;  
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan  
3. Menteri Hukum dan HAM.

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juli 2021

Kepada Yth.  
Menteri Ketenagakerjaan

di  
Jakarta

Honor : B.0151/Seskab/Ekon/07/2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan, Peneritaan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sehubungan dengan surat Menteri kepada Presiden perihal permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (RPermenaker/Manfaat/KPI), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rencana kebijakan dalam RPermenaker dimaksud dapat disetujui penetapannya menjadi Peraturan Menteri.

Selanjutnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri dimaksud, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth. :  
1. Presiden, sebagai laporan;  
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Menteri Hukum dan HAM,  
4. Menteri Keuangan.

**Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

**8. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang Memerlukan Persetujuan Presiden**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres) didasarkan atas beberapa arahan Presiden pada Rapat Terbatas, Sidang Kabinet dan Sidang Kabinet Paripurna agar semua Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga yang berimplikasi luas, wajib mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Adapun kriteria RPermen/RPerka yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden, yaitu: (1) Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; (2) Bersifat strategis seperti program prioritas, RPJMN, keuangan negara; dan (3) Muatan peraturan yang mengatur lintas sektor maupun lintas kementerian/lembaga.

Lebih lanjut, sehubungan dengan surat Kepala Badan Standardisasi Nasional kepada Presiden Nomor 235/BSN/A0-b2/11/2021 tanggal 26 November 2021, terkait permohonan persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (RPBSN), sebagai berikut:

- 1) RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 24 Tahun 2021);
- 2) RPBSN tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2021);
- 3) RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kart dan Plastik (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 26 Tahun 2021); dan
- 4) RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 27 Tahun 2021).

Sekretariat Kabinet secara aktif melaksanakan pembahasan dan pengharmonisasian atas substansi pengaturan rancangan peraturan tersebut, dimana apabila tidak ada lagi permasalahan secara substantif atas peraturan tersebut, Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Presiden atas Peraturan tersebut agar bisa ditetapkan dan diundangkan (Surat Nomor: B.441/Seskab/Ekon/11/2021, tanggal 27 November 2021).



**Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang Memerlukan Persetujuan Presiden**

**9. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga**

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerima 43 (empat puluh tiga) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, permohonan persetujuan tersebut diproses berdasarkan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

#### **A. Bidang Koperasi dan UMKM**

- 1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
  - a. Nomor 17/M.KUKM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
  - b. Nomor 43/M.KUKM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021; dan
  - c. Nomor 78/M.KUKM/HK.01.00/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor PH.2.1.-119/M.EKON/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.
- 3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
  - a. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
    - (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
    - (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
    - (3) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak;
    - (4) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan

- (5) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
  - (1) B.78/Seskab/Ekon/03/2021 tanggal 17 Maret 2021;
  - (2) B.180/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 21 Mei 2021;
  - (3) B.335/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021; dan
  - (4) B.178/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 20 Mei 2021.
- c. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
  - (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak;
  - (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
  - (5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

## **B. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik**

- 1) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat nomor S-46/MK.1/2021 tanggal 5 Maret 2021.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Daftar Proyek Strategis Nasional untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat nomor PH.2.1-219/MEKON/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
- 3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
    - (1) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan, Kepabeanaan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- (2) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
  - (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.
- b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.103/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021;
  - (2) B.154/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 28 April 2021; dan
  - (3) B.298/Seskab/Ekon/09/2021 tanggal 8 September 2021.
- c. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
- (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
  - (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
  - (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

### **C. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang**

- 1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 23 (dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
  - a. Nomor HK.02.01/324/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
  - b. Nomor HK.02.01/591/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
  - c. Nomor HK.02.01/592/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
  - d. Nomor HK.02.01/1554/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021;
  - e. Nomor HK.02.01/1575/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021; dan
  - f. Nomor HK.02.01/1585-100/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
- 2) Kepala Badan Informasi Geospasial (Kepala BIG) menyampaikan permohonan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPerBIG) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor B-8.11/KA-BIG/HK.01.02/4/2021 tanggal 8 April 2021.
- 3) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (RPMK) dengan surat nomor S-290/MK.2/2021 tanggal 4 November 2021.
- 4) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas perubahan rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dengan surat nomor IPW-131/M.EKON/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.
- 5) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 35 (tiga puluh lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat

Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN) telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu:
  - (1) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - (2) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - (3) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;
  - (4) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
  - (5) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  - (6) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
  - (7) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
  - (8) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - (9) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang;
  - (10) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
  - (11) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  - (12) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
  - (13) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
  - (14) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
  - (15) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
  - (16) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Tertentu.
- b. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
  - (1) B.164/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 7 Mei 2021;
  - (2) B.220/Seskab/Ekon/06/2021 tanggal 22 Juni 2021;
  - (3) B.351/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021; dan

- (4) B.400/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 9 November 2021.
- c. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 10 (sepuluh) RPerBIG tersebut, berdasarkan surat Kepala BIG nomor B-5.7/KA-BIG/HK.01.02/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 pada intinya terdapat beberapa materi muatan RPerBIG yang digabungkan, yang semula 10 (sepuluh) RPerBIG menjadi 7 (tujuh) RPerBIG
- d. 7 (tujuh) RPerBIG telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Kepala BIG, yaitu
- (1) RPerBIG tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
  - (2) RPerBIG tentang Pengusulan penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
  - (3) RPerBIG tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri;
  - (4) RPerBIG tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
  - (5) RPerBIG tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
  - (6) RPerBIG tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Geospasial;
  - (7) RPerBIG tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- e. Dari 7 (tujuh) RPerBIG tersebut, terdapat 1 (satu) RPerBIG yang diproses oleh Keasdepan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yakni RPerBIG tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
- f. Persetujuan Presiden atas RPerBIG tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.165/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 7 Mei 2021;
  - (2) B.189/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 28 Mei 2021; dan
  - (3) B.265/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
- g. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas RPerBIG, pada prinsipnya RPerBIG tersebut telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.03-1929 tanggal 2 November 2021. Selanjutnya, RPerBIG dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Persetujuan Presiden tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.411/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 15 November 2021.
- h. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas perubahan rencana aksi Kebijakan Satu Peta tersebut, perlu kami sampaikan pula bahwa sebelumnya Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta diatur dalam Peraturan Presiden, namun demikian Sekretariat Kabinet merekomendasikan perubahan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pada dasarnya, perubahan rencana aksi Kebijakan Satu Peta telah disepakati pada rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 7 Mei 2021 dan perubahan tersebut sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas

yang membahas Kebijakan Satu Peta, selanjutnya Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.205/Seskab/Ekon/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 memberikan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

- j. 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
- (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - (3) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 Tata Cara Penertiban Dan Pendaaygunaan Kawasan Dan Tanah Telantar;
  - (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
  - (5) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  - (6) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
  - (7) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
  - (8) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  - (10) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Caca Penetapan Tanah Musnah;
  - (11) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
  - (12) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - (13) PerBIG Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
  - (14) PerBIG Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional;
  - (15) PerBIG Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Di Luar Negeri;
  - (16) PerBIG Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
  - (14) PerBIG Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi Di Bidang Informasi Geospasial;

- (15) PerBIG Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial;
  - (16) PerBIG Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan
  - (17) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- k. 6 (enam) RPermen ATR/Kepala BPN belum dapat diberikan persetujuan Presiden dengan pertimbangan RPermen ATR/Kepala BPN tersebut masih dalam proses pembahasan internal di Kementerian ATR/BPN atau sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - l. RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita substansinya telah dimuat dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

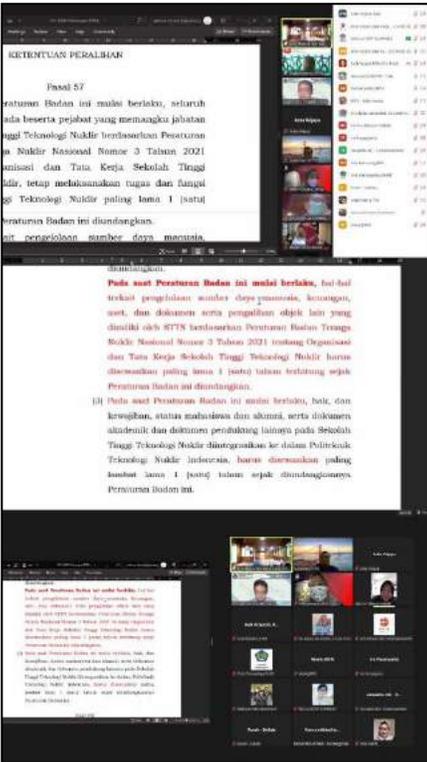
#### **10. Pengawasan Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia (RPerBRIN). Perubahan STTN menjadi Poltek Nuklir tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (surat Menteri Dikbud Nomor 3752/D/OT/2020 tanggal 30 Desember 2020) dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (surat Menteri PANRB Nomor B/642/M.KT.01/2021 tanggal 29 Juni 2021).

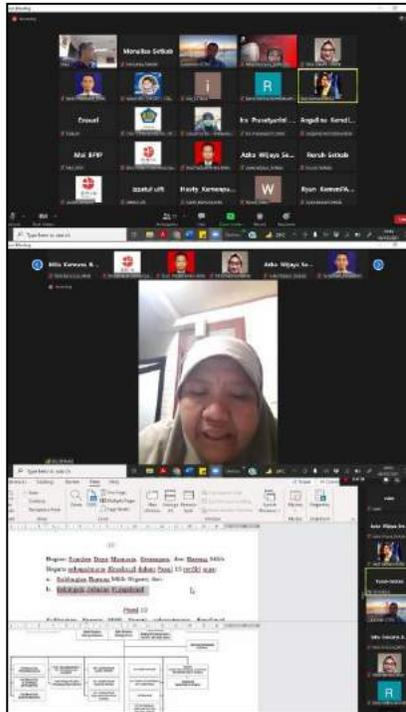
Muatan materi yang diatur dalam RPerBRIN meliputi: (i) kedudukan, tugas, dan fungsi Poltek Nuklir; (ii) susunan organisasi Poltek Nuklir; (iii) kelompok jabatan fungsional pada Poltek Nuklir; (iv) tata kerja organisasi Poltek Nuklir; dan (v) jabatan, pengangkatan, pemberhentian pejabat dalam organisasi Poltek Nuklir.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam penyusunan RPerBRIN dimaksud, khususnya pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (tanggal 30 September 2021 dan 8 Oktober 2021). Beberapa masukan yang kami sampaikan untuk penyempurnaan RPerBRIN, antara lain perubahan fungsi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat agar tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan koordinasi, penghapusan rincian program studi untuk memberikan fleksibilitas pengaturan kepada Poltek Nuklir, serta penyempurnaan bagan struktur organisasi Poltek Nuklir pada Lampiran RPerBRIN terkait Kelompok Jabatan Fungsional Bagian SDM, Keuangan, dan Barang Milik Negara. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan bahwa RPerBRIN perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena dinilai memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres No. 68/2021). Dalam hal ini, kegiatan Poltek Nuklir terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Selain itu, pengembangan dan pembinaan Poltek Nuklir bersifat lintas sektor dengan melibatkan peran BRIN, Kemendikbudristek, dan KemenPANRB.

Sehubungan hal tersebut, Kepala BRIN melalui surat Nomor B-281/HK.01.01/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPerBRIN kepada Sekretaris Kabinet dengan menyertakan naskah penjelasan urgensi dan surat keterangan selesai harmonisasi dari Kemenkumham sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 68/2021. Atas permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden atas RPerBRIN melalui surat Nomor B-0359/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya, Kepala BRIN melakukan penetapan RPerBRIN menjadi Peraturan BRIN Nomor 13 Tahun 2021 pada tanggal 28 Oktober 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210), dan peresmian status Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2021.



Rapat Harmonisasi RPerBRIN OTK Poltek Nuklir tanggal 30 September 2021



Rapat Harmonisasi RPerBRIN tentang OTK Poltek Nuklir tanggal 8 Oktober 2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0359/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021

IKK 3 (Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

**1. Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan untuk memenuhi pendanaan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara**

Bupati Tapanuli Utara kepada Presiden menyampaikan permohonan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan untuk memenuhi pendanaan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara, didasarkan pada pertimbangan: (a) alokasi DAU Kab. Taput TA 2021 sebesar Rp 617.410.172.000 atau berkurang Rp42.467.139.00 (-6,44%) dibandingkan DAU TA 2019; dan (b) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KM.7/2020 mengenai Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) DAU atau Dana Bagi Hasil dalam rangka dukungan pendanaan Program Vaksinasi COVID-19 (Kepmenkeu 30/2020), Kab. Taput diminta untuk melakukan *earmarking* sebesar 4% dari alokasi DAU TA 2021 atau sebesar Rp 24.696.406.880 untuk dukungan pendanaan program vaksinasi COVID-19.

Berkaitan dengan permasalahan pendanaan APBD untuk mendukung penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 14 Desember 2020 mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memberikan arahan *agar seluruh K/L dan daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk melakukan realokasi anggaran guna mendukung pendanaan program vaksinasi tahun 2021.*

Berdasarkan arahan tersebut dan sesuai dengan hasil kajian secara mendalam atas substansi permohonan, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden:

- a. Permohonan Bupati Taput belum menjadi prioritas untuk dipenuhi dengan pertimbangan penetapan DAU telah didasarkan pada perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan *earmarking* merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden. Pemberian tambahan DAU TA 2021 kepada Kab. Taput juga dikhawatirkan dapat menyebabkan daerah lain mengajukan permintaan tambahan DAU
- b. Kekurangan pendanaan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dapat dipenuhi dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta *refocussing* dan realokasi anggaran pada program dan kegiatan prioritas untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

**2. Penyelesaian Permasalahan Impor Ammonium Nitrate (NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>) PT. Aneka Gas Industri Tbk.**

Direktur PT. Aneka Gas Industri, Tbk. (PT. AGI) kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan surat permohonan penyelesaian pemanfaatan Ammonium Nitrate (NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>) sebagai bahan baku produksi gas nitrous oxide (N<sub>2</sub>O) untuk keperluan rumah sakit di Indonesia.

Inti permasalahan yaitu NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> yang diimpor oleh PT. AGI tiba di daerah pabean Indonesia pada saat Persetujuan Impor (PI) dan Importir Terdaftar (IT) yang dimiliki oleh PT AGI telah habis masa berlakunya (dalam proses perpanjangan). Dalam hal ini PT. AGI telah melakukan proses perpanjangan Persetujuan Impor dan Importir Terdaftar sebelum NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> memasuki wilayah pabean Indonesia, namun terkendala oleh proses pengurusan perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di Kementerian Pertahanan, akibat dampak pandemi Covid-19.

Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, PT. AGI selaku importir wajib

mengekspor kembali (reeksport)  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  ke negara lain. PT. AGI telah berupaya melakukan reeksport sesuai keputusan Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terkendala faktor sebagai berikut:

- 1) Sulitnya menemukan negara tujuan reeksport (*rejection* dari beberapa negara (Jerman, Singapura, dan Malaysia));
- 2) Sifat  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  yang berbahaya dan mudah meledak; dan
- 3) Penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan kualitas dari  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (maksimal 2 tahun).

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan penyelesaian permasalahan PT. AGI yang dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 1 Februari 2021. Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.49/Seskab/Ekon/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang intinya agar Menteri Perdagangan dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (pelaksanaan dari UU Cipta Kerja).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan menerbitkan surat kepada Direktur PT AGI dengan Nomor M.247/M.DAG/SD/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberian Izin Pengeluaran Barang Impor Ammonium Nitrate yang intinya PT. AGI diberikan izin pengeluaran Ammonium Nitrate sebanyak 66 (enam puluh enam) ton dengan menggunakan persetujuan impor bahan peledak Nomor.04.PI-27.20.0009 tanggal 21 April 2020 dan Bill Landing Nomor 910151534 tanggal 17 Februari 2020.



**Surat Sekretaris Kabinet mengenai Penyelesaian Permasalahan Impor Ammonium Nitrate (NH4NO3) PT. Aneka Gas Industri Tbk.**

### 3. Sertipikat Elektronik

Penerbitan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya pengaturan mengenai penggantian sertipikat menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar dan penarikan sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 16 ayat (3) Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021.

Sekretariat Kabinet melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0059/Seskab/Ekon/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 menyampaikan rekomendasi agar Kementerian ATR segera memberikan sosialisasi untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat, antara lain:

1. Menyampaikan bahwa urgensi penerbitan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021, antara lain agar pendaftaran tanah dapat dilakukan secara efisien, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan, dan menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB);
2. Penerbitan sertipikat tanah elektronik diutamakan untuk pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar. Sedangkan, penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar pada prinsipnya bukanlah menjadi kewajiban pemegang sertipikat, melainkan dilakukan secara sukarela oleh pemegang sertipikat;
3. Masyarakat tetap dapat menyimpan buku sertipikat walaupun telah dialihmediakan menjadi bentuk digital; dan
4. Kesiapan infrastruktur atau keamanan sistem dan data dalam proses penyediaan sertipikat elektronik tersebut.

Selain itu dalam surat juga disampaikan bahwa ke depan, Menteri ATR sebelum menetapkan peraturan menteri yang bersifat strategis, lintas Kementerian/Lembaga, dan/atau berdampak luas kepada masyarakat, dapat melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan.

### 4. Penyelesaian permasalahan (*debottlenecking*) atas implementasi tindak lanjut arahan Presiden untuk pembangunan *nursery* tanaman perkebunan

Presiden dalam Rapat Intern tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020 memberikan arahan kepada Menteri Pertanian untuk dapat menyiapkan kebun pembibitan (*nursery*) sebanyak 3-5 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk 3 (tiga) komoditas yang disetujui yaitu kelapa, jambu mete, dan kopi.

Untuk memastikan bahwa arahan Presiden tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya maka Sekretariat Kabinet telah melaksanakan rangkaian kegiatan berupa rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kunjungan ke lokasi *nursery* di daerah. Kunjungan ke daerah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Cianjur Jawa Barat untuk *nursery* kopi, Lampung untuk *nursery* kelapa, dan Bombana Sulawesi Selatan untuk *nursery* jambu mete. Kegiatan pemantauan dimaksud dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan ke daerah diperoleh rekomendasi bahwa untuk dapat melaksanakan arahan Presiden dimaksud maka:

1. Kemenko Bidang Perekonomian untuk dapat segera mengoordinasikan penyiapan dokumen *masterplan*, *roadmap*, serta *quickwins* untuk pembangunan *nursery* perkebunan s.d tahun 2024;
2. pembangunan *nursery* tersebut untuk tetap fokus pada 3 komoditas yakni kopi, kelapa, dan jambu mete sebagaimana arahan Presiden dalam Rapin, dengan lokasi yang dapat mendukung program penyiapan benih hingga *replanting (end to end)*;
3. Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelaraskan perencanaan dan anggaran pembangunan nursery tanaman perkebunan dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tiap tahun anggaran
4. Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya untuk memastikan perencanaan program dan kegiatan di daerah, agar sejalan dengan program kebijakan nasional.

Rekomendasi tersebut telah Sekretariat Kabinet sampaikan kepada K/L terkait untuk dapat ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0200/Seskab/Ekon/06/2021, tanggal 7 Juni 2021.



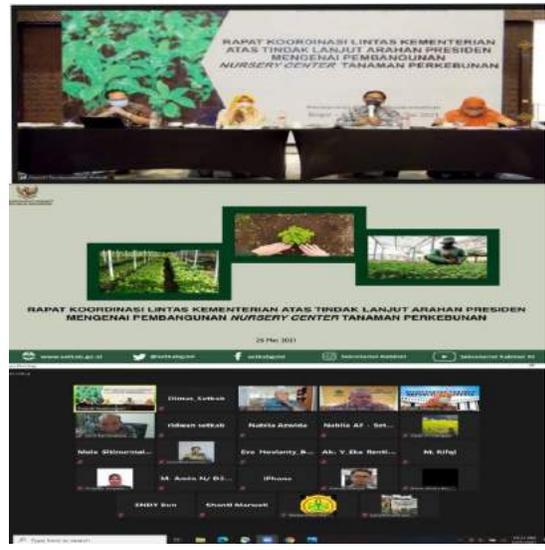
Rakor Penyiapan Kegiatan Bersama atas TL Arahan Presiden mengenai Kebun Pembibitan, Kamis 28 Januari 2021



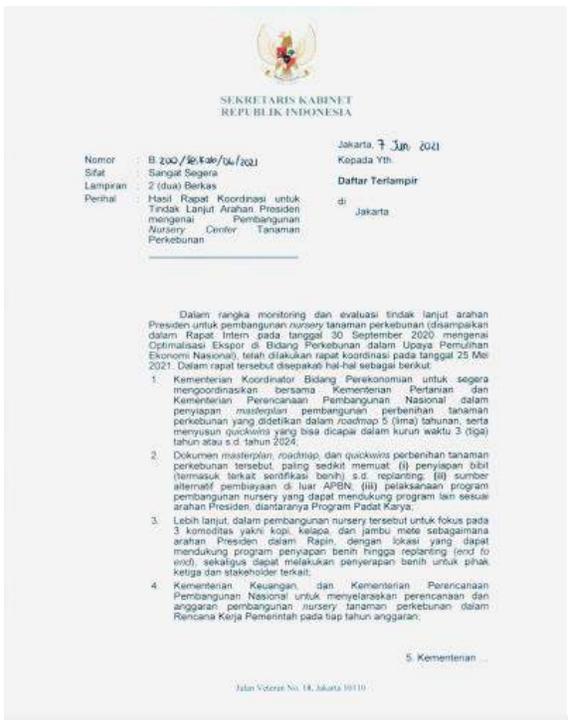
Pemantauan Bersama ke Lokasi Kebun Pembibitan/Nursery di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis 4 Maret 2021



Rapat Koordinasi Pemantauan Arahan Presiden mengenai Kebun Sumber Bibit dan Nursery Komoditas Perkebunan, Jumat 26 Maret 2021 di Rumah Jabatan Bupati Bombana



Rakor Lintas Kementerian Atas Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pembangunan Nursery Center Tanaman Perkebunan, Novotel Bogor, 25 Mei 2021



Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0200/Seskab/Ekon/06/2021, tanggal 7 Juni 2021.



## 5. Permasalahan Ketersediaan Anggaran dalam Pelaksanaan Sertifikat Halal Gratis untuk UMKM sebagai Pelaksanaan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021

Menindaklanjuti arahan Presiden agar dilakukan akselerasi pemberian sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam rapat dimaksud, memperhatikan pendapat dan masukan dari berbagai Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga terkait melalui surat nomor B.0357/Seskab/Ekon/10/2021 tentang Kesepakatan Rapat Koordinasi Pendanaan Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMK pada tanggal 21 Oktober 2021, yang inti kesepakatannya adalah:

1. Kemenko Perekonomian agar mengoordinasikan: (1) penyederhanaan prosedur permohonan sertifikasi halal melalui mekanisme -self declare, dalam hal ini termasuk memastikan bahwa seluruh kriteria baik berdasarkan risiko maupun kehalalan bahan sesuai positif list BPJPH telah tertanam dalam sistem OSS RBA; dan (2) penyusunan sektor UMK yang diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.
2. Kementerian Koperasi dan UKM agar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki program/kegiatan berkaitan dengan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pelaku UMK, untuk mensinergikan kegiatan pendampingan penerbitan sertifikat halal sebagai bagian dalam program/kegiatan pembinaan dan pelatihan pelaku UMK yang diprioritaskan.
3. Kementerian Dalam Negeri agar mengoordinasikan seluruh Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada program pelatihan dan pendampingan UMK di Daerah, dengan prioritas kegiatan pada pendampingan penerapan izin tunggal bagi UMK, khususnya pendampingan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, bersama Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Keuangan, agar menyusun pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pendampingan UMK dimaksud.
4. Kementerian Investasi/Kepala BKPM agar mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan sistem penerbitan sertifikat halal pada BPJPH, serta mengakomodir seluruh kriteria (positif list Bahan Baku dan Pendukung Halal) yang ditetapkan BPJPH ke dalam sistem OSS RBA sebagai tapisan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare.
5. BPJPH agar menyusun Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk menghitung besaran biaya penerbitan sertifikat halal secara self declare, untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan penetapan alokasi anggaran sertifikat halal ke depan

Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, Kepala BPJPH dengan surat nomor S-7820/BD.II/Set.BD.II/KU.00/11/2020 tanggal 24 November 2021 menyampaikan surat balasan, yang intinya :

1. BPJPH telah mengusulkan rancangan Naskah Akademik Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) kepada Menteri Agama yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
2. BPJPH juga sedang melakukan finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Jenis Bahan Tidak Kritis dalam Proses Produk Halal yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Rincian bahan tidak kritis dalam RKMA tersebut akan digunakan sebagai referensi pada OSS untuk menentukan resiko pelaku usaha.



Jakarta, 13 September 2021  
Kepada Yth:

Nomor : B.0304/Seskab/Ekon/09/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Kesepakatan Hasil Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

di Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA yang telah direvisi Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 7 September 2021 yang dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Investasi/BKPM, dan diputuskan:

- Seluruh pelayanan perizinan berusaha tetap diterbitkan melalui OSS RBA. K/L/D tidak dapat menerbitkan perizinan berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana sebelum beroperasinya sistem OSS RBA.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoptimalkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi penyelenggaraan OSS RBA guna kesesuaiannya dengan sistem OSS RBA. Evaluasi regulasi diprioritaskan pada regulasi yang mengatur KBLU prioritas.
- Kementerian Investasi/BKPM, agar:
  - memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku usaha, K/L penyelenggara perizinan, dan DPMPSTP Daerah mengenai OSS RBA, dan prosedur pelayanan perizinan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan penekanan pada kemudahan perizinan di sektor UMK khususnya pembertarikan perizinan tunggal bagi UMK;
  - menyalskan proses pengintegrasian sistem OSS RBA dengan sistem K/L, serta memastikan seluruh proses perizinan dapat berjalan dan tidak terhenti selama proses pengintegrasian berlangsung;
  - menyalskan daftar KBLU prioritas, yaitu KBLU yang memiliki nilai investasi besar dan paling banyak dimiliki pelaku usaha, sebagai dasar evaluasi regulasi OSS RBA oleh Kemenko Bidang Perekonomian; dan
  - memberikan hak akses khusus pada sistem OSS RBA kepada Sekretariat Kabinet dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi atas implementasi OSS RBA secara keseluruhan baik dari sisi regulasi dan penerapan sistemnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri dapat segera menindaklanjuti hasil rapat evaluasi tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
Presiden, sebagai laporan.

B.0357/Seskab/Ekon/10/2021  
tentang Kesepakatan Rapat  
Koordinasi Pendanaan Sertifikasi  
Halal untuk Pelaku UMK pada  
tanggal 21 Oktober 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
Alamat: Jl. Raya Pondok Gede, Pwnganti Nomor 13 Bekasi, Kota Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13660, Indonesia Telp. 021 80877855

Nomor : S-7720/BD.II/Set.BD.IIKU.00/11/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi

Yth. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia  
di Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Kabinet Nomor: B.0357/Seskab/Ekon/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021, hal Kesepakatan Rapat Koordinasi Pendanaan Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, khususnya pada point (d) dan (e) pada surat tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Salah satu point putusan rapat koordinasi pada tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, bahwa BPJPH agar menyusun Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) untuk menghitung besaran biaya penerbitan sertifikat halal secara *self-declare*. Namun demikian, berdasarkan hasil rapat dengan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama pada tanggal 25 Oktober 2021 disarankan untuk mengusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) kepada Bapak Menteri Agama, yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- Biaya sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil melalui skema *self-declare* sebesar Rp.200.000,- tidak termasuk biaya operasional penyelenggaraan sidang fatwa, dengan rincian sebagai berikut:
  - Biaya pendaftaran sertifikasi halal sebesar Rp.25.000,-
  - Insentif untuk Pendamping PPH sebesar Rp.150.000,-
  - Biaya supervisi dan monitoring untuk Lembaga Pendamping PPH sebesar Rp.25.000,-
 Adapun biaya operasional penyelenggaraan sidang fatwa, diusulkan dengan pembiayaan operasional per tahun sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk 34 komisi fatwa MUI Provinsi dan satu komisi fatwa MUI Pusat, dengan target 10 juta UMK.
- Saat ini, BPJPH tengah melakukan finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Jenis Bahan Tidak Kritis dalam Proses Produk Halal yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Rincian bahan tidak kritis dalam RKMA ini akan digunakan sebagai referensi pada OSS untuk menentukan resiko dari pelaku usaha. RKMA ini diharapkan akan selesai dibahas pada bulan Desember 2021 dan disampaikan ke Biro Hukum Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut pengesahannya. RKMA yang disahkan sebagai KMA nantinya akan diadaptasi pada sistem OSS RBA sebagai panduan terkait jenis-jenis bahan yg digunakan dalam proses produk halal, yang selanjutnya akan di tindaklanjuti pada sistem layanan sertifikasi halal di BPJPH.

Demikian, atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:  
1. Yth. Menteri Agama RI  
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagai Dewan Pengawas

Surat Balasan dan Laporan Kepala  
BPJPH dengan nomor S-  
7820/BD.II/Set.BD.II/KU.00/11/2020  
tanggal 24 November 2021

## 6. Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Hilirisasi Ekonomi Digital

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil dan terfokus pada konsumsi. Untuk itu, diperlukan akselerasi pembangunan prasyarat melalui investasi di bidang SDM digital, infrastruktur digital, dan ekosistem inovasi; kerja sama Pemerintah dan dunia usaha melalui kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi hilirisasi ekonomi digital, serta perlunya orkestra kebijakan hilirisasi ekonomi digital untuk membangun ekonomi digital Indonesia yang dapat bersaing secara global.

Sehubungan hal tersebut, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Terbatas tentang Hilirisasi Ekonomi Digital pada tanggal 10 Juni 2021, dimana salah satu arahan tersebut adalah untuk Menyusun *Masterplan* Hilirisasi Ekonomi Digital dan Pembentukan *Project Management Officer* (PMO) untuk menangani Hilirisasi Ekonomi Digital.

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian

Perdagangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0262/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang intinya:

- Pengembangan Ekonomi Digital perlu disusun ke dalam suatu *masterplan* yang berfungsi sebagai *platform* kolaborasi dan koordinasi bagi kementerian/lembaga, dengan menginduk pada *masterplan* transformasi digital saat ini dalam penyusunan di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- Perlu disusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi digital sampai dengan tahun 2030, dengan target jangka pendek (*Quick Win*) 2022-2024;
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera mengoordinasikan penyusunan masterplan ekonomi digital dan pembentukan PMO ekonomi digital sesuai arahan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyusun *Masterplan* Hilirisasi Ekonomi Digital dan pembentukan PMO Ekonomi Digital yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.



Surat Sekretaris Kabinet mengenai Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Arahan Presiden terkait Hilirisasi Ekonomi Digital

## 7. Penyelesaian Kebijakan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping Cold Rolled Coil/Sheet*

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan *executive summary* kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang intinya:

- a. Pada tahun 2012, Pemerintah mengenakan BMAD terhadap produk impor *Cold Rolled Coil/Sheet* (CRC/S) yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. **Kebijakan BMAD dimaksud berakhir pada tahun 2016.**
- b. Sebelum masa berakhir kebijakan BMAD, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merekomendasikan untuk melakukan **perpanjangan pengenaan BMAD (*sunset review*) selama lima tahun.** Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan surat keputusan memperpanjang BMAD untuk impor CRC/S, namun **belum terdapat tindaklanjutnya** karena memerlukan data dukung dari Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Januari 2021, Kementerian Perindustrian menyampaikan surat pertimbangan atas perpanjangan pengenaan BMAD atas impor produk CRC/S yang intinya **menolak perpanjangan pengenaan BMAD.**
- d. PT. Krakatau Steel **memohon kejelasan perpanjangan pengenaan BMAD** produk CRC/S yang saat ini dibutuhkan oleh industri besi dan baja Indonesia.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas urgensi perpanjangan pengenaan BMAD, serta melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan kesimpulan:

- a. Kementerian Perdagangan (Komite Anti Dumping Indonesia) **masih merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMAD** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/2013 jo. PMK 224/2014 tentang Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;
- b. Kementerian Perindustrian menyampaikan **perpanjangan BMAD belum diperlukan** dengan pertimbangan kebutuhan industri yang berbasiskan pada bahan baku CSR/S dan keterjaminan bahan baku baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Pengenaan BMAD terhadap produk impor CRC/S **perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional** antara lain:
  - 1) kebutuhan dan ketersediaan pasokan CRC/S (*supply and demand*) di dalam negeri dengan harga yang bersaing;
  - 2) memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional, namun tetap memperhatikan daya saing dan efisiensi industri baja nasional.

Mengingat masih terdapat ketidaksepakatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Nomor B.285/Seskab/Ekon/08/2021, tanggal 25 Agustus 2021 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang intinya agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Agustus 2021  
Kepada Yth.  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian  
di  
Jakarta

Nomor : Bp28F /Seskab/Ekon/08/2021  
Sifat : Sangat segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyelesaian Kebijakan  
Perpanjangan Pengenaan Bea  
Masuk Anti Dumping Cold Rolled  
Coil/Sheet

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan surat yang intinya memohon penyelesaian dan kejelasan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) impor produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam.

Terhadap perpanjangan pengenaan BMAD impor produk CRC/S tersebut, dapat kami sampaikan:

- 1) Kementerian Perdagangan (Komite Anti Dumping Indonesia) merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/2013 jo. PMK 224/2014 tentang Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk Ganti Lantailan Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;
- 2) Kementerian Perindustrian belum merekomendasikan perpanjangan BMAD dengan pertimbangan keterjaminan bahan baku dan kebutuhan industri pengguna CSR/S baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selanjutnya, mempertimbangkan terdapat ketidaksepakatan mengenai perpanjangan BMAD terhadap produk CRC/S antara Kementerian Perdagangan yang dan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan surat PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dimaksud kepada Menteri untuk kiranya dapat dikoordinasikan penyelesaiannya sesuai peraturan penundang-undangan, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:  
Presiden, sebagai laporan.

Jalan Valerien No.18, Jakarta 10110

Surat Sekretaris Kabinet mengenai Penyelesaian Kebijakan  
Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping Cold  
Rolled Coil/Sheet*

## 8. Penyelesaian persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nunukan dan beberapa wilayah di Indonesia serta peran Koperasi selaku penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan

Plh. Ketua Umum Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP-TKBM) kepada Presiden, intinya menyampaikan permohonan penyelesaian persoalan TKBM di Pelabuhan Nunukan dan beberapa wilayah di Indonesia serta peran Koperasi selaku penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan. Permasalahan TKBM ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nunukan yang intinya memohon penyelesaian permasalahan adanya 3 (tiga) koperasi yang melakukan penyediaan jasa TKBM di Pelabuhan Nunukan.

Terhadap persoalan TKBM Pelabuhan Nunukan, Sekretaris Kabinet telah menindaklanjutinya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam perkembangannya Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan serangkaian Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan terakhir disepakati Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengkaji kemungkinan penggabungan Koperasi di Nunukan yang memiliki usaha

TKBM. Selanjutnya, Kemenkop UKM telah meminta tanggapan terhadap penyelesaian permasalahan TKBM di Pelabuhan Nunukan kepada KSOP Pelabuhan Nunukan.

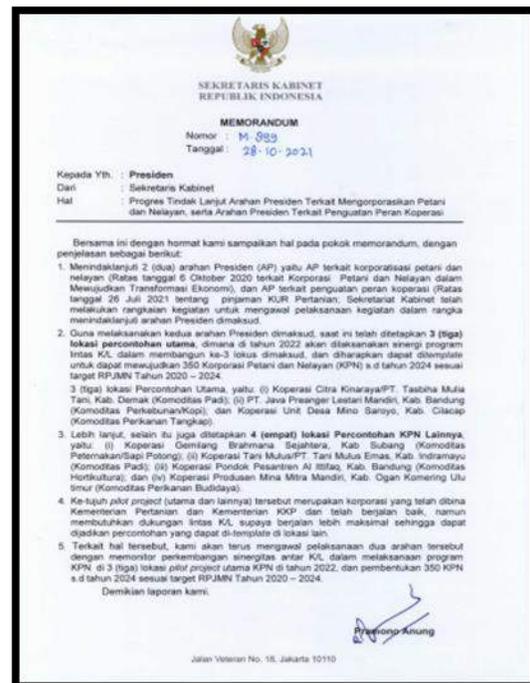
Penyelesaian permasalahan TKBM menjadi salah satu perhatian dalam aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan. Aksi dimaksud merupakan tindak lanjut dari

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dimana salah satu fokusnya terkait dengan perizinan dan tata niaga.

Dalam rangka pembinaan dan perlindungan koperasi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, persoalan terkait Koperasi TKBM dimaksud telah diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku pembina dari seluruh Koperasi di Indonesia.



Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



## 9. Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 30 September 2020 kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk: (i) menyiapkan kebun pembibitan (*nursery*) sebanyak 3-5 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk komoditas kelapa, jambu mete, dan kopi; dan (ii) menyiapkan kebun pembibitan untuk komoditas kelapa genjah pada tahun 2021 di Pulau Jawa dengan 1 (satu) juta bibit kelapa dan di luar Pulau Jawa dengan 2 (dua) juta bibit kelapa, dan (iii) Presiden berkenan berkunjung ke lokasi kebun pembibitan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan pengawalan tindak lanjut arahan Presiden tersebut sejak Semester 1 tahun 2021 (yang telah tertuang dalam laporan LKJ Sekretariat Kabinet Tahun Semester 1 Tahun 2021) yang berlanjut hingga Semester 2 Tahun 2021, melalui serangkaian kegiatan pembahasan, monitoring, dan evaluasi bersama dengan *stakeholder* terkait meliputi, rapat-rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan berbagai mitra pembangunan; serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi kebun *nursery* dan balai penelitian pembibitan tanaman perkebunan kopi, kelapa, dan jambu mete:

- a. Telah dilakukan pertemuan antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan pihak swasta pada tanggal 02 Juli 2021, yang intinya membahas kemungkinan kerja sama Pemerintah-Swasta (PT. SMART), terkait dukungan embal kultur jaringan untuk pembangunan nursery. Hasil pertemuan bahwa, pihak swasta terbuka dan menyambut baik kemungkinan kerja sama tersebut.
- b. Menghadiri Rakor tindak lanjut arahan Presiden mengenai pembangunan nursery tanaman perkebunan pada tanggal 08 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, dan melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Sekretariat Kabinet, guna melanjutkan pembahasan TL arahan Presiden, terutama terkait penyiapan data dukung bagi alokasi anggaran pembangunan nursery dengan prioritas pada T.A. 2022.
- c. Menghadiri Rakor lanjutan mengenai tindak lanjut arahan Presiden mengenai nursery tanaman perkebunan, dengan agenda utama updating progres penyusunan dokumen masterplan, roadmap, dan quickwins pada tanggal 04 Oktober 2021 yang diselenggarakan Kemenko Bidang Perekonomian.
- d. Melakukan pemantauan/kunjungan bersama Kemenko Bidang Perekonomian ke instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (IP2TP), Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20-22 Oktober 2021, dengan tujuan data collecting mengenai: (i) data dan informasi terkait kebutuhan pembangunan nursery, terutama komoditas jambu mete; serta (ii) mengidentifikasi masalah yang masih dijumpai dalam pengelolaan nursery jambu mete, maupun hal lainnya.



Peninjauan Lapangan ke Kebun Entres Jambu Mete di Balai Penelitian Tanaman Rempah & Obat Cikampek Jawa Barat, 20-22 Oktober 2021

Pada Semester II tahun 2021 Sekretariat Kabinet telah melaporkan capaian tindak lanjut arahan Presiden ini sepanjang tahun 2021, melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1108/Seskab/12/2021 pada tanggal 23 Desember 2021. Inti laporan tersebut adalah bahwa arahan Presiden tersebut telah dilaksanakan oleh K/L terkait dengan pengawasan dari Sekretariat Kabinet, dengan beberapa modifikasi implementasi. Hal ini mengingat adanya kekhususan karakteristik dari usaha perbenihan, antara lain telah banyak pelaku penangkar benih UMK sehingga apabila pemerintah mengambil alih memonopoli penyediaan benih dalam skala besar akan berdampak pada pelaku UMK yang telah ada. Laporan lengkap progress tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, sebagaimana gambar terlampir.



Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut pada pokok memorandum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Merindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 30 September 2020 kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk: (i) menyiapkan kebun pembibitan (nursery) sebanyak 2-3 lokasi dengan jumlah 10-20 juta bibit per lokasi, untuk komoditas kelapa, jambu mete, dan kopi; dan (ii) menyiapkan kebun pembibitan untuk komoditas kelapa genjah pada tahun 2021 di: (i) Pulau Jawa dengan 1 (satu) juta bibit kelapa; (ii) di luar Pulau Jawa dengan 2 (dua) juta bibit kelapa; dan (iii) Presiden berkeinginan berkunjung ke lokasi kebun pembibitan dimaksud.
  - Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan pengawasan tindak lanjut arahan Presiden tersebut melalui serangkaian kegiatan pembahasan, monitoring, dan evaluasi bersama dengan stakeholder terkait meliputi: rapat-rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait; serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi kebun nursery dan balai penelaian pembibitan tanaman perkebunan kopi, kelapa, dan jambu mete.
- Dalam pelaksanaan arahan, Presiden mengenai nursery tanaman perkebunan tersebut, menemui beberapa kendala, yaitu:
  - Identifikasi perbedaan karakteristik usaha perbenihan komoditas pertanian dengan usaha perbenihan tanaman kehutanan yang dijadikan rujukan contoh oleh Presiden, yaitu: (i) bibit komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dengan intensitas perputaran biaya yang cukup di atasnya dibandingkan dengan usaha pembibitan tanaman kehutanan; dan (ii) telah banyak pelaku usaha skala Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terlibat pada usaha perbenihan komoditas pertanian, sehingga apabila Pemerintah melakukan penyediaan benih/bibit melalui pembangunan nursery dalam skala besar, maka dikhawatirkan akan mematikan mata pencaharian UMK tersebut.
  - keterbatasan penyediaan lahan strategis (dekat dengan lokasi kebun sumber benih dan lokasi lahan tanam) serta luasan yang mencukupi, sebagai contoh untuk target 1 juta batang bibit/bibit kelapa, maka diperlukan lahan seluas 25-30 ha;
  - masalah inefisiensi logistik pembangunan nursery center untuk satu komoditas tertentu di satu lokasi, dibandingkan dengan kondisi tersebutnya lokasi kebun sumber benih dan lokasi kawasan tanam di seluruh wilayah Indonesia, maka akan menyebabkan: (i) mahalnya unit cost; (ii) meningkatnya potensi kerusakan benih/bibit, terkait proses mendatangkan benih dari kebun sumber dan distribusi bibit siap sauk ke lokasi kawasan tanam; dan

4) distorsi kontinuitas pendanaan akibat kebijakan refocusing anggaran yang berpotensi menghambat program pengembangan nursery.

- Untuk memastikan arahan Presiden tetap berjalan baik dengan memperhatikan mitigasi kendala di atas, maka telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - Penyesuaian implementasi penyediaan bibit dengan skema nursery center (penyediaan bibit yang berasal dari kebun bibit milik Pemerintah dengan mekanisme swaselola) dan nursery branch (penyediaan bibit dari kebun bibit penangkar milik UMK dengan mekanisme sub kontrak), untuk mencapai target penyediaan bibit unggul yang memadai, terjangkau harga dan skala logistik yang mudah, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha UMK penangkar bibit lokal.
  - Penyusunan dokumen perencanaan penyediaan bibit nasional baik jangka panjang (masterplan) di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas) maupun jangka pendek (roadmap dan quickwin) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian). Posisi capaian progres penyusunan untuk dokumen roadmap dan quickwin pembangunan nursery perkebunan Tahun 2022-2024, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan akhir dengan penajaman pada alternatif sumber pembiayaan di luar APBN. Sedangkan untuk dokumen masterplan (yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan roadmap dan quickwin) belum dapat disusun pada tahun 2021 disebabkan keterbatasan sumber daya (personil dan anggaran).
  - Kementerian Pertanian berdasarkan draft roadmap dan quickwin pembangunan nursery perkebunan tahun 2022-2024, menargetkan pada tahun 2022 akan merealisasikan penyaluran sebanyak 10 juta bibit untuk ketiga komoditas dimaksud, yang didasarkan pada urutan kebutuhan bibit nasional, jumlah tanaman rusak, ketersediaan kebun sumber benih, dan Calon Pemera dan Calon Lahan (CPCL). Penyediaan bibit dimaksud bersumber dari dana APBN (DIPA Kementerian Pertanian tahun 2022) untuk 2,148 juta batang bibit, sisanya dipayakani akan dipenuhi melalui pendanaan di luar APBN untuk 7,851 juta bibit diantaranya berkumber dari APBD, KUR, dan CSR.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengingat penyediaan bibit unggul yang memadai, mudah dijangkau, dan berkualitas merupakan langkah strategis yang harus ditempuh sebagai upaya peningkatan produktivitas perkebunan yang mendukung optimalisasi dan sustainability ekspor komoditas perkebunan nasional, maka kami telah menyampaikan kepada: (i) Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk dapat memprioritaskan dan segera menyusun dokumen masterplan nursery untuk dapat diadopsi oleh Kementerian Pertanian dalam menyusun kebijakan penyediaan bibit unggul; dan (ii) Menteri Pertanian untuk tetap memprioritaskan tindak lanjut dari arahan Presiden dengan menjaga ketersediaan anggaran untuk memastikan keberhasilan program pengembangan nursery.
- Selanjutnya, kami akan terus mengawal tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, agar berjalan dengan baik.

Demikian laporan kami,

Primo Anung

Memo Laporan Capaian Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain itu, untuk memastikan bahwa tindak lanjut arahan Presiden tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2022, mengingat adanya beberapa *outcome* yang belum tercapai di tahun 2021, maka Sekretaris Kabinet telah menyampaikan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pertanian. Melalui Surat Nomor B. 0487/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, Sekretaris Kabinet menyampaikan beberapa hal yaitu:

1. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dapat memprioritaskan dan segera menyusun dokumen masterplan nursery guna dipedomani oleh Kementerian Pertanian dalam penyusunan kebijakan penyediaan bibit unggul;
2. Menteri Pertanian untuk memprioritaskan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapin dimaksud, dengan mendukung ketersediaan anggaran guna memastikan keberlanjutan program pengembangan nursery.



## 10. Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Korporasi Petani Dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Dalam Ratas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk fokus menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain, serta memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu K/L agar memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.

Sehubungan dengan arahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai tindak lanjut kegiatan yaitu:

- a. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas (25 Februari 2021) yang membahas hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penyiapan regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan;

- 2) Menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain;
- 3) Sinergi Program Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan *corporate culture* untuk petani dan nelayan.

Terkait hal tersebut, rapat menyepakati:

- 1) Mendorong RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan untuk segera ditetapkan di tahun 2021 dan terintegrasi dengan RPerpres tentang *Food Estate* dan Rperpres tentang BCLS.
- 2) Kementerian PPN/Bappenas selaku kementerian pemrakarsa RPerpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait izin prakarsa RPerpres Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dan Kementerian KKP terkait penajaman materi RPerpres Korporasi Nelayan.
- 3) Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan K/L terkait guna pembahasan substansi RPerpres Korporasi Petani dan Nelayan.



- b. Pemantauan (*Site Visit*) ke-3 lokasi korporasi petani, yaitu PT. Java Preanger Lestari Mandiri di Kabupaten Bandung (8-10 April 2021), Koperasi Serba Usaha Citra Kinaraya di Kabupaten Demak (2-4 Juni 2021), dan PT. Tani Mulus Emas di Kabupaten Indramayu (15-17 Juni 2021).

Dari kegiatan pemantauan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan terkait implementasi korporasi petani, yaitu:

- 1) Kepemilikan lahan petani terbatas untuk mencapai skala ekonomi, dimana luasan lahan yang dimiliki petani tidak mencapai skala ekonomi sehingga kesejahteraan petani sulit tercapai.
- 2) Akses permodalan terbatas dikarenakan masih adanya usaha yang *non-bankable*. Pembiayaan melalui kredit pemerintah masih terkendala belum adanya status badan hukum kelembagaan, dan petani/nelayan masih memiliki pinjaman komersial lainnya.
- 3) Belum sinkronnya program/kegiatan antar K/L menyebabkan beberapa K/L melaksanakan program korporasi petani dengan lokus yang berbeda-beda.



Site Visit ke PT. Java Preanger Lestari Mandiri di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (8-10 April 2021)



Site Visit ke Koperasi Serba Usaha Citra Kinaraya di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah (2-4 Juni 2021)



Site Visit ke PT. Tani Mulus Emas di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (15-17 Juni 2021)

**c. Rapat Koordinasi tingkat Eselon I dengan mengundang K/L terkait Korporasi Petani dan Nelayan (10 Agustus 2021)**

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Korporasi Petani Dan Nelayan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 melalui *Video Conference* yang dipimpin oleh Deputi Perekonomian dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM,

Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

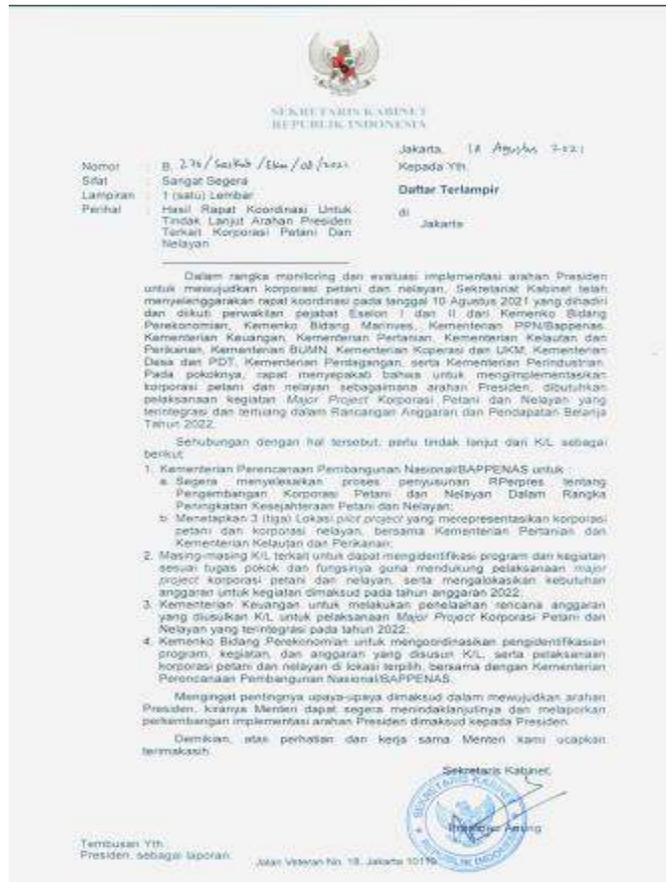
Rakor bertujuan untuk menentukan *lead* pelaksanaan program Korporasi Petani dan Nelayan guna sinkronisasi program dan anggaran, menentukan bentuk kelembagaan Korporasi Petani dan Nelayan, mengetahui progres penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, serta menentukan 1-2 lokasi *pilot project* Korporasi Petani dan Nelayan.

Rakor bertujuan untuk menentukan *lead* pelaksanaan program Korporasi Petani dan Nelayan guna sinkronisasi program dan anggaran, menentukan bentuk kelembagaan Korporasi Petani dan Nelayan, mengetahui progres penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, serta menentukan 1-2 lokasi *pilot project* Korporasi Petani dan Nelayan.

Rakor menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kementerian PPN/Bappenas untuk:
  - a. Menyelesaikan proses penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
  - b. Menetapkan 3 (tiga) Lokasi *pilot project* yang merepresentasikan korporasi petani dan korporasi nelayan, bersama Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves.
- 2) Masing-masing K/L terkait untuk dapat mengidentifikasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan *major project* korporasi petani dan nelayan, serta mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk kegiatan dimaksud;
- 3) Kementerian Keuangan untuk melakukan penelaahan rencana anggaran yang diusulkan K/L untuk pelaksanaan *major project* korporasi petani dan nelayan yang terintegrasi pada tahun 2022;
- 4) Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan korporasi petani di lokasi terpilih, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
- 5) Kemenko Bidang Maritim dan Investasi untuk mengoordinasikan pelaksanaan korporasi nelayan di lokasi terpilih, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Seskab Nomor B. 276/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021.



Rapat Koordinasi tingkat Eselon I dengan mengundang K/L terkait Korporasi Petani dan Nelayan (10 Agustus 2021)

## Perkembangan Tindak Lanjut Rangkaian Kegiatan Korporasi Petani dan Nelayan

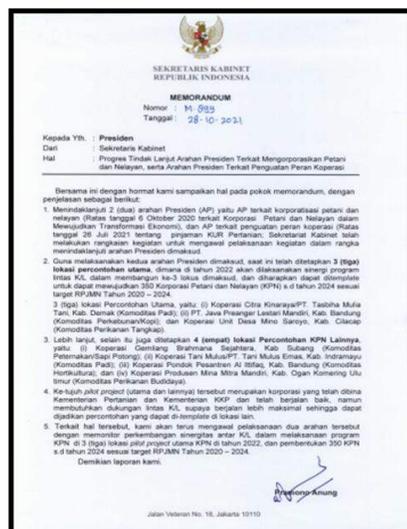
Pada perkembangannya, terdapat arahan lain dari Presiden yang mendukung pengembangan korporasi petani dan nelayan yakni arahan pada Rapat Terbatas tanggal 26 Juli 2021 terkait Pinjaman KUR dengan arahan:

- Agar skema KUR disempurnakan, serta disesuaikan dengan karakteristik sektor pertanian termasuk pula bagi off taker-nya;
- Segera dilakukan pengembangan koperasi untuk menjadi off taker produk hasil pertanian; dan
- Menko Bidang Perekonomian agar mengkonsolidasikan hal tersebut mulai dari hulu ke hilir, mendetailkan satu per satu komoditi dan menyusun langkah yang perlu dilakukan untuk koperasi mengambil peluang menjadi off taker produk hasil pertanian.

Dalam rangka mengawinkan kedua arahan terkait mengorporasikan petani dan pinjaman KUR, serta menindaklanjuti surat Seskab Nomor B. 276/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Kemenko Bidang Perekonomian dengan melakukan rakor pada tanggal 28 September 2021, 5 dan 8 Oktober 2021.

Dari rangkaian rapat tersebut, terdapat kesepakatan final, yaitu sebagai berikut:

- Ditetapkan 3 (tiga) lokasi Percontohan Utama, yaitu:
  - Koperasi Citra Kinaraya/PT. Tasbiha Mulia Tani, Kab. Demak (Komoditas Padi);
  - PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi);
  - Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap).
- Ditetapkan 4 (empat) lokasi Percontohan Lainnya, yaitu:
  - Koperasi Gemilang Brahmana Sejahtera, Kab Subang (Komoditas Peternakan/Sapi Potong);
  - Koperasi Tani Mulus/PT. Tani Mulus Emas, Kab. Indramayu (Komoditas Padi);
  - Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Kab. Bandung (Komoditas Hortikultura);
  - Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri, Kab. Ogan Komering Ulu timur (Komoditas Perikanan Budidaya).
- Selanjutnya agar K/L terkait yang telah teridentifikasi dapat mendukung terwujudnya KPN (Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenperin, Kemen BUMN), untuk dapat mendukung pengembangan KPN Percontohan melalui sinergitas program, kegiatan dan anggaran.
- Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memo nomor: M.899 tanggal 28 Oktober 2021 hal Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden terkait Penguatan Peran Koperasi.



## 11. Evaluasi Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Permohonan Izin Penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen Tahun 2022-2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) kepada Presiden menyampaikan laporan Evaluasi Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Permohonan Izin Penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen Tahun 2022-2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang intinya membahas hasil evaluasi pelaksanaan Stranas Perlindungan Konsumen 2017-2019 dan usulan penyusunan Stranas periode 2022-2024 sebagai komitmen pemerintah terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

Terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Stranas Perlindungan Konsumen 2017-2019, diperoleh informasi dalam rapat, yang intinya bahwa:

- a. Dari 65 indikator sasaran yang ditetapkan, terdapat 48 indikator sasaran (73,8%) yang sudah melampaui target, 15 indikator sasaran (23,1%) belum mencapai target (terlampir), dan 2 indikator sasaran tidak dapat dihitung capaiannya karena data tidak tersedia.
- b. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia baru mencapai 50.39 (level Mampu), dimana nilai tersebut paling rendah di antara negara-negara ASEAN dan tercermin dengan tingkat pengaduan konsumen masih rendah.
- c. Terdapat tantangan perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Hal ini terlihat dari jumlah pengaduan terkait *e-commerce* pada masa Pandemi Covid-19 meningkat lebih dari 500% di tahun 2020 dan kembali meningkat tajam di tahun 2021.

Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 523/Seskab/Ekon/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang intinya:

- a. Perlindungan konsumen merupakan program lintas sektoral antar K/L, sehingga agar diselenggarakan pelaksanaannya agar tidak tumpang tindih.
- b. Capaian PDB Indonesia bahwa lebih dari 55% dari sisi permintaan ditopang dari konsumsi rumah tangga, sehingga perlindungan konsumen harus dapat menjangkau hal tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha, khususnya terkait dengan *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Sedangkan revisi UU PK, yang didalamnya mengatur kewajiban pemerintah untuk menetapkan strategi nasional Perlindungan Konsumen, belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2022. Untuk itu, revisi Stranas Perlindungan Konsumen diharapkan dapat pula berfungsi *filling the gap* sampai dengan ditetapkannya revisi UU PK.
- d. Stranas Perlindungan Konsumen perlu segera disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan tenggat waktu paling lambat akhir Januari 2022 disampaikan kepada Presiden.

## Surat Sekretaris Kabinet mengenai Evaluasi Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen Tahun 2022-2024



### 12. Penyesuaian Harga Gas Bumi Bagi Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik di Kawasan Industri Batam

Sekretariat Kabinet pada tanggal 20 Desember 2021 telah menyelenggarakan rapat pembahasan permasalahan kenaikan harga gas di Kawasan Industri Batam guna menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian. Permasalahan kenaikan harga gas tersebut didasari oleh penetapan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) terhadap harga gas untuk perusahaan Kawasan Industri pemegang Izin Usaha Pembangkit Listrik di Kawasan Industri Batam dari yang sebelumnya US\$ 7,3/MMBTU menjadi US\$ 8,8/MMBTU pada tanggal 1 Januari 2022. Kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan harga gas di hulu sebesar USD1,8/MMBTU yang sebelumnya USD5,22/MMBTU menjadi USD7,02/MMBTU, di luar biaya distribusi.

Penetapan kenaikan harga gas tersebut dinilai berpotensi menghambat program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, dan menimbulkan efek domino terhadap harga listrik yang harus dibayar oleh perusahaan industri, mengingat gas tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit tenaga listrik di dalam kawasan industri Batam.

Kebijakan pengurangan harga gas dimaksud perlu didahului dengan kajian terhadap pengurangan penerimaan negara dari sektor gas bumi. Untuk itu, kebijakan pengurangan harga dan penghitungan kembali struktur pembentuk harga gas tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu oleh Kementerian ESDM dengan melibatkan antara lain, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan supplier.

## Rapat Pembahasan di Kantor Setkab dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian Tanggal 20 Desember 2021



Mengingat permasalahan tersebut terkait dengan lingkup tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, guna tindak lanjut dan penyelesaiannya.

### Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi

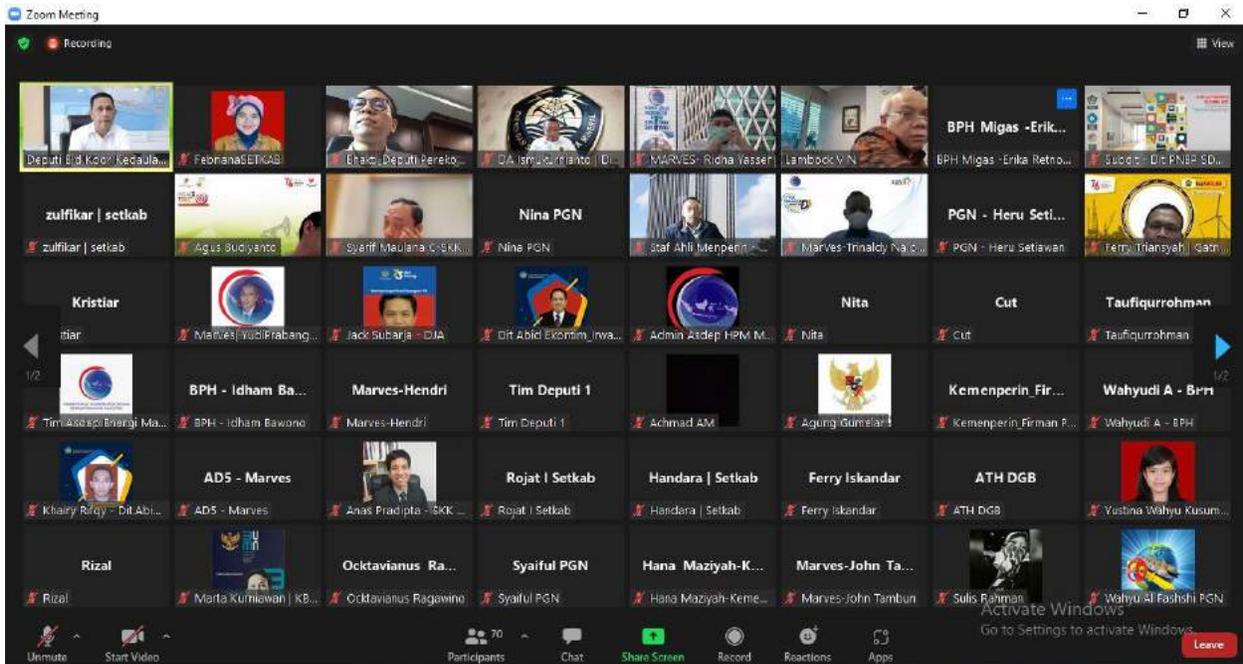


Pada tanggal 29 Desember 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menindaklanjuti surat Seskab tersebut dengan menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Rapat menyepakati bahwa kenaikan harga gas untuk KI Batam menjadi US\$ 8,8/MMBTU ditunda hingga 6 (enam) bulan kedepan (terhitung sejak 1 Januari 2022).

Selanjutnya Kontrak Batam-1 akan dilanjutkan hingga 6 (enam) bulan ke depan dengan harga jual gas pada sisi hulu yang diterima PT PGN tetap dengan harga US\$ 5,44/MMBTU, sehingga harga jual gas pada sisi hilir (plant gate) untuk KI Batam tetap pada harga US\$ 7,3/MMBTU.

Selain itu, proses pengusulan penyedia energi listrik di KI Batam untuk diberikan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu sebesar US\$ 6/MMBTU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, akan dilakukan oleh Kementerian ESDM setelah menerima usulan secara lengkap dari KI Batam.

### Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tanggal 29 Desember 2021



#### IKK 4 (Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet)

##### 1. Penyampaian update dan analisis perkembangan ekonomi terkini setiap bulan

Penyusunan laporan ringkas perkembangan ekonomi terkini setiap awal bulan kepada Presiden dimaksudkan untuk memberikan *highlight (snapshot)* ekonomi nasional yang bersifat strategis dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah.

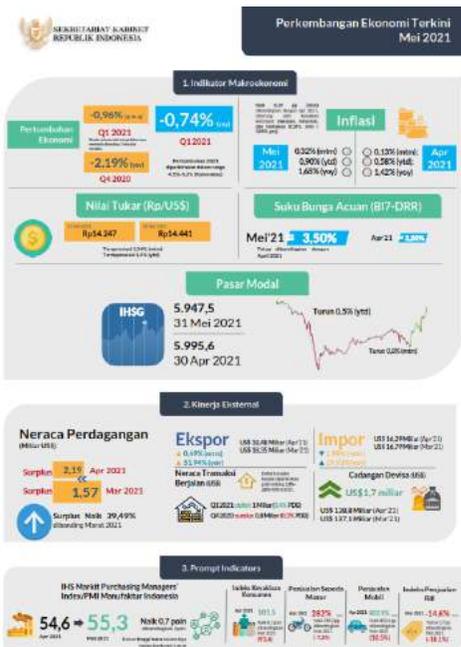
Dalam laporan terakhir bulan Juni 2021, ekonomi domestik secara umum menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

- a. Perekonomian domestik terus mengalami perbaikan, terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi.
- b. Beberapa indikator masih menunjukkan pelemahan, antara lain: 1) Pertumbuhan kredit April masih terkontraksi (-2,28%, yoy) meski membaik dibanding Maret (-3,77%, yoy); 2) Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini April 2021 (80,3) mengindikasikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini masih berada di zona pesimis (<100); dan 3) Indeks Penjualan Riil Maret 2021 masih tumbuh negatif (-14,6%, yoy) meski membaik dibanding Februari (-18,1%, yoy).
- c. Guna mendukung aktivitas pemulihan ekonomi, belanja pemerintah pusat terus diakselerasi sejak awal tahun dan tumbuh 20,53% (yoy) hingga 31 Mei 2021 (33,13% pagu APBN 2021), yang didorong oleh realisasi belanja modal dan belanja barang.

Dalam laporan dimaksud juga disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Upaya pengendalian Covid-19, khususnya pasca-libur lebaran, melalui perluasan dan pengetatan PPKM Mikro yang disertai dengan percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitasnya. Hal ini untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
- b. Perbaikan fungsi intermediasi perbankan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI yang menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit (dari 2% menjadi 1,75% per bulan) merupakan langkah positif untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi secara cermat mengingat komposisi transaksi kartu kredit hanya sekitar 2,6% dari konsumsi rumah tangga (2020).

Dampak atas rencana perluasan basis pajak dan kenaikan tarif pajak pada tahun 2022 sebagaimana termuat dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan agar mulai dikaji secara lebih mendalam, terutama dari aspek tahapan dan waktu (*timing*) pemberlakuannya agar tidak mengganggu pemulihan dan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke depan.



Infografis Perkembangan Indikator Ekonomi pada bulan Mei 2021 yang disampaikan pada bulan Juni

Infografis Realisasi Investasi pada Triwulan I-2021 yang disarikan dari laporan BKPM, disampaikan pada bulan April

## 2. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Arahan/Janji Presiden Terkait Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Presiden pada beberapa Sidang Kabinet Terbatas atau Sidang Kabinet Paripurna, menyampaikan arahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar benar-benar mendukung infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata, seperti pembangunan runway, terminal airport, trotoar dan jalan-jalan menuju ke tempat pariwisata yang telah menjadi prioritas pemerintah, termasuk juga pembangunan pasar.

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa proyek revitalisasi atau pembangunan fisik yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan agar digeser ke Kementerian Pekerjaan PUPR, sehingga konsentrasi Kementerian Perdagangan benar-benar pada urusan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri dan tidak lagi berkaitan dengan fisiknya.

Khusus untuk program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 (Perpres 64 Tahun 2018) tentang Renovasi dan Pengembangan

Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Sarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 (Perpres 43 Tahun 2019) tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didalam lampirannya menetapkan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi terhadap 8 (delapan) pasar rakyat, yakni Pasar Klewer Timur di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali; Pasar Legi (Songgolangit) di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur; Pasar Kaliwungu di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah; Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pasar Pariaman di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat; Pasar Legi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; dan Pasar Benteng Pancasila di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Dalam kedua Peraturan Presiden tersebut, Presiden memerintahkan Menteri PUPR untuk melaksanakan renovasi, pembangunan, rehabilitasi pasar rakyat dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Adapun lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat berdasarkan Perpres 64 Tahun 2018 dan Perpres 43 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019
1. Pasar Atas Bukittinggi – Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	1. Pasar Klewer Timur – Kota Surakarta, Jawa Tengah
2. Pasar Aksara – Kota Medan, Sumatera Utara	2. Pasar Sukawati – Kabupaten Gianyar, Bali
3. Pasar Prawirotaman – Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta	3. Pasar Legi (Songgolangit) – Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
	4. Pasar Kaliwungu – Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
	5. Pasar Renteng – Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
	6. Pasar Pariaman – Kota Pariaman, Sumatera Barat
	7. Pasar Legi – Kota Surakarta, Jawa Tengah
	8. Pasar Pon – Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
	9. Pasar Benteng Pancasila – Kota Mojokerto, Jawa Timur

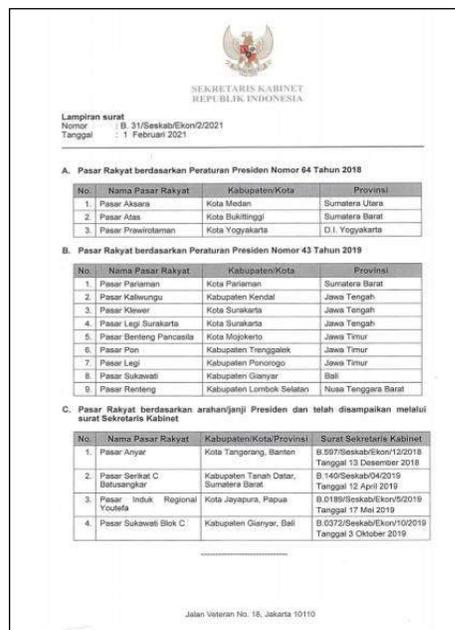
Perpres 64 Tahun 2018 dan Perpres 43 Tahun 2019 juga mengamanatkan kepada Menteri PUPR untuk melaporkan pelaksanaan renovasi, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat secara berkala (Perpres 64 Tahun 2018) dan setiap 6 (enam) bulan sekali (Perpres 43 Tahun 2019) atau sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 Perpres 43 Tahun 2019 intinya disebutkan pula bahwa dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat selain tercantum dalam

Lampiran Peraturan Presiden tersebut, Menteri PUPR dapat menetapkan lokasi pembangunan/revitalisasi Pasar sesuai arahan Presiden. Implementasi dari ketentuan ini, Sekretaris Kabinet (atas nama Presiden) telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Menteri PUPR guna menyampaikan arahan/janji Presiden terkait pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat di beberapa daerah di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah khususnya terkait program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Sekretaris Kabinet kepada Menteri PUPR telah menyampaikan permohonan laporan perkembangan program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat (surat nomor B.31/Seskab/Ekon/02/2021 tanggal 1 Februari 2021).

Atas surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri PUPR telah menyampaikan laporan dimaksud melalui surat Nomor PR.0303-Mn/243 tanggal 15 Februari 2021, yang kemudian telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.103/Ekon/03/2021, tanggal 10 Maret 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat.

**Surat Sekretaris Kabinet mengenai Permohonan Laporan Perkembangan dan Program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat**



### 3. Mengawal Penataan Ekosistem Logistik Nasional sesuai Inpres 5 Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, telah ditetapkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Penataan Ekosistem Logistik Nasional juga merupakan arahan Presiden yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha, yaitu *Trading Across Borders* yang peringkatnya selalu stagnan di beberapa tahun terakhir.

Penataan Ekosistem Logistik Nasional juga merupakan salah satu stimulus ekonomi non fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional agar dapat lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor. Untuk memastikan implementasi Inpres tersebut, Sekretariat Kabinet secara rutin melakukan pengawasan atas capaian-capaian dalam rencana aksi Inpres 5 Tahun 2020 melalui serangkaian rapat koordinasi yaitu pada tanggal 15 Maret dan 16 Juni 2021. Sampai dengan Juni 2021, capaian-capaian renaksi Inpres 5 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem SSm Kepabeanaan dan Karantina secara bertahap;
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh K/L yang terkait dengan proses pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan kapal melalui Sistem SSm Pengangkutan;
3. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 terkait prosedur perizinan ekspor dan impor untuk pengguna jasa yang mempunyai profil yang baik (reputable trader);
4. Terlaksananya pemesanan truk secara online untuk pengangkutan/trucking dalam negeri;
5. Terlaksananya uji coba layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan (layanan D/O);
6. Terlaksananya layanan D/O secara online melalui platform kolaborasi pada 5 (lima) pelabuhan besar;
7. Proses bisnis terkait jadwal kapal, ketersediaan tempat, pemesanan tempat yang disesuaikan dengan proses pemesanan truk untuk kegiatan ekspor;
8. Terlaksananya satu siklus inbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama.





#### 4. Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)

Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan nasional berbasis pada pertanian modern, Pemerintah telah merencanakan pengembangan Kawasan Food Estate dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021. Untuk mendorong program Food Estate terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Ratas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis Food Estate agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi Food Estate yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Untuk memastikan arahan Presiden terkait Food Estate tersebut dilaksanakan dengan baik, Sekretariat Kabinet mengawal pengembangan program Food Estate dengan terlibat aktif dengan menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I pada tanggal 19 Juni 2020 dengan kesepakatan matriks kegiatan tindaklanjut Arahan Presiden serta terlibat secara rutin sejak tahun 2020 dalam pembahasan dalam Rakor Tingkat Teknis baik untuk Es. I dan Es. II, maupun seminar/workshop terkait Food Estate.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan RPerpres Peningkatan Penyediaan Pangan Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate, dengan memberikan catatan dan masukan kepada Menteri Sekretaris Negara guna menyempurnakan substansi RPerpres Food Estate tersebut (surat Sekretaris Kabinet B.392/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 17 Desember 2020) serta pada Rapat Klarifikasi RPerpres Food Estate (23 April, 26 April, dan 25 Juni 2021). Masukan-masukan Sekretariat Kabinet terhadap RPerpres tersebut diantaranya adalah terkait lokasi Food Estate sesuai Arahan Presiden dalam Ratas, pengaturan mengenai kelembagaan, serta integrasi program Food Estate dengan program Korporasi Petani.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan kegiatan pemantauan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) program Food Estate ke 5 (lima) lokasi Food Estate sesuai Arahan Presiden pada Ratas tanggal 23 September 2020 yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dengan mengundang K/L terkait yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR.

Kegiatan monev tersebut dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan Food Estate, mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan Food Estate, serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan Food Estate. Melalui kegiatan monev tersebut, Sekretariat Kabinet akan menghasilkan laporan komprehensif kepada Presiden berupa rekomendasi penyelesaian permasalahan yang konkrit Estate dan juga rekomendasi dalam percepatan pencapaian target terhadap pengembangan program Food.

## 5. Penyelenggaraan Focus Group Discussion *Outlook Ekonomi Indonesia 2022*



Dalam rangka memberikan pandangan dan saran rekomendasi kepada Presiden terhadap proyeksi perkembangan dan situasi perekonomian Indonesia tahun 2022, serta evaluasi atas kinerja perekonomian tahun 2021, Sekretariat Kabinet memandang perlu dilakukannya pembahasan bersama beberapa ahli dan praktisi di bidang perekonomian mengenai prediksi kondisi ekonomi di tahun 2022 mendatang dan strategi yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sekretariat Kabinet kemudian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Outlook Ekonomi 2022 bertema Menjaga Momentum Pertumbuhan dengan menghadirkan narasumber dari *Asian Development Bank Institute, Indonesia Investment Authority, LPEM Universitas Indonesia, dan Bank Tabungan Negara*.

Adapun inti dan hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi pascaCovid-19 secara lebih terarah, fokus, dan mempertimbangkan kapasitas fiskal, beberapa sektor perlu diprioritaskan untuk menjadi motor pemulihan, yaitu 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; serta 3) industri pengolahan/manufaktur.  
Pemilihan ketiga sektor dimaksud dilandasi kriteria: 1) besaran kontribusi sektor pada pertumbuhan ekonomi; 2) laju pertumbuhan sektor; dan 3) serapan tenaga kerja sektor.
2. Pengembangan ketiga sektor prioritas tersebut dapat difokuskan pada pemberdayaan dan peningkatan peran UMKM. Kolaborasi antara UMKM yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri dengan industri besar dan BUMN diharapkan dapat mendukung kebijakan substitusi impor, serta meningkatkan rasio produk UMKM yang masih rendah dalam rantai nilai nasional/global. Selain mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok global, perluasan akses pasar UMKM, baik di dalam

- maupun luar negeri, perlu terus dilakukan melalui digitalisasi UMKM (pengembangan UKM masa depan berbasis teknologi) maupun penguatan merek lokal.
3. Selain ketiga sektor tersebut, sektor perumahan dapat menjadi salah satu sektor prioritas untuk mengakselerasi pemulihan karena memiliki multiplier effect yang luas (padat karya dan tinggi kandungan produk lokal), dan untuk mempercepat target penyediaan perumahan. Untuk itu diperlukan optimalisasi efektivitas berbagai kebijakan stimulus sektor perumahan, seperti restrukturisasi kredit, pelonggaran LTV/FTV, perpanjangan insentif pembebasan PPN, dan penyesuaian antar program perumahan (KPR FLPP, KPR BP2BT, dan KPR Tapera). Beberapa tantangan fundamental juga perlu diselesaikan, seperti harga lahan yang semakin tinggi (supply) maupun keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap harga rumah (demand), termasuk mempercepat penurunan suku bunga KPR.
  4. Aliran masuk investasi asing untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi kinerja INA, khususnya dalam mencapai target pendanaan awal yang ditetapkan (±Rp300 triliun). Investasi melalui INA dapat difokuskan untuk memperbaiki neraca keuangan BUMN infrastruktur, khususnya aspek likuiditas melalui pengurangan beban utang (deleveraging), dan juga untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek prioritas yang mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain infrastruktur konektivitas dan proyek terkait energi hijau.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok *Cairns Group* di *World Trade Organization* (WTO)

Menteri Perdagangan kepada Presiden Menyampaikan Laporan Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok *Cairns Group* di WTO tanggal 23 Juni 2021 yang intinya:

- a. Salah satu isu yang diperjuangkan dalam *Cairns Group* adalah **penghapusan subsidi ekspor dan dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan**.
- b. Pertemuan tingkat menteri membahas *deliverable outcomes* perundingan pertanian dalam kerangka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 diantaranya:
  - 1) ***Domestic Support/Dukungan Domestik (DS)***: dikarenakan masih tingginya pemberian dukungan domestik negara maju kepada petaninya, maka pemberlakuan mekanisme yang bersifat adil, seimbang, proporsional, transparan, terprediksi, dan penyetaraan *level of playing field* sangatlah penting bagi semua anggota WTO. CG **menyepakati deklarasi pembatasan DS sebesar 50% sampai dengan 2030** yang akan disampaikan pada KTM WTO ke-12.
  - 2) ***Special and Differential Treatment (S&DT)***: Indonesia turut mendukung S&DT tetap diberikan kepada negara berkembang dan kurang berkembang dalam kaitan DS saat kondisi krisis (kelaparan, bencana alam, perubahan iklim, dll), sehingga **subsidi masih diberikan bagi kelompok petani kecil dan miskin**.
  - 3) ***Food Security and Livelihood*** guna ketahanan pangan dan mata pencaharian petani, pemberian subsidi diperlukan oleh petani kecil dan miskin. Dalam hal ini, **penghapusan dan pembatasan subsidi harus disesuaikan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara**. Selain itu, Indonesia mendorong penyelesaian isu *Public Stockholding for Food Security Purposes*, dan *Special Safeguard Mechanism* sesuai dengan mandat Doha Development Agenda.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0695/Seskab/08/2021 tanggal 15 Agustus 2021, menyampaikan bahwa pokok-pokok isu yang dibahas dan akan diangkat menjadi *deliverable outcomes* perundingan KTM WTO ke-12 **telah selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia**, serta dukungan Indonesia melalui Menteri Perdagangan terhadap *deliverable outcomes* telah relevan dengan kondisi domestik, dengan pertimbangan antara lain:

- a. Isu DS menjadi salah satu isu utama bagi seluruh negara anggota WTO, namun masih terdapat keengganan dari negara Amerika Serikat dan Kelompok G-10 untuk mendukung pembahasan DS pada KTM WTO ke-12. Dalam hal ini, **Indonesia menjadi co-sponsor framework DS CG dan deklarasi CG Minister's Statement** dengan tetap memperhatikan S&DT, *food security*, dan *livelihood* bagi negara berkembang dan kurang berkembang.
- b. Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan terkait DS, perlindungan petani, dan ketahanan pangan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, keduanya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
  - 1) wajib meningkatkan produksi pertanian, yang dilakukan melalui strategi perlindungan petani, antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, dan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
  - 2) bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian, yang paling sedikit meliputi antara lain:
    - a) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
    - b) alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

## 7. Percepatan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2021

Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1070/MK.04/2021 tanggal 24 November 2021 kepada Sekretaris Kabinet melaporkan capaian penataan ekosistem logistik nasional sampai dengan Oktober tahun 2021. Penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, dimana Menteri Keuangan merupakan penanggungjawab atas pelaksanaan Inpres dimaksud. Inti laporan tersebut yaitu:

1. Pada tahun 2021, rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional diprioritaskan untuk peningkatan dan pengembangan sistem fitur layanan *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan perluasan lokasi implementasi NLE di beberapa pelabuhan nasional.
2. Dari 42 (empat puluh dua) target keluaran rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, sampai dengan Oktober tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) target dapat diselesaikan, dan 16 (enam belas) target sedang dalam tahap penyelesaian atau pengembangan. Adapun 10 target lainnya akan diselesaikan paling lama sampai tahun 2024, disesuaikan dengan target masing-masing keluaran rencana aksi.
3. NLE akan diimplementasikan secara bertahap di 6 pelabuhan besar nasional (Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Batam), serta mulai dilaksanakan pula di beberapa pelabuhan lain, seperti Merak, Kuala Tanjung, Balikpapan, Samarinda, Kendari dan Bitung. Saat ini juga sedang dilaksanakan persiapan pengembangan di pelabuhan udara, seperti Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno Hatta.

Terkait dengan laporan Menteri Keuangan tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas implementasi Inpres 5 Tahun 2020, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 6 Desember 2021 telah melaksanakan rapat bersama Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan; Kedeputusan Perniagaan dan Industri, Kemenko Bidang Perekonomian; dan Lembaga

National Single Window guna memastikan capaian atas renaksi Inpres 5 Tahun 2020 yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil rapat tersebut dilaporkan bahwa:

1. Dari 13 (tiga belas) rencana aksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021, sebanyak 10 (sepuluh) rencana aksi telah selesai, dan 3 (tiga) rencana aksi masih dalam proses penyelesaian.
2. Salah satu rencana aksi yang seharusnya diselesaikan di bulan Januari tahun 2022, yaitu Pelaksanaan *piloting* sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya, pada tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan dengan Kementerian Pertanian.
3. Dalam rapat tersebut, disampaikan perlunya percepatan capaian atas rencana aksi dalam Inpres 5 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu: *Single Submission* (SSm) Pengangkut, *Single Submission Quarantine and Custom* (SSm QC), *Autogate System*, *Delivery Order (DO) Online*, SP2, *Trucking*, *Vessel domestic*, dan *Payment*.
4. Selain mendasarkan pada rencana aksi yang dimuat dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, Kementerian Keuangan akan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, antara lain melakukan percepatan pengembangan sistem (*Re-engineering*) NLE, percepatan penyelesaian payung hukum (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengatur kolaborasi platform logistik dalam NLE melalui *Application Programming Interface* (API), percepatan *piloting* dan implementasi SSm Pengangkut di sejumlah pelabuhan; percepatan *joint system platform warehouse* dan depo; dan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait komoditas unggulan lokal.

Sehubungan dengan pelaporan capaian penataan ekosistem logistik nasional oleh Menteri Keuangan tersebut, dan memperhatikan diktum ke 8 (delapan) Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dimana Sekretaris Kabinet diinstruksikan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor B.0464/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan atas capaian penataan ekosistem logistik nasional tahun 2021.

Selanjutnya, dengan memperhatikan arahan presiden, Sekretaris Kabinet meminta Menteri Keuangan untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 yang belum tercapai, khususnya atas target rencana aksi yang menjadi prioritas Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (yang terkait dan mendukung pemangkasan birokrasi serta peningkatan layanan di kawasan pelabuhan) serta memastikan agar capaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 menghasilkan *outcome* sebagaimana tujuan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2020.



**Surat Seskab kepada Menteri Keuangan  
tentang Percepatan Capaian Penataan  
Ekosistem Logistik Nasional**

## 8. Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)

Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan nasional berbasis pada pertanian modern, Pemerintah telah merencanakan pengembangan Kawasan Food Estate dalam RPJMN 2020–2024 dan RKP Tahun 2021. Untuk mendorong program Food Estate terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Ratas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis Food Estate agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi Food Estate yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Untuk memastikan arahan Presiden dan program Pemerintah terkait Food Estate tersebut dilaksanakan dengan baik, Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi (Asdep-4) pada Kedeputusan Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2021 telah merangsupkan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional atau yang dikenal sebagai *Food Estate* yang dimulai oleh Pemerintah sejak tahun lalu. Kegiatan monev yang dilakukan oleh Asdep-4 telah sesuai dengan Rencana Kerja Asdep-4 tahun 2021 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Deputy Bidang Perekonomian dan dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam hal ini kebijakan mengenai *Food Estate*.

Hasil dari kegiatan monev ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana capaian dan progress dilapangan serta kendala pencapaian tersebut dan catatan ini akan menjadi bahan masukan yang menentukan proses selanjutnya yaitu pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (*debottlenecking*) serta bahan evaluasi kedepan yang akan disajikan dalam bentuk laporan serta rekomendasi yang tidak hanya berguna bagi Presiden, tetapi juga bagi para menteri terkait, pemerintah daerah serta pengambil kebijakan lainnya. Dengan kata lain, monev ini juga dimaksudkan untuk dapat memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*).

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka mengawal program Food Estate pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**1. Keterlibatan Sekretariat Kabinet Dalam Forum Food Estate Tahun 2021**

Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2021 ikut terlibat aktif dalam berbagai forum (rapat koordinasi progress/perkembangan Food Estate, Rapat pembahasan RPerpres Food Estate, FGD serta Workshop Food Estate) yang diselenggarakan oleh K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara serta K/L lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut Arahan Presiden terkait Food Estate.

**2. Pemantauan (*Site Visit*)**

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan (*site visit*) guna melihat progress/perkembangan program Food Estate sesuai Arahan Presiden. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan Food Estate, mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan Food Estate, serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan Food Estate.

Dalam kegiatan pemantauan tersebut, Sekretariat Kabinet turut mengundang beberapa K/L yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian PUPR. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan di 4 (empat) provinsi Food Estate sesuai arahan Presiden dalam Ratas tanggal 23 September 2020, sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Kabupaten Sumba Tengah <b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	27 s.d. 29 Mei 2021
2.	Kabupaten Banyu Asin <b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	9 s.d. 11 Juni 2021
3.	Kab. Kapuas & Kab. Pulang Pisau <b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	16 s.d. 19 Juni 2021
4.	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, & Kab. Tapanuli Utara <b>Provinsi Sumatera Utara</b>	13 s.d. 16 Oktober 2021



Monev Food Estate ke Kab. Sumba Tengah,  
Provinsi NTT, 27-29 Mei 2021



Monev Food Estate ke Kab. Banyu Asin,  
Provinsi Sumsel, 9-11 Juni 2021



Monev Food Estate ke Provinsi Kalimantan  
Tengah, 16-19 Juni 2021

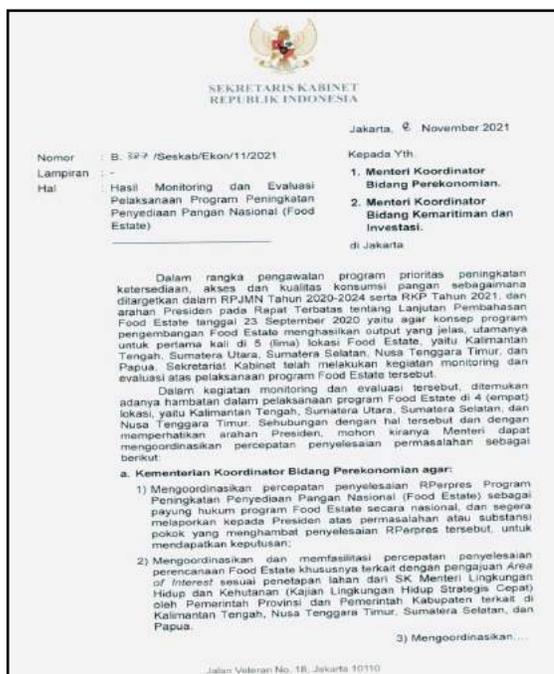


Monev Food Estate ke Provinsi Sumatera  
Utara, 13-16 Oktober 2021

Berdasarkan hasil pemantauan ke lapangan (*site visit*) ke 4 (empat) provinsi Food Estate, serta berdasarkan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Bupati/Wakil Bupati beserta jajaran Dinas pemerintah daerah terkait, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (*fact finding*) pelaksanaan program Food Estate yaitu permasalahan mengenai sarana dan prasarana (alsintan, jalan, dan irigasi), permasalahan Area of Interest (Aoi), permasalahan model bisnis Food Estate, serta permasalahan Masterplan Food Estate. Selanjutnya, melalui kajian dan desk study, Sekretariat Kabinet telah merumuskan beberapa saran dan rekomendasi untuk penguatan program Food Estate. Saran dan rekomendasi tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Marves melalui surat Sekretariat Kabinet (surat nomor: B.387/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 8 November 2021, perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penyediaan Nasional (Food Estate)).

Dalam surat tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi, yang intinya adalah:

1. Kemenko Bidang Perekonomian agar:
  - a. Mengoordinasikan percepatan penyelesaian RPerpres Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) sebagai payung hukum program Food Estate secara nasional.
  - b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penyelesaian perencanaan Food Estate khususnya terkait dengan pengajuan *Area of Interest* sesuai penetapan lahan dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.
  - c. Mengoordinasikan dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, untuk percepatan penyusunan Masterplan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
2. Kemenko Bidang Marves agar:
  - a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penyelesaian perencanaan Food Estate khususnya terkait dengan pengajuan *Area of Interest* sesuai penetapan lahan dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait di Sumatera Utara.
  - b. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti pengajuan *Area of Interest*, dengan mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 448 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020, khususnya bagi Pemerintah Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, dan Kab. Tapanuli Utara.



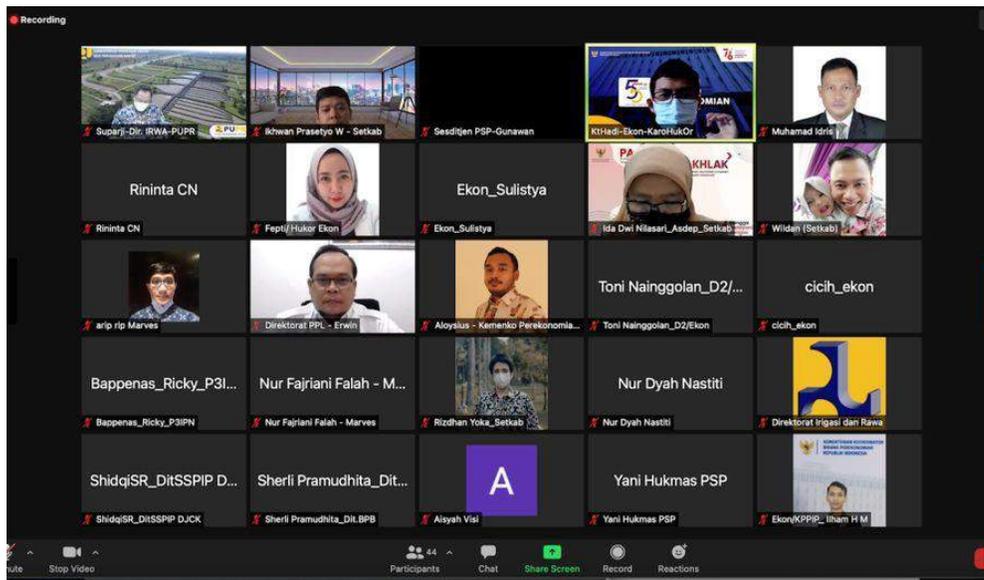
Surat Seskab Nomor  
B.387/Seskab/Ekon/11/2021  
tanggal 8 November 2021

Terhadap surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti surat tersebut sebagai berikut

1. Berdasarkan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian bermaksud untuk menyelenggarakan Rakortas, namun demikian Menko Bidang Perekonomian direncanakan untuk bertemu terlebih dahulu dengan Menteri PUPR guna membicarakan beberapa hal berkaitan dengan Food Estate sebagaimana surat Seskab tersebut.
2. Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian telah menyelenggarakan Rakor Pembahasan RPerpres Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) pada tanggal 24 November 2021 guna menindaklanjuti rekomendasi Setkab terkait percepatan penyusunan RPerpres Food Estate sebagai payung hukum program Food Estate secara nasional.

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian dan dihadiri oleh Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Kemenko Perekonomian, Asdep Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenko Marves, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, dan Sekretariat Kabinet.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Kemenko Perekonomian akan menyempurnakan draft RPerpres Food Estate sesuai dengan masukan peserta rapat untuk dibahas kembali dalam pertemuan selanjutnya.



Rakor Pembahasan RPerpres Food Estate (TL Surat Seskab), 24 November 2021, Kemenko Perekonomian

#### D. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, setelah dilakukan beberapa kali refocusing dan realokasi/optimalisasi, Pagu akhir Deputi Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp. 2.651.569.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Asdep:
  - a. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
  - b. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
  - c. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
  - d. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Asdep yang membawahi Bidang Fasilitas Operasional (Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi)

Realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian Pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.641.509.204,- atau sebesar 99,62% dari Pagu akhir. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sepanjang Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh 4 (empat) Asdep, baik untuk kegiatan yang sifatnya *bottom up* ataupun kegiatan yang sifatnya *Top down*. Detail rekapitulasi realisasi anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2021

Asdep	Pagu / Pagu Dialihkan	Realisasi (Open)	Realisasi (Settle)	Realisasi SSKA	Total Realisasi	Persentase	Sisa / Sisa Setelah Dialihkan
1	562.260.000	99.000	29.437.588	524.839.237	554.375.825	98,60%	7.884.175
2	583.745.000	275.000	66.489.705	516.322.397	583.087.102	99,89%	657.898
3	618.764.000	0	60.029.961	558.035.562	618.065.523	99,89%	698.477
4	886.800.000	0	111.836.771	774.143.983	885.980.754	99,91%	819.246
Subs	654.976.000	0	22.611.000	632.190.582	654.801.582	99,97%	174.418
FO	55.879.000	0	3.000.000	52.879.000	55.879.000	100,00%	0
DP	175.945.000	0	86.225.771	89.074.401	175.300.172	99,63%	644.828
	2.651.569.000				2.641.509.204	99,62%	10.059.796

Dari data diatas terlihat bahwa penyerapan realisasi anggaran pada masing-masing Asdep sangat baik. Realisasi anggaran Pada Tahun 2021 naik sebesar 0,71% dari realisasi Tahun sebelumnya sebesar 98,91%.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Deputi Bidang Perekonomian  
Tahun 2016-2021

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2016	Rp 2.700.000.000	Rp 2.523.327.274	93,46%
2017	Rp 4.432.640.000	Rp 4.127.556.909	93,12%
2018	Rp 2.484.000.000	Rp 2.478.545.310	99,78%
2019	Rp 5.408.612.000	Rp 5.378.623.176	99,45%
2020	Rp 1.687.418.000	Rp 1.669.022.998	98,91%
2021	Rp. 2.651.569.000,-	Rp. 2.641.509.204,-	99,62%

#### Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dilaksanakan guna melihat ketercapaian output dan outcome yang telah ditetapkan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan tetap memperhatikan kualitas capaian. Gambaran pelaksanaan anggaran dan ketercapaian output dan outcome pada Deputi Bidang Perekonomian dan pada masing masing Asdep dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

- Capaian Output Program

Tabel 3.4  
Pelaksanaan Anggaran dan Ketercapaian Output & Outcome  
Tahun 2021

Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden				
Sasaran Program	Output Program/Indikator Output Program	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemeritiman dan Investasi	Rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemeritiman dan Investasi	152	365	240,13%
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	116	158	136,21%
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	36	207	575,00%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemeritiman dan Investasi	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemeritiman dan Investasi	85	131	154,12%
	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	51	51	100,00%
	Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	34	80	235,29%

Dari tabel diatas terlihat bahwa, target output yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan untuk beberapa Indikator melebihi 120%, hal ini dikarenakan:

- a. Terdapat peningkatan permintaan penyampaian bahan briefing sheet (IOP-1);
- b. Dalam Kurun Waktu Tahun 2021, banyak terlibat dalam pembahasan penyelesaian Rpermen/Perka, apalagi setelah ditetapkan Perpres No 68 Tahun 2021 (IOP-2); dan
- c. Meningkatnya rekomendasi hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah seiring dengan tindaklanjut arahan Presiden (IOP-4);

- Capaian Outcome Program

**Tabel 3.5**  
**Capaian Outcome Program**  
**Tahun 2021**

Program : Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan wakil Presiden				
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91%	98%	108%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	100%	110%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	94%	103%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	100%	110%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa untuk realisasi output program belum sepenuhnya menjadi output Program, hal ini disebabkan karena:

- a. Masih ada beberapa *output* yang perlu dikaji oleh stakeholder terkait sebelum dilakukan aksi oleh KL;
- b. Dari sisi substansi ada surat Sekretaris Kabinet kepada KL yang memang tidak memerlukan tindaklanjut (sebagai salah satu syarat evidence outcome), hal ini dikarenakan surat tersebut berkaitan dengan permasalahan Kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia, sehingga Setkab berpandangan untuk tidak perlu mengkoordinasikan tindaklanjutnya.

Namun demikian bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 91%, semua capaian Indikator Kinerja dapat tercapai. Terhadap capaian output dan outcome program tersebut diatas, tentunya akan menjadikan bahan evaluasi oleh Kedeputusan Bidang Perekonomian kedepannya .

## E. Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA)

SISUKA adalah sebuah sistem yang dikembangkan secara internal di lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian sejak akhir Tahun 2019 dan mulai efektif diimplementasikan pada Tahun 2020. Sistem ini dibuat sebagai *tools* untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Perekonomian kepada mitra K/L yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.

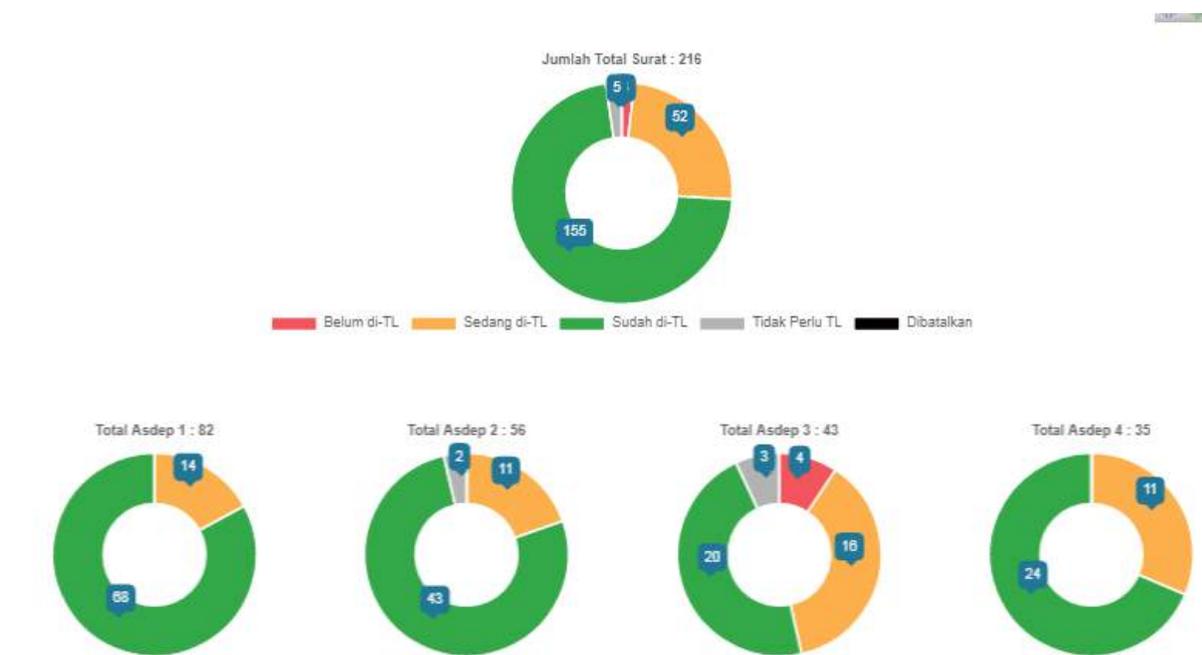
Selama Tahun 2021 surat Sekretaris Kabinet yang diproses oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk disampaikan kepada K/L dan telah diinput pada SISUKA sebanyak 209 surat. 209 surat tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. 5 surat sifatnya hanya penerusan ke K/L sehingga tidak perlu tindak lanjut;
2. 211 surat berisi rekomendasi kepada K/L sehingga memerlukan tindak lanjut

Dari 211 surat yang memerlukan tindak lanjut tersebut, dari hasil monitoring SISUKA dapat dilaporkan progresnya sebagai berikut:

1. Sudah selesai dilaksanakan oleh K/L (status hijau) sebanyak 155 surat;
2. Sedang ditindaklanjuti/*on process* (status kuning) sebanyak 52 surat; dan
3. Belum ditindaklanjuti (status merah) sebanyak 4 surat. Dari hasil monitoring surat yang belum ditindaklanjuti ini diantaranya, Terkait surat persetujuan Rpermen/PERka yang perlu mendapat persetujuan Presiden, beberapa sedang dalam proses penetapan oleh K/L

Gambar 3.3  
Tindak Lanjut SISUKA Per Asdep Tahun 2021

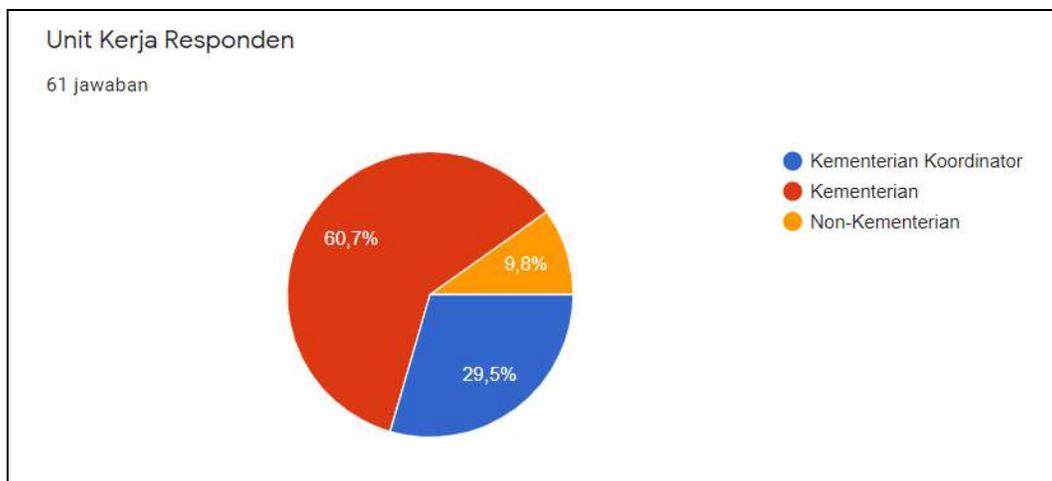


## F. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet di Bidang Perekonomian kepada Kementerian/Lembaga.

Responden terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) Eselon II pada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang Perekonomian. Waktu pelaksanaan survei dimulai dari tanggal 3-31 Desember 2021 dengan 61 (enam puluh satu) responden yang telah mengisi survei.

Gambar 3.4  
Perbandingan Kementerian/Lembaga yang Mengisi Kuesioner

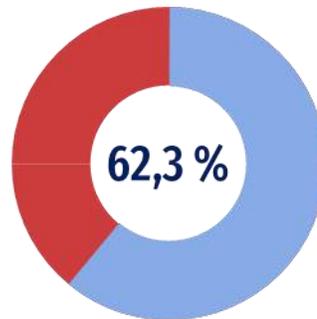


Berdasarkan gambar 3.4 di atas, sebanyak 61 (enam puluh satu) responden dari Kementerian/Lembaga telah mengisi kuesioner. Sebanyak 37 responden (60,7%) berasal dari Kementerian, 18 Responden (29,5%) berasal dari Kementerian Koordinator, dan sisanya sebanyak 6 Responden (9,8%) berasal dari Non Kementerian.

### 1. Rekomendasi Kebijakan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di Bidang Perekonomian berdasarkan 61 (enam puluh satu) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

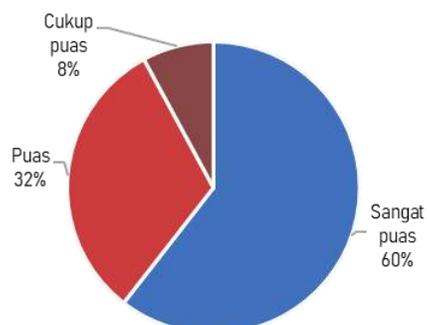
**Gambar 3.5**  
**Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir**



Berdasarkan gambar 3.5 di atas, terdapat 38 Kementerian/Lembaga (62,3%) yang pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, sisanya sebanyak 23 Kementerian/Lembaga (37,7%) menjawab tidak pernah mengajukan permintaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

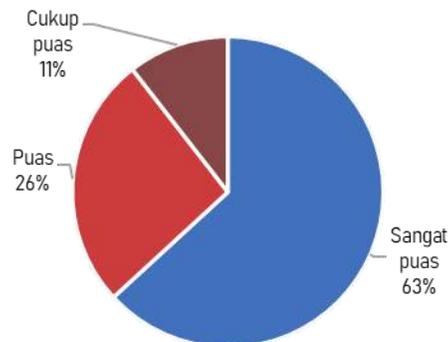
**Gambar 3.6**  
**Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian**



Berdasarkan gambar 3.6 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 23 responden (60%), sebanyak 12 responden (32%) menyatakan puas, 3 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

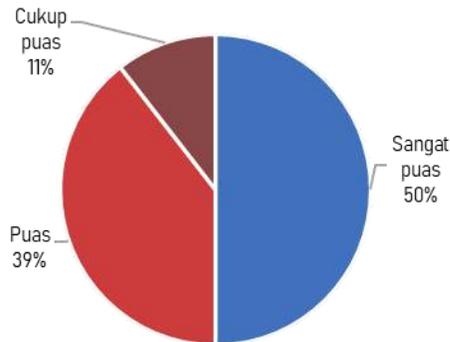
**Gambar 3.7**  
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.7 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 24 responden (63%), sebanyak 10 responden (26%) menyatakan puas, 4 responden (11%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

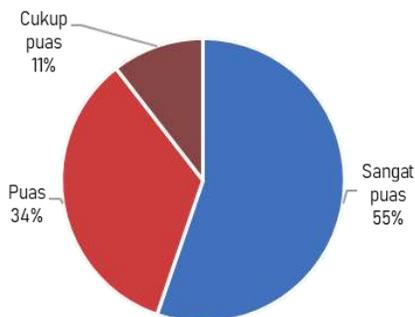
**Gambar 3.8**  
**Tingkat kepuasan terhadap ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian**



Berdasarkan gambar 3.8 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 19 responden (50%), sebanyak 15 responden (39%) menyatakan puas, 4 responden (11%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas atas ketepatan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian?

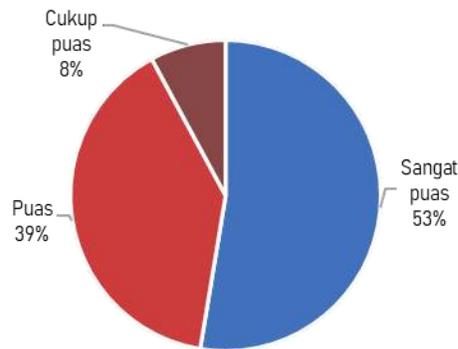
**Gambar 3.9**  
**Tingkat kepuasan terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian**



Berdasarkan gambar 3.9 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 21 responden (55%), sebanyak 13 responden (34%) menyatakan puas, 4 responden (11%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecukupan waktu penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di Bidang Perekonomian.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian?

**Gambar 3.10**  
Tingkat kepuasan terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian



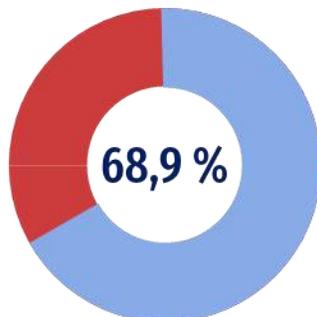
Berdasarkan gambar 3.10 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 20 responden (53%), sebanyak 15 responden (39%) menyatakan puas, 3 responden (8%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap penyampaian informasi Arahan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas di Bidang Perekonomian.

## 2. Penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 61 (enam puluh satu) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

Gambar 3.11

Kementerian/Lembaga yang pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir

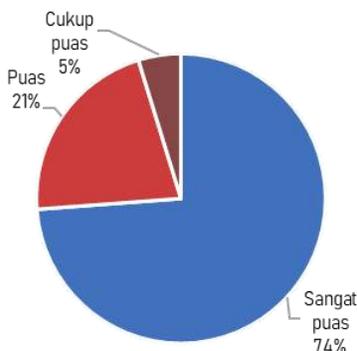


Berdasarkan gambar 3.11 di atas, terdapat 42 Kementerian/Lembaga (68,9%) yang pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sisanya sebanyak 19 Kementerian/Lembaga (31,1%) menjawab tidak pernah mengajukan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

Gambar 3.12

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden

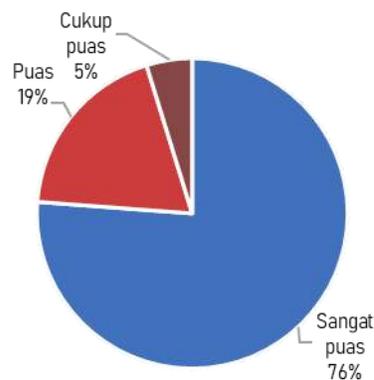


Berdasarkan gambar 3.12 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 31 responden (74%), sebanyak 9 responden (21%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet atas penyiapan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

Gambar 3.13

Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden

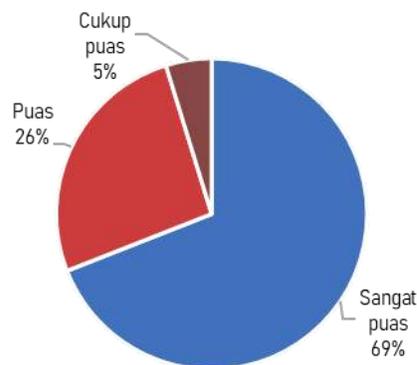


Berdasarkan gambar 3.13 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 32 responden (76%), sebanyak 8 responden (19%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga anda?

**Gambar 3.14**

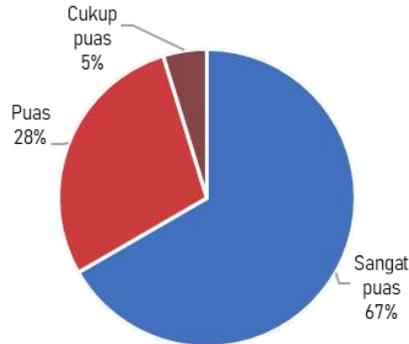
**Tingkat kepuasan terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga**



Berdasarkan gambar 3.14 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 29 responden (69%), sebanyak 11 responden (26%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kesesuaian substansi rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?

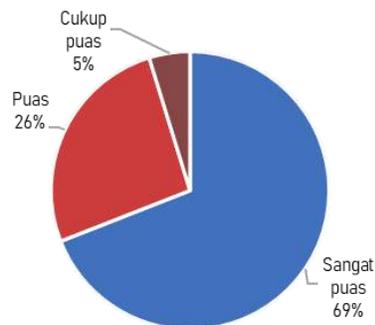
**Gambar 3.15**  
**Tingkat kepuasan terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi**  
**terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian /Lembaga**  
**di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga**  
**yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden**



Berdasarkan gambar 3.15 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (67%), sebanyak 12 responden (28%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kualitas komunikasi dan/atau koordinasi terkait dengan permohonan rencana kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Perekonomian dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet?

**Gambar 3.16**  
**Tingkat kepuasan terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga**  
**dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian**  
**yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet**



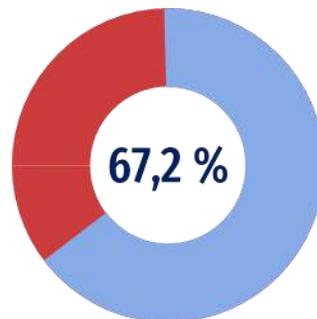
Berdasarkan gambar 3.16 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 29 responden (69%), sebanyak 11 responden (26,2%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap hasil rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang ditangani oleh Sekretariat Kabinet.

### 3. Rekomendasi Alternatif Penyelesaian Masalah

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 61 (enam puluh satu) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

Gambar 3.17

Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian

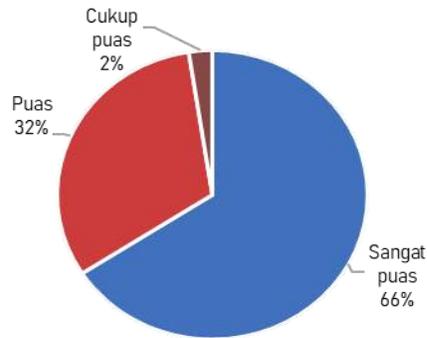


Berdasarkan gambar 3.17 di atas, terdapat 41 Kementerian/Lembaga (67,2%) yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian sisanya sebanyak 20 Kementerian/Lembaga (32,8%) menjawab tidak pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

**Gambar 3.18**

Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian

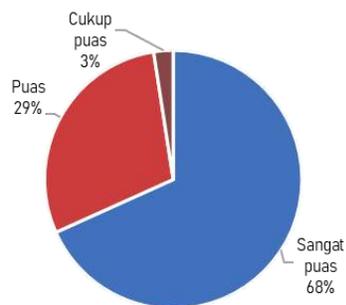


Berdasarkan gambar 3.18 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 27 responden (66%), sebanyak 13 responden (32%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

**Gambar 3.19**

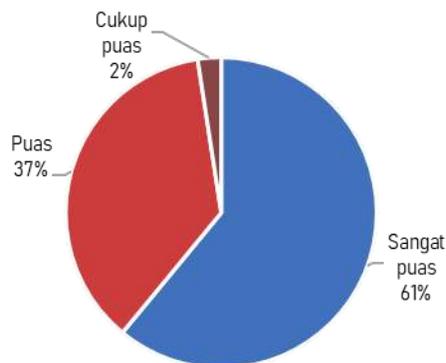
Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.19 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (68%), sebanyak 12 responden (29%) menyatakan puas, 1 responden (3%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

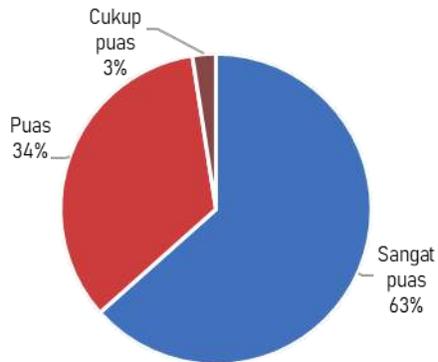
**Gambar 3.20**  
Tingkat kepuasan terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.20 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 25 responden (61%), sebanyak 15 responden (37%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap ketepatan rekomendasi atas pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

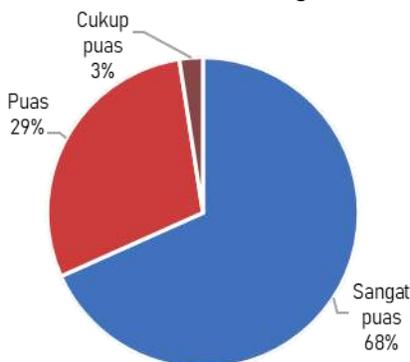
**Gambar 3.21**  
**Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian**



Berdasarkan gambar 3.21 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 26 responden (63%), sebanyak 14 responden (34%) menyatakan puas, 1 responden (3%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

- e) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian?

**Gambar 3.22**  
**Tingkat kepuasan terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian**

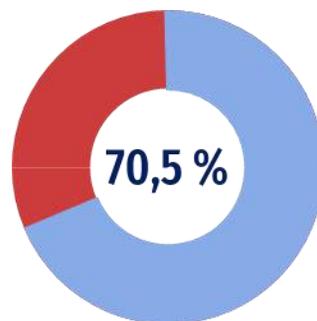


Berdasarkan gambar 3.22 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (68%), sebanyak 12 responden (29%) menyatakan puas, 1 responden (3%) menyatakan cukup puas dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil dari fasilitasi dalam membantu penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kebijakan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perekonomian.

#### 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian berdasarkan 61 (enam puluh satu) kuesioner yang telah diisi, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

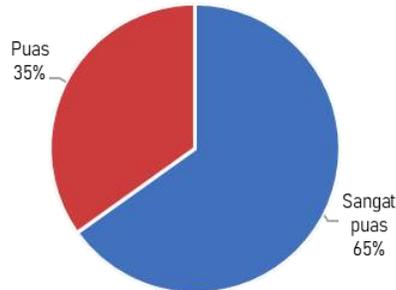
**Gambar 3.23**  
Kementerian/Lembaga yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.23 di atas, terdapat 43 Kementerian/Lembaga (70,5%) yang pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian, sisanya sebanyak 18 Kementerian/Lembaga (29,5%) menjawab tidak pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- a) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

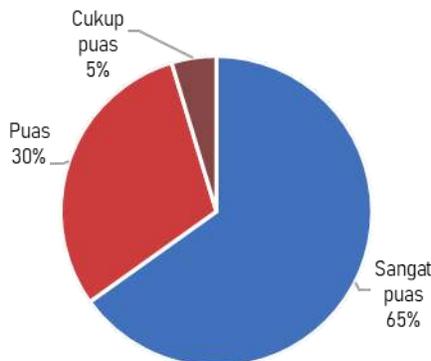
**Gambar 3.24**  
 Tingkat kepuasan terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.24 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (65%), sebanyak 15 responden (35%) menyatakan puas, dan tidak ada responden yang menyatakan cukup puas, kurang puas dan tidak puas terhadap komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelayanan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- b) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

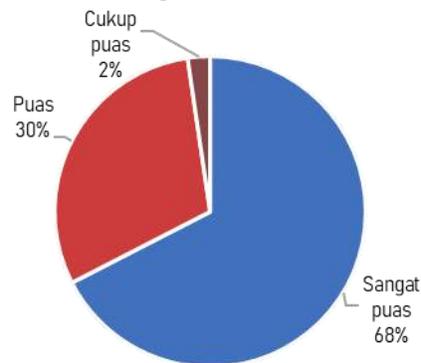
**Gambar 3.25**  
 Tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.25 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 28 responden (65%), sebanyak 13 responden (30%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- c) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

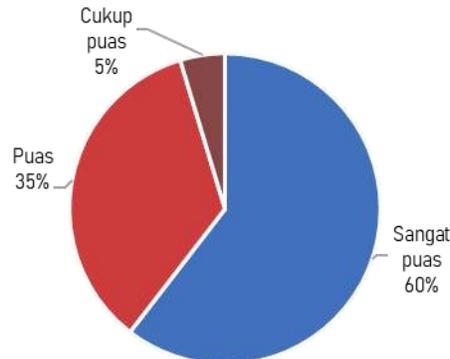
**Gambar 3.26**  
Tingkat kepuasan terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.26 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 29 responden (68%), sebanyak 13 responden (30%) menyatakan puas, 1 responden (2%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap ketepatan pelayanan atas fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

- d) Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian?

**Gambar 3.27**  
Tingkat kepuasan terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian



Berdasarkan gambar 3.27 di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memberikan penilaian sangat puas sebanyak 26 responden (60%), sebanyak 15 responden (35%) menyatakan puas, 2 responden (5%) menyatakan cukup puas, dan tidak ada responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian.

#### G. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020

Hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Kedeputian Bidang Perekonomian memperoleh nilai sebesar **80,47** dengan kategori **A (memuaskan)**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
Rincian Penilaian Manajemen Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020

No.	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	42,86	83,49%	35,78
2.	Pengukuran Kinerja	35,71	80,00%	28,57
3.	Pelaporan Kinerja	21,43	75,21%	16,12
<b>Total Capaian Kinerja</b>		<b>100,00</b>		<b>80,47</b>

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya Kedeputian Bidang Perekonomian telah dapat memenuhi sebagian besar unsur pada komponen/sub komponen evaluasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Kedeputian Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a) Ukuran keberhasilan tujuan (*outcome*)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
- b) Sasaran telah berorientasi hasil.

### **2. Pengukuran Kinerja**

- a) Sudah terdapat SOP pengumpulan data kinerja.
- b) Pengumpulan data kinerja telah dapat diandalkan.
- c) Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya.

### **3. Pelaporan Kinerja**

- a) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja unit kerja.
- b) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja telah dapat diandalkan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Dinamika Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa **capaian strategis tahun 2021 dapat dikategorikan memuaskan yaitu menghasilkan 496 rekomendasi dengan persentase capaian kinerja Tahun 2021 dengan target 91 % adalah 108.6%**. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Perekonomian dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop*, dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah terutama terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Meskipun pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2021 dapat dikategorikan memuaskan, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi berdasar peta risiko, yang dapat dilihat dari beberapa saran penyempurnaan belum ditindaklanjuti, seperti belum seluruhnya pegawai mendapat dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Realisasi kegiatan belum sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa penugasan yang sifatnya mendesak dan *urgent*, terutama berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19.
4. Terhambatnya akses terhadap sumber data yang diperlukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.

5. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, seperti alat pengolah data dan terbatasnya akses informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (buku, jurnal, majalah, dan koran).
6. Belum optimalnya dukungan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

## B. Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia.
2. Mendorong pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan Deputy Bidang Perekonomian dalam hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan peta risiko, seperti pemenuhan TIK
3. Mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian untuk mengatur pelaksanaan tugas baik yang sifatnya mendesak dan *urgent* dengan tugas yang direncanakan atau dijadwalkan (memprioritaskan yang bersifat tematik), dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan pelaksanaan tugas.
5. Mendorong pihak-pihak terkait untuk memastikan tersedianya SDM yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas dengan tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet bidang perekonomian.
6. Pembangunan sistem persuratan/agenda yang terintegrasi dari level/unit terendah hingga tertinggi yang dapat mempermudah penghitungan *output* dan *outcome*.
7. Peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas permasalahan kebijakan dan program pemerintah guna peningkatan pelaksanaan manajemen kabinet dengan mengundang Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk duduk bersama membahas isu-isu strategis yang muncul bersama dalam rapat dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden, dan membahas efektivitas (*progress*) tindak lanjut atas arahan presiden berbasis teknologi (SITAP).
8. Meningkatkan *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi diantaranya melalui: (i) peningkatan keterlibatan dalam membahas RPUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK); dan (ii) peningkatan

hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

9. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang telah terbangun agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjaring masukan dari user guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang telah terbangun agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjaring masukan dari user guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.  
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian Keamanan yang ditindaklanjuti	91 Persen

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	Rp2.159.793.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Rp1.440.207.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp500.000.000,-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp4.100.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET  
 2. PROGRAM : 02 - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden  
 3. SASARAN PROGRAM : I.Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi  
 : III. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi

KODE	SASARAN PROGRAM   INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
02.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi																
02.01.03	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IOP YANG DIMANFAATKAN</b>				<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>7</b>		
<b>CAPAIAN ISP 3 (ISP_1)</b>				<b>82%</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>	<b>73%</b>	<b>130%</b>	<b>88%</b>		
02.01.04	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IOP YANG DIMANFAATKAN</b>				<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>38</b>		
<b>CAPAIAN ISP 4 (ISP_2)</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
02.03	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi																
02.03.03	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IOP YANG DIMANFAATKAN</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		
<b>CAPAIAN ISP 3 (ISP_3)</b>				<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>117%</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>	<b>67%</b>	<b>29%</b>	<b>200%</b>	<b>150%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>		
02.03.04	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91	Persentase														
<b>CAPAIAN IOP YANG DIMANFAATKAN</b>				<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		
<b>CAPAIAN ISP 4 (ISP_4)</b>				<b>67%</b>	<b>89%</b>	<b>125%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>	<b>117%</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>	<b>120%</b>	<b>100%</b>	<b>129%</b>		

7. RINCIAN PROGRAM

KODE	SASARAN PROGRAM   OUTPUT PROGRAM   INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-													
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
02.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi																
02.01.01	Rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	152	Rekomendasi Kebijakan	11	13	15	13	11	18	13	14	15	10	12	7		
<b>CAPAIAN OUTPUT PROGRAM 1</b>				<b>17</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>46</b>		
02.01.01.03	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	116	Rekomendasi Kebijakan	9	11	11	10	9	13	10	10	11	9	8	5		
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 3 (IOP_1)</b>				<b>11</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		
02.01.01.04	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	36	Rekomendasi Kebijakan	2	2	4	3	2	5	3	4	4	1	4	2		
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 4 (IOP_2)</b>				<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>38</b>		
02.03	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi																
02.03.01	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	85	Rekomendasi Kebijakan	7	9	8	5	5	6	8	11	7	7	4	8		
<b>CAPAIAN OUTPUT PROGRAM 3</b>				<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>14</b>		
02.03.01.03	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	51	Rekomendasi Kebijakan	5	6	5	2	3	2	5	7	4	4	3	5		
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 3 (IOP_3)</b>				<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		
02.03.01.04	Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.	34	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	3	2	4	3	4	3	3	1	3		
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 4 (IOP_4)</b>				<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
1	M.0001/Ekon/01/2021	4-Jan-2021	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0002/Seskab/01/2021	4-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	4-Jan-21	OutcomeIKK_1
2	M.0002/Ekon/01/2021	05-Jan-21	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0007/Seskab/01/2021	05-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	5-Jan-21	OutcomeIKK_4
3	M.0003/Ekon/01/2021	06-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN 2021	Presiden	ditandatangani	M.0012/Seskab/01/2021	06-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	6-Jan-21	OutcomeIKK_1
4	M.0007/Ekon/01/2021	08-Jan-21	Permohonan Ketua Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat Mengatasi PHK Massal dan Penutupan Pabrik Garmen Jawa Barat	KL	ditandatangani	B.0006/Seskab/Ekon/01/2021	11-Jan-21	sudah diteruskan kepada Menteri Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti permasalahan dimaksud sesuai ketentuan peraturan	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	11-Jan-21	OutcomeIKK_3
5	M.0008/Ekon/01/2021	08-Jan-21	Usulan Agenda Rapat Terbatas (RATAS) mengenai Rencana Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2020-2024	Presiden	ditandatangani	M.0022/Seskab/01/2021	11-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	11-Jan-21	OutcomeIKK_1
6	M.0009/Ekon/01/2021	11-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Mengenai Mengenai Mengenai Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Vaksinasi	Presiden	ditandatangani	M.0023/Seskab/01/2021	11-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	11-Jan-21	OutcomeIKK_1
7	M.0012/Ekon/01/2021	11-Jan-21	Penyampaian Surat Menteri Keuangan Perihal Permintaan Persetujuan Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan	Deputi	ditandatangani	M.0035/Seskab/01/2021	18-Jan-21	Melalui Deputi PMK ke Seskab M.0013/PMK/01/2021 15-01-2021	Deputi-Deputi lain-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-Jan-21	OutcomeIKK_2
8	M.0013/Ekon/01/2021	12-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Intern Mengenai Sovereign Wealth Fund, Investasi dan Peningkatan Ekspor	Presiden	ditandatangani	M.0027/Seskab/01/2021	12-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	12-Jan-21	OutcomeIKK_1
9	M.0016/Ekon/01/2021	15-Jan-21	Permasalahan Impor dan Kelangkaan Kedelai bagi Pengrajin Tahu dan Tempe	KL	ditandatangani	B.0014/Seskab/Ekon/01/2021	19-Jan-21	Sampai saat ini, surat tersebut sedang dalam proses kajian dan telaah oleh Deputi Kemenko Perekonomian.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	19-Jan-21	OutcomeIKK_3
10	M.0018/Ekon/01/2021	19-Jan-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0040/Seskab/01/2021	19-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	19-Jan-21	OutcomeIKK_2
11	M.0021/Ekon/01/2021	21-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0042/Seskab/01/2021	21-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Jan-21	OutcomeIKK_1
12	M.0022/Ekon/01/2021	21-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Mengenai Peningkatan Ekspor	Presiden	ditandatangani	M.0041/Seskab/01/2021	21-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Jan-21	OutcomeIKK_1
13	M.0023/Ekon/01/2021	22-Jan-21	Permohonan Peninjauan Kembali atas Kebijakan Tarif Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Produk Turunan Kelapa Sawit	Presiden	ditandatangani	M.0049/Seskab/01/2021	25-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	25-Jan-21	OutcomeIKK_1
14	M.0024/Ekon/01/2021	22-Jan-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0050/Seskab/01/2021	25-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Jan-21	OutcomeIKK_2
15	M.0026/Ekon/01/2021	25-Jan-21	Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0057/Seskab/01/2021	25-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Jan-21	OutcomeIKK_2
16	M.0027/Ekon/01/2021	26-Jan-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Mengenai Perkembangan Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja	Presiden	ditandatangani	M.0060/Seskab/01/2021	26-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	26-Jan-21	OutcomeIKK_1
17	M.0029/Ekon/01/2021	27-Jan-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0065/Seskab/01/2021	27-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Jan-21	OutcomeIKK_2
18	M.0030/Ekon/01/2021	28-Jan-21	Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Reformulasi Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi	Presiden	ditandatangani	M.0067/Seskab/01/2021	28-Jan-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	28-Jan-21	OutcomeIKK_4
19	M.0032/Ekon/01/2021	29-Jan-21	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 s.d 21 Januari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0069/Seskab/02/2021	01-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	1-Feb-21	OutcomeIKK_1
20	M.0033/Ekon/01/2021	29-Jan-21	Permohonan Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Perkembangan Program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	KL	ditandatangani	B.0031/Seskab/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Menteri PUPR telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat kepada Presiden dengan surat Nomor. PR.0303-Mn/243, tanggal 15 Februari 2021	Deputi-Seskab-K/L	IOP_4	ISP_4	1-Feb-21	OutcomeIKK_4
21	M.0034/Ekon/01/2021	29-Jan-21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	KL	ditandatangani	B.0030/Seskab/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Berkas RPerpres sedang dalam proses kajian oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sebelum diparaf oleh Menko Marves.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_1	ISP_1	1-Feb-21	OutcomeIKK_1
22	M.0037/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0072/Seskab/02/2021	02-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	2-Feb-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
23	M.0038/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Siborongborong dan Pasar Rakyat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara	KL	ditandatangani	B.0032/Seskab/Ekon/02/2021	01-Feb-21	1. Kementerian Perdagangan telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR; 2. Saat ini akan dilakukan justifikasi (survey lapangan) bersama KemenPUPR/Balai PUPR di daerah.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_4	ISP_4	1-Feb-21	OutcomeIKK_4
24	M.0040/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0075/Seskab/02/2021	02-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	2-Feb-21	OutcomeIKK_1
25	M.0041/Ekon/02/2021	01-Feb-21	1. Laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Capaian TPB/SDGs 2019; 2. Permohonan Agenda RATAS TPB/SDGs dan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia	Presiden	ditandatangani	M.0076/Seskab/02/2021	02-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	2-Feb-21	OutcomeIKK_1
26	M.0042/Ekon/02/2021	02-Feb-21	Penyampaian Butir Wicara Presiden pada Rapat Internal mengenai Tindak Lanjut Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	Presiden	ditandatangani	M.0078/Seskab/02/2021	02-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	2-Feb-21	OutcomeIKK_1
27	M.0043/Ekon/02/2021	02-Feb-21	Penyampaian Realisasi Investasi Januari-Desember 2020	Presiden	ditandatangani	M.0082/Seskab/02/2021	02-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	2-Feb-21	OutcomeIKK_4
28	M.0050/Ekon/02/2021	04-Feb-21	Permohonan Bantuan Dana untuk Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kuningan	KL	ditandatangani	B.0036/Seskab/Ekon/02/2021	08-Feb-21	Telah ditindaklanjuti dengan koordinasi langsung antara Kementerian PUPR dengan Bupati Kabupaten Kuningan	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	8-Feb-21	OutcomeIKK_3
29	M.0051/Ekon/02/2021	04-Feb-21	Laporan Hasil Pertemuan Menteri Keuangan G20 (G20 Finance Ministers Meeting/FMM), 20 November 2020	Presiden	ditandatangani	M.0092/Seskab/02/2021	05-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	5-Feb-21	OutcomeIKK_4
30	M.0052/Ekon/02/2021	04-Feb-21	Penyampaian Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Januari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0091/Seskab/02/2021	04-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	4-Feb-21	OutcomeIKK_1
31	M.0053/Ekon/02/2021	04-Feb-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0090/Seskab/02/2021	05-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	5-Feb-21	OutcomeIKK_2
32	M.0056/Ekon/02/2021	05-Feb-21	Laporan Penerusan Surat Wakil Menteri Perdagangan terkait Hasil Pertemuan Trade Policy Review Indonesia ke-7 di World Trade Organization dan Pertemuan Bilateral di Swiss	Presiden	ditandatangani	M.0097/Seskab/02/2021	08-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	8-Feb-21	OutcomeIKK_4
33	M.0057/Ekon/02/2021	05-Feb-21	Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern BPKP Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0096/Seskab/02/2021	08-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Feb-21	OutcomeIKK_1
34	M.0058/Ekon/02/2021	08-Feb-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Februari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0103/Seskab/02/2021	09-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	9-Feb-21	OutcomeIKK_4
35	M.0059/Ekon/02/2021	09-Feb-21	Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Program Padat Karya	Presiden	ditandatangani	M.0102/Seskab/02/2021	09-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Feb-21	OutcomeIKK_1
36	M.0060/Ekon/02/2021	11-Feb-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Mobil dan Mobil Listrik	Presiden	ditandatangani	M.0110/Seskab/02/2021	11-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	11-Feb-21	OutcomeIKK_1
37	M.0061/Ekon/02/2021	15-Feb-21	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020	Presiden	ditandatangani	M.0112/Seskab/02/2021	16-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	16-Feb-21	OutcomeIKK_4
38	M.0066/Ekon/02/2021	15-Feb-21	Laporan Rapat Koordinasi tentang Proses Pengembangan Vaksin Merah Putih	KL	ditandatangani	B.0046/Seskab/Ekon/02/2021	16-Feb-21	1. Surat tersebut telah diterima oleh Kemenko Perekonomian dan sedang dalam proses kajian/telaah Deputi bersangkutan. 2. Kemenko Perekonomian selanjutnya telah menyelenggarakan Konsiyering Penyusunan Rencana Distribusi Vaksin dan Sasaran Vaksinasi Dengan Ketersediaan Cold Chain pada tanggal 23-24 Februari 2021 di Bandung.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_4	ISP_4	16-Feb-21	OutcomeIKK_4
39	M.0068/Ekon/02/2021	16-Feb-21	Permohonan Penyelenggaraan Rapat Internal Pemindahan Ibu Kota Negara	Presiden	ditandatangani	M.0116/Seskab/02/2021	17-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	17-Feb-21	OutcomeIKK_1
40	M.0069/Ekon/02/2021	18-Feb-21	Laporan Kinerja Pembangunan Industri Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0117/Seskab/02/2021	18-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	18-Feb-21	OutcomeIKK_1
41	M.0071/Ekon/02/2021	18-Feb-21	Laporan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PT. Aneka Gas Industri Tbk.	KL	ditandatangani	B.0049/Seskab/Ekon/02/2021	18-Feb-21	Sehubungan dengan telah diundangkannya PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, saat ini Menteri Perdagangan tengah dalam proses penindaklanjutan terhadap kesepakatan rapat sebagaimana dimuat dalam surat	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	18-Feb-21	OutcomeIKK_3
42	M.0074/Ekon/02/2021	23-Feb-21	Permohonan Sidang Kabinet tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Ketersediaan Anggaran Tahun 2022	Presiden	ditandatangani	M.0123/Seskab/02/2021	23-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	23-Feb-21	OutcomeIKK_1
43	M.0075/Ekon/02/2021	24-Feb-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara	Presiden	ditandatangani	M.0124/Seskab/02/2021	24-Feb-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	24-Feb-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
44	M.0079/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet Nomor : B.0345/SESKAB/Ekon/ 11/2020 Tanggal 10 November 2020 perihal Optimalisasi Strategi Komunikasi Pemerintah terkait Bantuan Presiden kepada Pelaku Usaha Mikro.	KL	ditandatangani	B.0086/Ekon/03/2021	01-Mar-21	Telah diajukan revisi Peraturan Menteri Koperasi oleh Kementerian Koperasi Nomor 14/M.KUKM/III/2021	Deputi-Seskab-K/L	IOP_4	ISP_4	1-Mar-21	OutcomeIKK_4
45	M.0080/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 s.d 18 Februari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0133/Seskab/03/2021	01-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	1-Mar-21	OutcomeIKK_4
46	M.0082/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Penyampaian Tulisan tentang 2034 Indonesia Sumber Pangan Asia Tenggara	KL	ditandatangani	B.0057/Seskab/Ekon/03/2021	01-Mar-21	RPerpres sudah ditetapkan dalam Perpres 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	1-Mar-21	OutcomeIKK_3
47	M.0083/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Laporan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Presiden	ditandatangani	M.0134/Seskab/03/2021	01-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	1-Mar-21	OutcomeIKK_1
48	M.0084/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Usulan Pertambahan Anggaran untuk Dialokasikan dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara	Presiden	-Tapanuli Utara sdh terlalu sering meminta; tidak prioritas	M.0132/Seskab/03/2021	01-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	1-Mar-21	OutcomeIKK_3
49	M.0085/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Permohonan Presiden untuk Membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021	Presiden	ditandatangani	M.0135/Seskab/03/2021	01-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	1-Mar-21	OutcomeIKK_1
50	B.0014/Ekon/01/2021	28-Jan-21	Penyampaian Masukan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	KL	masukn Setkab telah masuk dalam Perpres yang sedang menunggu paraf Setneg	-	-	Sampai saat ini, surat tersebut sedang dalam proses kajian dan telaah oleh Deputi Kemenko Perekonomian.	Deputi-K/L	IOP_3	ISP_3	28-Jan-21	OutcomeIKK_3
51	B.0041/Ekon/01/2021	29-Jan-21	RPermentan tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau	KL	ditandatangani	-	-	Kementan tidak melanjutkan proses harmonisasi rpermentan dimaksud karena sesuai rekomendasi setkab dalam surat dimaksud bahwa untuk rekomendasi teknis impor tembakau sesuai pp 5/2021 merupakan perizinan penunjang non kbli sehingga pengaturannya dilakukan di Rpermentan standar berusaha sektor pertanian	Deputi-K/L	IOP_2	ISP_2	29-Jan-21	OutcomeIKK_2
52	B.0082/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Persetujuan atas Hasil Rapat Tim Pengarah Program Compact-2 Tanggal 17 Februari 2021	KL	ditandatangani	-	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.5/M.PPN/HK/01/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporation dan Asdep Ekonomi Makro telah dimasukkan sebagai anggota tim pelaksana	Deputi-K/L	IOP_1	ISP_1	26-Feb-21	OutcomeIKK_1
53	M.0087/Ekon/03/2021	02-Mar-21	Laporan Penerbitan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik	KL	ditandatangani	B.0059/Seskab/Ekon/03/2021	03-Mar-21	1. Dalam surat agar diingatkan kembali kepada Menteri ATR, bahwa Permen 1 tidak dimintakan kembali persetujuan Presiden sesuai surat seskab, dan selanjutnya untuk tetap meminta persetujuan kepada Presiden atas RPermen sebelum dittd. 2. dalam rekomendasi, agar ditambahkan bahwa sertifikat elektronik tidak menutup hak warga masyarakat untuk tetap mendapatkan buku sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	3-Mar-21	OutcomeIKK_3
54	M.0088/Ekon/03/2021	02-Mar-21	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025	Presiden	ditandatangani	M.00144/Seskab/03/2021	03-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-Mar-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
55	M.0089/Ekon/03/2021	02-Mar-21	Permohonan Audiensi Kepada Sekretaris Kabinet terkait Kasus Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera	KL	ditandatangani	B.0058/Seskab/Ekon/03/2021	03-Mar-21	Surat selain menyampaikan perolehan AJB Bumiputera, juga meminta audiensi kepada seskab. pertanyaannya, perlu tidak seskab menerima audiensi atau tidak? alasan? apabila tidak perlu menerima, respon apa yg perlu dilakukan seskab? meneruskan surat kepada K/L terkait atau bagaimana?	Deputi-Seskab-K/L	IOP_1	ISP_1	3-Mar-21	OutcomeKK_1
56	M.0090/Ekon/03/2021	02-Mar-21	Briefing Sheet dan Infografis SKP mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM_PPKF) Tahun 2022	Presiden	ditandatangani	M.00143/Seskab/03/2021	03-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-Mar-21	OutcomeKK_1
57	M.0091/Ekon/03/2021	03-Mar-21	Permohonan Kesediaan Presiden Memberikan Arahan pada Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Tahun 2021 (secara daring, 8 Maret 2021)	Presiden	ditandatangani	M.00146/Seskab/03/2022	03-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-Mar-21	OutcomeKK_1
58	M.0094/Ekon/03/2021	04-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	KL	ditandatangani	B.0062/Seskab/Ekon/03/2021	04-Mar-21	Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.09) yang telah berlaku mulai tanggal 15 Maret 2021.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_2	ISP_2	4-Mar-21	OutcomeKK_2
59	M.0096/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Mengenai Rencana Pembentukan Holding Danareksa-Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Presiden	ditandatangani	M.0158/Seskab/03/2021	08-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Mar-21	OutcomeKK_1
60	M.0097/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Mengenai Rencana Penggabungan BUMN Pelabuhan	Presiden	ditandatangani	M.0160/Seskab/03/2021	09-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Mar-21	OutcomeKK_1
61	M.0098/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Maret 2021	Presiden	ditandatangani	M.0162/Seskab/03/2021	09-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	9-Mar-21	OutcomeKK_4
62	M.0099/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Penyampaian Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Februari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0161/Seskab/03/2021	09-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	9-Mar-21	OutcomeKK_4
63	M.00100/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Kebijakan Ekspor (Mineral dan Batubara)	KL	ditandatangani	B.0068/Seskab/Ekon/03/2021	09-Mar-21	Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen untuk menindaklanjuti hal dimaksud	Deputi-Seskab-K/L	IOP_1	ISP_1	9-Mar-21	OutcomeKK_1
64	M.00101/Ekon/03/2021	09-Mar-21	Laporan Perkembangan Persiapan Partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai, Persatuan Emirat Arab	Presiden	ditandatangani	M.0164/Seskab/03/2021	09-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	9-Mar-21	OutcomeKK_4
65	M.00102/Ekon/03/2021	09-Mar-21	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0168/Seskab/03/2021	10-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	10-Mar-21	OutcomeKK_4
66	M.00103/Ekon/03/2021	10-Mar-21	Laporan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Presiden	ditandatangani	M.0171/Seskab/03/2021	10-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	10-Mar-21	OutcomeKK_4
67	M.00104/Ekon/03/2021	10-Mar-21	Klarifikasi atas Laporan Masyarakat Mengenai Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Penempatan Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan	Presiden	ditandatangani	M.0170/Seskab/03/2021	10-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	10-Mar-21	OutcomeKK_1
68	M.00105/Ekon/03/2021	10-Mar-21	Laporan Pelaksanaan Program Nasional Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier melalui Konsep Single Management Irrigation (SMI)	Presiden	ditandatangani	M.0169/Seskab/03/2021	10-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	10-Mar-21	OutcomeKK_4
69	M.00106/Ekon/03/2021	10-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Presiden Dengan Ketua Umum dan Para Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Seskab	(Bahan sdh digunakan)	-	-	Tidak ada penolakan		IOP_1	ISP_1	10-Mar-21	OutcomeKK_1
70	M.00107/Ekon/03/2021	15-Mar-21	Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0175/Seskab/03/2021	16-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	16-Mar-21	OutcomeKK_3
71	M.00108/Ekon/03/2021	15-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus	KL	ditandatangani	M.0178/Seskab/03/2021	16-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	16-Mar-21	OutcomeKK_2
72	M.00109/Ekon/03/2021	17-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Konsolidasi Ekonomi Antisipasi Gejolak Ekonomi Global	Presiden	ditandatangani	M.0181/Seskab/03/2021	17-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	17-Mar-21	OutcomeKK_1
73	M.00111/Ekon/03/2021	17-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Presiden	ditandatangani	M.0183/Seskab/03/2021	17-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Mar-21	OutcomeKK_2
74	M.00112/Ekon/03/2021	17-Mar-21	Laporan Perkembangan Food Estate Kabupaten Sumba Tengah	Presiden	ditandatangani	M.0184/Seskab/03/2021	17-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	17-Mar-21	OutcomeKK_3
75	M.00113/Ekon/03/2021	19-Mar-21	Laporan Hasil Rapat Kesiapan Pembentukan Badan Pangan Nasional	KL	ditandatangani	B.0082/Seskab/Ekon/3/2021,	22-Mar-21	Surat tersebut sedang dalam proses kajian/telaah oleh Kemenko Bidang Perekonomian	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	22-Mar-21	OutcomeKK_3
76	M.00115/Ekon/03/2021	19-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	presiden	ditandatangani	M.0195/Seskab/03/2021	22-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Mar-21	OutcomeKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
77	M.00116/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Penyampaian Konsep Surat Sekretaris Kabinet sebagai Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Intern Program Padat Karya	KL	ditandatangani	B.0084/Seskab/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Menteri Keuangan telah menerima surat permohonan Sekretaris Kabinet dan masih diproses lebih lanjut di Direktorat teknis yang menangani hal tersebut di bawah koordinasi Direktur Jenderal Perbendaharaan	Deputi-Seskab-K/L	IOP_1	ISP_1	22-Mar-21	OutcomeIKK_1
78	M.00118/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Permohonan Penetapan Kabupaten Paniai Sebagai Daerah Penghasil atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dalam APBN Perubahan 2021	Presiden	ditandatangani	M.0196/Seskab/03/2021	22-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22-Mar-21	OutcomeIKK_3
79	M.00122/Ekon/03/2021	23-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Hilirisasi Ekonomi Digital (Istana Merdeka, 23 Maret 2021)	Presiden	ditandatangani	M.0197/Seskab/03/2021	23-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	23-Mar-21	OutcomeIKK_1
80	M.00128/Ekon/03/2021	24-Mar-21	Laporan The 8th Ministerial Meeting of the Council of Palm Oil Producing Countries (8th MM of CPOPC) dan The CPOPC Chief Executive Officer (CEO) Forum pada Tanggal 26 Februari 2021	Presiden	ditandatangani	M.0200/Seskab/03/2021	24-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	24-Mar-21	OutcomeIKK_1
81	Softcopy bahan telah diteruskan ke Dep PMK dan dimuat dalam BS ke Presiden. Monitor hasil Ratas.	26-Mar-21	Masukan Briefing Sheet (BS) Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet mengenai Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi	Presiden	ditandatangani	M.0205/Seskab/03/2021	26-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	26-Mar-21	OutcomeIKK_1
82	M.00129/Ekon/03/2021	26-Mar-21	Percepatan Penyelesaian 13 Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan	KL	ditandatangani	B.0090/Seskab/Ekon/03/2021	26-Mar-21	rapat antar K/L untuk pembahasan isu terkait TKD, yang salah satunya penghambat pembangunan Bendungan oleh Kemenko EKON pada tanggal 4 Mei 2021	Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	ISP_3	4-May-21	OutcomeIKK_3
83	M.00130/Ekon/03/2021	26-Mar-21	Laporan Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2021	Presiden	ditandatangani	M.0209/Seskab/03/2021	29-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Mar-21	OutcomeIKK_1
84	M.0134/Ekon/03/2021	29-Mar-21	Permohonan Koordinator Rumah Pekerja Migran Indonesia kepada Presiden untuk Menyampaikan Aspirasi Mengenai Urgensi Pembukaan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan dan Korea Selatan	KL	ditandatangani	B.0091/Seskab/Ekon/03/2021	29-Mar-21	Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan pihak Taiwan yaitu Ministry of the Interior (Mol) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia (TETO) pada hari Kamis 8 April 2021. Pertemuan tersebut Taiwan memberikan penegasan (klarifikasi) bahwa penundaan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan karena alasan covid-19 bukan karena hal lainnya.	Deputi-Seskab-K/L	IOP_4	ISP_4	29-Mar-21	OutcomeIKK_4
85	M.00135/Ekon/03/2021	29-Mar-21	Penyampaian Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 s.d 18 Maret 2021	presiden	ditandatangani	M.0215/Seskab/03/2021	29-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Mar-21	OutcomeIKK_1
86	M.00137/Ekon/03/2021	30-Mar-21	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia	Presiden	ditandatangani	M.0216/Seskab/03/2021	30-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Mar-21	OutcomeIKK_1
87	M.00138/Ekon/03/2021	30-Mar-21	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian ke Jepang, pada tanggal 9-12 Maret 2021	Presiden	ditandatangani	M.0224/Seskab/03/2021	31-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	31-Mar-21	OutcomeIKK_1
88	M.00139/Ekon/03/2021	30-Mar-21	Permohonan Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan	Presiden	ditandatangani	M.0225/Seskab/03/2021	31-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	31-Mar-21	OutcomeIKK_4
89	M.00141/Ekon/03/2021	30-Mar-21	Laporan Rencana Aksi EODB 2022	Presiden	ditandatangani	M.0223/Seskab/03/2021	31-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	31-Mar-21	OutcomeIKK_1
90	M.00142/Ekon/03/2021	31-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Rancangan Kebijakan Penerimaan Negara dan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	Presiden	ditandatangani	M.0228/Seskab/03/2021	31-Mar-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	31-Mar-21	OutcomeIKK_1
91	B.0104/Ekon/03/2021	09-Mar-21	Tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor dan Importir Yang Bereputasi Baik (IKK 4 - TUSI 4)	KL	-	-	-	telah diajukan persetujuan Rpermendag tersebut ke presiden	Deputi-K/L	IOP_2	ISP_2	9-Mar-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
92	B.0125/Ekon/03/2021	16-Mar-21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	KL	-	-	-	Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi telah menyampaikan paraf persetujuan RPerpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui surat B-1319/MENKO/MARVES/HK.01.02/III/2021. Sementara Kementerian LHK masih dalam proses telaah/kajian.	Deputi-K/L	IOP_1	ISP_1	16-Mar-21	OutcomeKK_1
93	B.0142/Ekon/03/2021	26-Mar-21	Tanggapan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas	KL	-	-	-	Masih dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian	Deputi-K/L	IOP_1	ISP_1	26-Mar-21	OutcomeKK_1
94	M.0006/Ekon/01/2021	08-Jan-21	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Peninjauan Lokasi Proyek Jembatan Batam-Bintan	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	8-Jan-21	OutcomeKTJ_9
95	M.0017/Ekon/01/2021	15-Jan-21	Pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Pangan Pokok	Seskab	tindaklanjuti				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	15-Jan-21	OutcomeKTJ_9
96	M.0019/Ekon/01/2021	20-Jan-21	Permohonan Sidang Kabinet tentang Pembahasan RUU mengenai Sektor Keuangan dan Persiapan KTT G20	Seskab	-Sdh diusulkan -Noted				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Jan-21	OutcomeKTJ_9
97	M.0020/Ekon/01/2021	20-Jan-21	Penyampaian Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Tentang Kelanjutan Kerja Sama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing) tanggal 6 Juli 2020	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Jan-21	OutcomeKTJ_9
98	M.0025/Ekon/01/2021	25-Jan-21	Laporan Virtual Launching Indonesia's Investment Policy Review 2020	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	25-Jan-21	OutcomeKTJ_9
99	M.0039/Ekon/02/2021	01-Feb-21	Laporan Hasil Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tingkat Eselon I dan/atau Setara Eselon I, 28 Januari 2021	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	1-Feb-21	OutcomeKTJ_9
100	M.0045/Ekon/02/2021	03-Feb-21	Laporan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional Kuartal Keempat Tahun 2020	Seskab	monitoring implementasinya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	3-Feb-21	OutcomeKTJ_9
101	M.0049/Ekon/02/2021	04-Feb-21	Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 (Triwulan IV Tahun 2020)	Seskab	monitoring implementasinya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	4-Feb-21	OutcomeKTJ_9
102	M.0055/Ekon/02/2021	05-Feb-21	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	5-Feb-21	OutcomeKTJ_9
103	M.0064/Ekon/02/2021	15-Feb-21	Permohonan Waktu Rapat Terbatas Terkait Permasalahan PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero)	Seskab	Setuju Ratas, usulkan				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	15-Feb-21	OutcomeKTJ_9
104	M.0065/Ekon/02/2021	15-Feb-21	Penawaran Skema Investasi dari Permintara Yodi Tama US Corporation	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	15-Feb-21	OutcomeKTJ_9
105	M.0067/Ekon/02/2021	17-Feb-21	Penyampaian Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Semester I Tahun 2021	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	17-Feb-21	OutcomeKTJ_9
106	M.0070/Ekon/02/2021	18-Feb-21	Keagenan Gas LPG 3 Kg untuk Gakoptindo	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	18-Feb-21	OutcomeKTJ_9
107	M.0076/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Laporan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Tindak Lanjut Hasil Rakor Tingkat Menteri terkait Persiapan Presidensi G20 di Indonesia	Seskab	-Monitor implementasinya, - Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Feb-21	OutcomeKTJ_9
108	M.0077/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Penerusan Surat Persetujuan Rancangan Instruksi Presiden Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Feb-21	OutcomeKTJ_9
109	M.0078/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Penyampaian Hasil Rapat Berkala I 2021 Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Feb-21	OutcomeKTJ_9
110	M.0081/Ekon/02/2021	26-Feb-21	Laporan atas Penyampaian Usulan GAPKI terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja	Seskab	Monitor Implementasinya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Feb-21	OutcomeKTJ_9
111	M.0086/Ekon/03/2021	01-Mar-21	Laporan Rapat Komite Cipta Kerja terkait Pembahasan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2021, pada tanggal 19 Februari 2021	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	1-Mar-21	OutcomeKTJ_9
112	M.0095/Ekon/03/2021	08-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Tahun 2021	Seskab	(sdh digunakan)				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	8-Mar-21	OutcomeKTJ_9
113	M.00110/Ekon/03/2021	17-Mar-21	Penyampaian Briefing Sheet dalam rangka Acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 di Istana Negara, Tanggal 17 Maret 2021	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	17-Mar-21	OutcomeKTJ_9
114	M.00117/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Permohonan Audiensi PT. Siemens Indonesia kepada Sekretaris Kabinet	Seskab	Jadwalkan				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Mar-21	OutcomeKTJ_9
115	M.00119/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Permohonan Persetujuan Pembentukan KEK Gresik dan KEK Lido, serta Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KEK Gresik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KEK Lido	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Mar-21	OutcomeKTJ_9
116	M.00120/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Masukan atas Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Mar-21	OutcomeKTJ_9

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
117	M.00121/Ekon/03/2021	22-Mar-21	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Mar-21	OutcomeKTJ_9
118	M.00124/Ekon/03/2021	24-Mar-21	Laporan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	24-Mar-21	OutcomeKTJ_9
119	M.00126/Ekon/03/2021	24-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	24-Mar-21	OutcomeKTJ_9
120	M.00127/Ekon/03/2021	24-Mar-21	Penundaan Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Kepala Badan BKPM	seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	24-Mar-21	OutcomeKTJ_9
121	M.00131/Ekon/03/2021	26-Mar-21	Permohonan Kesediaan Wakil Presiden untuk Membuka Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion)	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Mar-21	OutcomeKTJ_9
122	M.00133/Ekon/03/2021	29-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	29-Mar-21	OutcomeKTJ_9
123	M.00136/Ekon/03/2021	29-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pertanian	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	29-Mar-21	OutcomeKTJ_9
124	M.00140/Ekon/03/2021	30-Mar-21	Laporan Rapat Pembahasan Besaran Tarif Cukai Spesifik untuk Produk Rokok Elektrik (IQOS HEETS)	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	30-Mar-21	OutcomeKTJ_9
125	M.00143/Ekon/03/2021	31-Mar-21	Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan President Director & CEO PT. Siemens Indonesia	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	31-Mar-21	OutcomeKTJ_9
126	M.00144/Ekon/03/2021	31-Mar-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	31-Mar-21	OutcomeKTJ_9
127	M.0146/Ekon/04/2021	01-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	dispo waseskab kirim	M.0232/Seskab/04/2021	02-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	2-Apr-21	OutcomeKK_2
128	M.0147/Ekon/04/2021	01-Apr-21	Laporan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Hannover Messe 2021	Seskab	noted --> rapat terbatas senin 5-4-2021	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	2-Apr-21	OutcomeKTJ_9
129	M.0148/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Tentang Peningkatan Porsi Kredit Perbankan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil	Presiden	ditandatangani	M.0243/Seskab/04/2021	06-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	6-Apr-21	OutcomeKK_1
130	M.0149/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Tentang Persiapan Penyelenggaraan Hannover Messe	Presiden	ditandatangani	M.0242/Seskab/04/2021	06-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	6-Apr-21	OutcomeKK_1
131	M.0150/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Perkembangan Ekonomi Terkini April 2021	Presiden	ditandatangani	M.0236/Seskab/04/2021	05-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	5-Apr-21	OutcomeKK_1
132	M.0151/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020	Presiden	ditandatangani	M.0235/Seskab/04/2021	05-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	5-Apr-21	OutcomeKK_2
133	M.0152/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Pengaktifan Kembali/Pembentukan Dewan Penunjang Ekspor	KL	ditandatangani	B.0102/Seskab/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengadakan Rapat Koordinasi Perumusan Pembentukan Dewan Penunjang Ekspor pada tanggal 13 April 2021	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	13-Apr-21	OutcomeKK_1
134	M.0153/Ekon/04/2021	05-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Presiden	ditandatangani	M.0238/Seskab/04/2021	05-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	5-Apr-21	OutcomeKK_2
135	M.0154/Ekon/04/2021	06-Apr-21	Penyampaian Tindak Lanjut Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.304/Seskab/Ekon/9/2020 Tentang Penyelesaian NSPK Proses Pemberitahuan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Melalui Sistem SSm Pengangkut	Seskab	monitor tindaklanjutnya	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	6-Apr-21	OutcomeKTJ_9
136	M.0155/Ekon/04/2021	06-Apr-21	Permohonan Partisipasi Indonesia Pada Expo 2025 Osaka, Jepang	Presiden	ditandatangani	M.0251/Seskab/04/2021	06-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	6-Apr-21	OutcomeKK_1
137	M.0156/Ekon/04/2021	06-Apr-21	Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	KL	ditandatangani	B.0106/Seskab/Ekon/04/2021	06-Apr-21	telah dilaksanakan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	6-Apr-21	OutcomeKK_3

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
138	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
139	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
140	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
141	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
142	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
143	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
144	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2
145	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
146	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeKK_2
147	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeKK_2
148	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeKK_2
149	M.0157/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RPermendag tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)	Presiden	ditandatangani	M.0254/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeKK_2
150	M.0158/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pertanian	Presiden	ditandatangani	M.0253/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Apr-21	OutcomeKK_2
151	M.0159/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Penyampaian Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Maret 2021	Presiden	ditandatangani	M.0259/Seskab/04/2021	07-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	7-Apr-21	OutcomeKK_1
152	M.0160/Ekon/04/2021	07-Apr-21	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Permohonan Persetujuan atas Usulan Proyek Strategis Nasional baru	Presiden	ditandatangani	M.0266/Seskab/04/2021	08-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Apr-21	OutcomeKK_1
153	M.0161/Ekon/04/2021	08-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD)	Presiden	ditandatangani	M.0264/Seskab/04/2021	08-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Apr-21	OutcomeKK_1
154	M.0162/Ekon/04/2021	08-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Permasalahan PT. Taspem dan PT. Asabri	Presiden	ditandatangani	M.0265/Seskab/04/2021	08-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Apr-21	OutcomeKK_1
155	M.0163/Ekon/04/2021	08-Apr-21	Laporan atas Penyajian Lahan Ketahanan Pangan Usulan Kementerian Pertahanan	KL	ditandatangani	M.0113/Seskab/Ekon/04/2021	08-Apr-21	Surat tersebut sedang dalam proses kajian/telaah oleh Kemenko Bidang Perekonomian	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	8-Apr-21	OutcomeKK_3
156	B.0169/Ekon/04/2021	09-Apr-21	3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	KL	-	-	-	Kementerian Keuangan telah membalas surat tersebut dan mengajukan kembali permohonan persetujuan untuk RPMK mengenai Pengelolaan Dana Desa	Deputi-KL	IOP_2	ISP_2	9-Apr-21	OutcomeKK_2
157	M.0164/Ekon/04/2021	09-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ketenaganukliran	Presiden	ditandatangani	M.0271/Seskab/04/2021	12-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Apr-21	OutcomeKK_2
158	M.0165/Ekon/04/2021	09-Apr-21	Penyelesaian Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Seskab	Monitor tindak lanjutnya	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	12-Apr-21	OutcomeKTJ_9
159	M.0166/Ekon/04/2021	09-Apr-21	Permohonan Audiensi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia	Presiden	ditandatangani	M.0276/Seskab/04/2021	12-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	12-Apr-21	OutcomeKK_1
160	M.0167/Ekon/04/2021	09-Apr-21	Permohonan Kesiediaan Presiden untuk Membuka Acara Indonesia International Motor Show Hybrid 2021	Presiden	ditandatangani	M.0275/Seskab/04/2021	12-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	12-Apr-21	OutcomeKK_1
161	M.0168/Ekon/04/2021	12-Apr-21	Penyampaian Butir Wicara (Briefing Sheet) Pengantar Presiden dan Bahan Paparan Rapat Internal mengenai Kebijakan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Kelapa Sawit	Presiden	ditandatangani	M.0272/Seskab/04/2021	12-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	12-Apr-21	OutcomeKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
162	M.0169/Ekon/04/2021	12-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Pembukaan Hannover Messe 2021, Senin 12 April 2021	Seskab	bahan sudah digunakan oleh Seskab	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	12-Apr-21	OutcomeKTJ_9
163	M.0170/Ekon/04/2021	12-Apr-21	Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Presiden_Deputi	ditandatangani	M.367/Seskab/04/2021	30-Apr-21	naik ke seskab dan ke presiden melalui Memo deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi No M.97 tanggal 29 April 2021, tidak ada penolakan	Deputi-Depmar-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Apr-21	OutcomeIKK_2
164	M.0171/Ekon/04/2021	12-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan BKPM sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Presiden	ditandatangani	M.0279/Seskab/04/2021	12-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Apr-21	OutcomeIKK_2
165	M.0172/Ekon/04/2021	12-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Rencana Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan dan Pangan	Presiden	ditandatangani	M.0283/Seskab/04/2021	13-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	13-Apr-21	OutcomeIKK_1
166	M.0173/Ekon/04/2021	14-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0294/Seskab/04/2021	14-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	14-Apr-21	OutcomeIKK_2
167	M.0174/Ekon/04/2021	14-Apr-21	Permohonan Banding Administratif PT Kiat Makmur	KL	Perlu dimonitor --> agar tindaklanjutnya sesuai pokok permasalahan	B.0134/Seskab/Ekon/04/2021	16-Apr-21	surat Seskab tersebut sedang dalam proses tindaklanjut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	16-Apr-21	OutcomeIKK_3
168	M.0175/Ekon/04/2021	14-Apr-21	Permohonan Rapat Terbatas Pembahasan Akselerasi Pengembangan UMKM	Presiden	ditandatangani	M.0293/Seskab/04/2021	14-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	14-Apr-21	OutcomeIKK_1
169	M.0177/Ekon/04/2021	14-Apr-21	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Washington DC, Amerika Serikat, Tanggal 24-28 Maret 2021	Presiden	ditandatangani	M.0295/Seskab/04/2021	14-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	14-Apr-21	OutcomeIKK_4
170	M.0178/Ekon/04/2021	15-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Pembukaan Indonesia International Motor Show Hybrid 2021, Kamis 15 April 2021	Seskab	Noted Arsip	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	15-Apr-21	OutcomeKTJ_9
171	M.0179/Ekon/04/2021	15-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	Presiden	ditandatangani	M.0299/Seskab/04/2021	15-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Apr-21	OutcomeIKK_2
172	M.0180/Ekon/04/2021	16-Apr-21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0308/Seskab/04/2021	19-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	19-Apr-21	OutcomeIKK_1
173	M.0181/Ekon/04/2021	19-Apr-21	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Melepas Ekspor Komoditas Pertanian ke Uni Emirat Arab	Seskab	Pantau tindaklanjutnya	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Apr-21	OutcomeKTJ_9
174	M.0182/Ekon/04/2021	19-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Presiden	ditandatangani	M.0320/Seskab/04/2021	20-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Apr-21	OutcomeIKK_2
175	M.0184/Ekon/04/2021	19-Apr-21	Laporan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Tahun 2015-2020	Presiden	ditandatangani	M.0321/Seskab/04/2021	20-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	20-Apr-21	OutcomeIKK_4
176	M.0185/Ekon/04/2021	20-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presiden	ditandatangani	M.0327/Seskab/04/2021	20-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Apr-21	OutcomeIKK_2
177	M.0186/Ekon/04/2021	20-Apr-21	Rencana Perundingan Indonesia-United Arab Emirates (UAE) Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA)	Presiden	ditandatangani	M.0324/Seskab/04/2021	20-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	20-Apr-21	OutcomeIKK_1
178	M.0188/Ekon/04/2021	21-Apr-21	Permohonan Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Tahun 2022	Presiden	ditandatangani	M.0330/Seskab/04/2021	22-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Apr-21	OutcomeIKK_1
179	M.0189/Ekon/04/2021	22-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet Bahan Audiensi Presiden dengan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO)	Seskab	noted arsip	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Apr-21	OutcomeKTJ_9
180	M.0190/Ekon/04/2021	22-Apr-21	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	Presiden	ditandatangani	M.0332/Seskab/04/2021	22-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	22-Apr-21	OutcomeIKK_3
181	M.0191/Ekon/04/2021	22-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Presiden	ditandatangani	M.0334/Seskab/04/2021	23-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Apr-21	OutcomeIKK_2
182	M.0193/Ekon/04/2021	22-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0335/Seskab/04/2021	23-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Apr-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
183	M.0195/Ekon/04/2022	23-Apr-21	Permohonan PT. Siemens Indonesia (PTSI) dan PT. Siemens Healthineers Indonesia (PTSHI) atas Penayangan Produk dalam E-Katalog 2020	KL	ditandatangani	B.0151/Seskab/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Saat ini LKPP sudah memfasilitasi permasalahan PTSI dan PTSHI dalam e-katalog LKPP 2020 sesuai dengan hasil rapat tersebut. Sementara, Kementerian Kesehatan terus memproses pengalihan Nomor Izin Edar sesuai SOP yang berlaku	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	26-Apr-21	OutcomeIKK_3
184	M.0196/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Mengenai Keberlanjutan Penugasan BUMN Karya Dalam Proyek Infrastruktur	Presiden	ditandatangani	M.0339/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	26-Apr-21	OutcomeIKK_1
185	M.0197/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0343/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
186	M.0198/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Presiden	ditandatangani	M.0344/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
187	M.0199/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (RPermentan tentang Fasilitas Kebun Masyarakat Sekitar)	Presiden	ditandatangani	M.0345/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
188	M.0199/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (RPermentan tentang SDG PVT Perkebunan)	Presiden	ditandatangani	M.0345/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
189	M.0199/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (RPermentan tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum)	Presiden	ditandatangani	M.0345/Seskab/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
190	M.0199/Ekon/04/2021	26-Apr-21	Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (RPermentan tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan)	Presiden	ditandatangani	B.0149/Seskab/Ekon/04/2021	26-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_2	ISP_2	26-Apr-21	OutcomeIKK_2
191	M.0202/Ekon/04/2021	27-Apr-21	Bahan Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2022	Presiden	ditandatangani	M.0354/Seskab/04/2021	27-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Apr-21	OutcomeIKK_1
192	M.0204/Ekon/04/2021	27-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Presiden	ditandatangani	M.0361/Seskab/04/2021	28-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-Apr-21	OutcomeIKK_2
193	M.0207/Ekon/04/2021	28-Apr-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Presiden	ditandatangani	M.0364/Seskab/04/2021	28-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-Apr-21	OutcomeIKK_2
194	M.0208/Ekon/04/2021	29-Apr-21	Penyampaian Hasil Kajian Kebijakan Transformasi Struktural Sektor Pertanian	Seskab	Noted Arsip	B.0155/Seskab/Ekon/04/2021	29-Apr-21	ditandatangani	Deputi-Seskab- KL	IOP_1	ISP_1	29-Apr-21	OutcomeIKK_1
195	M.0209/Ekon/04/2021	29-Apr-21	Permohonan Bilateral Round Table Discussion dari US-ASEAN Business Council kepada Presiden	Presiden	ditandatangani	M.0368/Seskab/04/2021	30-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Apr-21	OutcomeIKK_1
196	M.0210/Ekon/04/2021	29-Apr-21	Laporan Triwulan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020	Presiden	ditandatangani	M.0366/Seskab/04/2021	30-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	30-Apr-21	OutcomeIKK_4
197	M.0213/Ekon/04/2021	30-Apr-21	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet dalam Kegiatan Kompas Collaboration Forum	Seskab	noted arsip	-	-	-	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	30-Apr-21	OutcomeKTJ_9
198	M.0214/Ekon/04/2021	30-Apr-21	Laporan Evaluasi Produksi, Serapan Gabah/Beras dan Stok Pupuk Bersubsidi	Presiden	ditandatangani	M.0369/Seskab/04/2021	30-Apr-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	30-Apr-21	OutcomeIKK_4
199	B.0198/Ekon/04/2021	30-Apr-21	Laporan Pertemuan Deputi Bidang Perekonomian dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, tanggal 29 April 2021			-	-	Kedepkatan Bidang Perekonomian telah dibrikan hak akses kedalam Sistem Informasi Manajemen BUMN	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	1-Dec-21	OutcomeIKK_4
200	M.0176/Ekon/04/2021	14-Apr-21	Penerusan dan Laporan Rapat Lanjutan Pembahasan Gugatan uji materiil atas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi)-	Deputi Lain	-	-	-	dispo deputi PMK Agar dikaji dan hasilnya dilaporkan. 19/4	Deputi-Dep PMK	KTJ_9	KTJ_9	29-Apr-21	OutcomeKTJ_9
201	M.0205/Ekon/04/2021	28-Apr-21	Laporan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Deputi Lain	-	-	-	dispo Deputi Marves Asdep-1 siapkan laporan singkat 29/04	Deputi-Depmar	KTJ_9	KTJ_9	29-Apr-21	OutcomeKTJ_9
202	M.0206/Ekon/04/2021	28-Apr-21	Penyampaian Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) Tahun 2021 Periode I	Deputi Lain	-	-	-	dispo Deputi Marves Asdep-1 ump 29/04	Deputi-Depmar	KTJ_9	KTJ_9	29-Apr-21	OutcomeKTJ_9

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
203	M.0215/Ekon/05/2021	03-May-21	Permohonan Memberikan Pengarahan dalam Pembukaan Musrenbangnas 2021	Presiden		M.0375/Seskab/05/2021	03-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-May-21	OutcomeIKK_1
204	M.0217/Ekon/05/2021	03-May-21	Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2021	Presiden		M.0376/Seskab/05/2021	03-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	3-May-21	OutcomeIKK_4
205	M.0218/Ekon/05/2021	03-May-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 19 s.d 20 April 2021	Presiden		M.0374/Seskab/05/2021	03-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-May-21	OutcomeIKK_1
206	M.0220/Ekon/05/2021	03-May-21	Alokasi 40% Belanja Pemerintah untuk Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi	Seskab	Monitor tindaklanjutnya		03-May-21			KTJ_9	KTJ_9	3-May-21	OutcomeKTJ_9
207	M.0222/Ekon/05/2021	04-May-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Membahas Pengembangan Budidaya Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang	Presiden		M.0378/Seskab/05/2021	04-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	4-May-21	OutcomeIKK_1
208	M.0223/Ekon/05/2021	04-May-21	Pointers Sambutan Presiden dalam Pembukaan Musrenbangnas 2021	Presiden		M.0377/Seskab/05/2021	04-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	4-May-21	OutcomeIKK_1
209	M.0225/Ekon/05/2021	04-May-21	Laporan Pertemuan Bilateral dengan Minister of Commerce (MOFCOM) Republik Rakyat Tiongkok	Presiden		M.0383/Seskab/05/2021	04-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	4-May-21	OutcomeIKK_4
210	B.0205/Ekon/05/2021	06-May-21	Penyampaian Daftar Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing	KL				Kominfo telah menyampaikan Daftar Jabatan untuk TKA Perusahaan Rintisan Startup kepada deputi bidang Perekonomian melalui surat Nomor 405/DJAI/AI.02.03/05/2021, tanggal 10 Mei 2021 dan surat tersebut telah disampaikan kepada Kemenaker melalui surat deputi bidang Perekonomian Nomor : B.305/Ekon/05/2021, tanggal 21 Mei 2021	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	10-May-21	OutcomeIKK_1
211	M.0228/Ekon/05/2021	07-May-21	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus	Deputi Bidang PMK				dispo dep pmk, ump	Deputi-Deputi PMK-	KTJ_9	KTJ_9	7-May-21	OutcomeKTJ_9
212	M.0230/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Pemenuhan Modal Indonesia Investment Authority (INA)	Presiden	dittd	M.0387/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	7-May-21	OutcomeIKK_1
213	M.0231/Ekon/05/2021	07-May-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Mei 2021	Presiden		M.0388/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-May-21	OutcomeIKK_4
214	M.0232/Ekon/05/2021	07-May-21	Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern BPKP Triwulan I Tahun 2021	Presiden		M.0389/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-May-21	OutcomeIKK_4
215	M.0233/Ekon/05/2021	07-May-21	Penyampaian Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Presiden		M.0390/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
216	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Informasi Geospasial Nasional kepada Kepala Badan)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
217	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
218	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
219	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial ( RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
220	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial ( RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
221	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
222	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
223	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
224	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
225	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
226	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
227	M.0234/Ekon/05/2021	07-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.)	Presiden		M.0391/Seskab/05/2021	07-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-May-21	OutcomeIKK_2
228	M.0236/Ekon/05/2021	17-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Usulan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Presiden		M.0410/Seskab/05/2021	17-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	17-May-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
229	M.0237/Ekon/05/2021	18-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	18-May-21	OutcomeKTJ_9
230	M.0238/Ekon/05/2021	18-May-21	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	18-May-21	OutcomeKTJ_9
231	M.0239/Ekon/05/2021	18-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ttd	M.0413/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-May-21	OutcomeIKK_2
232	M.0240/Ekon/05/2021	18-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ttd	M.0414/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-May-21	OutcomeIKK_2
233	M.0241/Ekon/05/2021	18-May-21	Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	Presiden	ttd	M.0417/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-May-21	OutcomeIKK_2
234	M.0242/Ekon/05/2021	18-May-21	Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	Presiden		M.0416/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	18-May-21	OutcomeIKK_3
235	M.0243/Ekon/05/2021	18-May-21	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2021	Presiden		M.0419/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	18-May-21	OutcomeIKK_4
236	M.0244/Ekon/05/2021	18-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama	Presiden	ttd	M.0418/Seskab/05/2021	18-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-May-21	OutcomeIKK_2
237	M.0245/Ekon/05/2021	19-May-21	Perkembangan Penyelesaian RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	19-May-21	OutcomeKTJ_9
238	M.0246/Ekon/05/2021	19-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)	Presiden	ttd	M.0420/Seskab/05/2021	20-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-May-21	OutcomeIKK_2
239	M.0246/Ekon/05/2021	19-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR))	Presiden	ttd	M.0420/Seskab/05/2021	20-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-May-21	OutcomeIKK_2
240	M.0247/Ekon/05/2021	19-May-21	Permohonan Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021	Presiden		M.0424/Seskab/05/2021	20-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	18-May-21	OutcomeIKK_1
241	M.0248/Ekon/05/2021	19-May-21	Laporan Capaian Kegiatan Food Estate Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara	Presiden		M.0423/Seskab/05/2021	20-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	18-May-21	OutcomeIKK_1
242	M.0249/Ekon/05/2021	20-May-21	Penyampaian Konsep Surat Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemenuhan Modal Indonesia Investment Authority (INA)	KL		B.0179/Seskab/Ekon/05/2021	21-May-21	saat ini proses pemenuhan modal INA masih dalam tahap pebahsan internal di kementerian keuangan, termasuk penyusunan RPP atas hal tersebut	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	22-Jun-21	OutcomeIKK_1
243	M.0250/Ekon/05/2021	21-May-21	Penerusan Surat Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Depmar				dispo dep mar Asdep-1. laporkan ringkas. 25/05/2021	deputi-deputi	KTJ_9	KTJ_9	25-May-21	OutcomeKTJ_9
244	M.0251/Ekon/05/2021	21-May-21	Penerusan Surat Program tentang LEAF (Lowering Emission by Accelerating Forest Finance) dari Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia	Depmar				dispo depmar Asdep-2	deputi-deputi	KTJ_9	KTJ_9	21-May-21	OutcomeKTJ_9
245	M.0252/Ekon/05/2021	21-May-21	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi April 2021	Presiden		M.0428/Seskab/05/2021	21-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	21-May-21	OutcomeIKK_4
246	M.0253/Ekon/05/2021	21-May-21	Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2020	Presiden		M.0427/Seskab/05/2021	21-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	21-May-21	OutcomeIKK_4
247	M.0254/Ekon/05/2021	21-May-21	Laporan Rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2021	Presiden		M.0426/Seskab/05/2021	21-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-May-21	OutcomeIKK_1
248	M.0255/Ekon/05/2021	21-May-21	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2021	Seskab	noted arsip		21-May-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	21-May-21	OutcomeKTJ_9
249	M.0256/Ekon/05/2021	21-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Presiden	dittd	M.0431/Seskab/05/2021	21-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-May-21	OutcomeIKK_2
250	M.0235/Ekon/05/2021	21-May-21	Penyampaian Daftar Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk Jenis Kegiatan Perusahaan Rintis (Startup) Berbasis Teknologi dan Vokasi	KL				telah dilaksanakan rapat pembahasan oleh Kemenaker pada tanggal 2-4 Juni 2021 di Bogor	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	4-Jun-21	OutcomeIKK_1
251	M.0257/Ekon/05/2021	24-May-21	Penyampaian Buku Kumpulan Regulasi dan Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020	Presiden		M.0435/Seskab/05/2021	24-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	24-May-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
252	M.0258/Ekon/05/2021	24-May-21	Permohonan Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Seskab	tindaklanjuti		25-May-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	25-May-21	OutcomeKTJ_9
253	M.0259/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan	Presiden	ttd	M.0448/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-May-21	OutcomeIKK_2
254	M.0260/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Percepatan Integrasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun	Presiden	ttd	M.0449/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	28-May-21	OutcomeIKK_3
255	M.0261/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPeraturan BIG tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial)	Presiden	ttd	M.0450/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-May-21	OutcomeIKK_2
256	M.0261/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial RPeraturan BIG tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia	Presiden	ttd	M.0450/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-May-21	OutcomeIKK_2
257	M.0261/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial RPeraturan BIG tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri	Presiden	ttd	M.0450/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-May-21	OutcomeIKK_2
258	M.0261/Ekon/05/2021	27-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial RPeraturan BIG tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial	Presiden	ttd	M.0450/Seskab/05/2021	28-May-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-May-21	OutcomeIKK_2
259	M.0262/Ekon/05/2021	27-May-21	Laporan Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Ekspor Mineral dan Batubara	Seskab	monitor tindak lanjutnya		28-May-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-May-21	OutcomeKTJ_9
260	M.0263/Ekon/05/2021	31-May-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Awal, Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Luran, dan Pembiayaan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Seskab	-Noted Arsip -Monitor tindaklanjutnya		31-May-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	31-May-21	OutcomeKTJ_9
261	M.0265/Ekon/05/2021	31-May-21	Permohonan Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital Indonesia	Seskab	note arsip 7/6/2021				deputi-seskab	KTJ_9	KTJ_9	7-Jun-21	OutcomeKTJ_9
262	M.0072/Ekon/02/2021	19-Feb-21	Eksistensi Dewan Koperasi Indonesia Pimpinan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP Pasca Putusan PTUN Jakarta	Seskab	ttd	B.0052/Seskab/Ekon/02/2021	22-Feb-21		Deputi-Seskab-K/L	IOP_3	Belum Outcome		OutputIKK_3
263	M.0125/Ekon/03/2021	24-Mar-21	Pandangan dan Masukan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021	KL	ttd	B.0087/Seskab/Ekon/03/2021	24-Mar-21		Deputi-Seskab-KL	IOP_1	Belum Outcome		OutputIKK_1
264	M.0267/Ekon/06/2021	02-Jun-21	Usulan Proyek Bidang Energi Terbarukan dalam RPerpres terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Deputi Lain					Deputi-Deputi Maritim	KTJ_9	KTJ_9	2-Jun-21	OutcomeKTJ_9
265	M.0269/Ekon/06/2021	02-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (TUSI 4) (Rpermenko tentang penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan peta indikatf tumpang tindih pemnfaatan ruang dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah)	Presiden	ttd	M.0465/Seskab/06/2021	02-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	2-Jun-21	OutcomeIKK_2
266	M.0269/Ekon/06/2021	02-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (TUSI 4) (Rancangan Peraturan Dewan KEK tentang Ekgiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus)	Presiden	ttd	M.0465/Seskab/06/2021	02-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	2-Jun-21	OutcomeIKK_2
267	M.0270/Ekon/06/2021	02-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	dittd	M.0468/Seskab/06/2021	03-Jun-21		Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	3-Jun-21	OutcomeIKK_2
268	M.0271/Ekon/06/2021	04-Jun-21	Penyampaian Surat Menteri PPN/Bappenas Perihal Permohonan Penjadwalan Pelaksanaan Sidang Kabinet terkait Penurunan Kemiskinan Kronis	Deputi Lain					Deputi-Deputi PMK-	KTJ_9	KTJ_9	4-Jun-21	OutcomeKTJ_9
269	M.0272/Ekon/06/2021	04-Jun-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Juni 2021	Presiden		M.0478/Seskab/06/2021	04-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	4-Jun-21	OutcomeIKK_4
270	M.0273/Ekon/06/2021	04-Jun-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Penyelesaian Hambatan Investasi	Presiden		M.0479/Seskab/06/2021	04-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	4-Jun-21	OutcomeIKK_3

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
271	M.0274/Ekon/06/2021	04-Jun-21	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian atas Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pembangunan Nursery Center Tanaman Perkebunan	KL	dittd	B.0200/Seskab/Ekon/06/2021	07-Jun-21	1. Trilateral Meeting (TM) telah diselenggarakan pada tanggal 02 Juni 2021 oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, guna membahas terkait pagu indikatif tahun 2022, yang salah satunya juga dibahas terkait pembiayaan nursery. Hal tersebut juga termasuk perencanaan program dan anggaran replanting, bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan utama dari Ditjen Perkebunan yang masuk ke dalam Program Peremajaan, selain Program Perluasan dan Program Rehabilitasi sebagai program besar yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan pada tahun 2022. 2. Program nursery di dalam pagu indikatif tahun 2022 telah ditentukan sebanyak 25 Unit nursery, meliputi: kegiatan pemeliharaan nursery yang sudah terbangun; dan pembangunan nursery baru. 3. Sumber pembiayaan dari salah satu unit nursery tersebut berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp47 miliar untuk pembangunan nursery modern komoditas kopi di Cianjur, Jawa Barat 4.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	25-Jun-21	OutcomeIKK_3
272	M.0277/Ekon/06/2021	09-Jun-21	Permohonan Arahan dan Persetujuan Presiden atas Perubahan Rencana Aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Presiden	dittd	M.0498/Seskab/06/2021	09-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Jun-21	OutcomeIKK_1
273	M.0278/Ekon/06/2021	09-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden		M.0497/Seskab/06/2021	09-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Jun-21	OutcomeIKK_2
274	M.0280/Ekon/06/2021	10-Jun-21	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Pembahasan Hilirisasi Ekonomi Digital	Presiden		M.0500/Seskab/06/2021	10-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	10-Jun-21	OutcomeIKK_1
275	M.0281/Ekon/06/2021	11-Jun-21	Permohonan Kesediaan Sekretaris Kabinet untuk Menghadiri Opening Ceremony The 28th GIIAS 2021	Seskab	Bersedia hadir virtual				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	14-Jun-21	OutcomeKTJ_9
276	M.0282/Ekon/06/2021	11-Jun-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 24-25 Mei 2021	Presiden		M.0510/Seskab/06/2021	14-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	14-Jun-21	OutcomeIKK_4
277	M.0283/Ekon/06/2021	11-Jun-21	Permohonan Rapat Terbatas Rencana Pembentukan Sub-Holding Pertamina (Persero)	Presiden		M.0509/Seskab/06/2021	14-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	14-Jun-21	OutcomeIKK_1
278	M.0284/Ekon/06/2021	14-Jun-21	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Pengembangan Budidaya Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang	KL	ttd	B.0207/Seskab/Ekon/06/2021	14-Jun-21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengoordinasikan pilot project untuk pengembangan budidaya tanaman porang di daerah Ponorogo dan Madiun	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	25-Jun-21	OutcomeIKK_1
279	M.0285/Ekon/06/2021	14-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ttd	M.0513/Seskab/06/2021	15-Jun-21		Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Jun-21	OutcomeIKK_2
280	M.0286/Ekon/06/2021	14-Jun-21	Briefing Sheet Rapat Terbatas Mengenai Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional	Presiden		M.0503/Seskab/06/2021	14-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi - Deputi PMK - Seskab - Presiden (M.0210/PMK/06/2021 14 Juni 2021)	IOP_1	ISP_1	14-Jun-21	OutcomeIKK_1
281	M.0287/Ekon/06/2021	16-Jun-21	Penyampaian Bahan Pertemuan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Istana Merdeka, 16 Juni 2021)	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	16-Jun-21	OutcomeKTJ_9
282	M.0288/Ekon/06/2021	16-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ttd	M.0523/Seskab/06/2021	16-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	16-Jun-21	OutcomeIKK_2
283	M.0289/Ekon/06/2021	16-Jun-21	Penyampaian Perkembangan Pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah	Deputi Lain					Deputi - Deputi Maritim	KTJ_9	KTJ_9	16-Jun-21	OutcomeKTJ_9
284	M.0290/Ekon/06/2021	16-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah)	Presiden	ttd	M.0530/Seskab/06/2021	21-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jun-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
285	M.0290/Ekon/06/2021	16-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Rancangan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus)	Presiden	ttd	M.0530/Seskab/06/2021	21-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jun-21	OutcomeIKK_2
286	M.0291/Ekon/06/2021	17-Jun-21	Penyampaian Bahan Audiensi Wakil Sekretaris Kabinet Dengan BPJS Ketenagakerjaan, Tanggal 17 Juni 2021	Waseskab	- Terima kasih - Arsip				Deputi-Waseskab	KTJ_9	KTJ_9	21-Jun-21	OutcomeKTJ_9
287	M.0292/Ekon/06/2021	17-Jun-21	Penerusan Surat Aspirasi Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu perihal Stok Cadangan Beras Pemerintah untuk Dialihkan ke Program Bansos	Deputi Lain					Deputi - Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	17-Jun-21	OutcomeKTJ_9
288	M.0293/Ekon/06/2021	18-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ttd	M.0526/Seskab/06/2021	21-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Jun-21	OutcomeIKK_2
289	M.0294/Ekon/06/2021	18-Jun-21	Laporan Lahan Ketahanan Pangan Kementerian Pertahanan	Presiden		M.0527/Seskab/06/2021	21-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	21-Jun-21	OutcomeIKK_4
290	B.0276/Ekon/06/2021	18-Jun-21	Penyampaian Daftar Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) Yang Dapat Diduduki Secara Rangkap di Bidang Vokasi	KL				Daftar TKA yang dapat diduduki secara rangkap telah digunakan sebagai bahan penyempurnaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Tka	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	4-Nov-21	OutcomeIKK_1
291	M.0295/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Permohonan Usulan Rapat Terbatas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Presiden	masukkan dalam jadwal ratas. terima kasih	M.0528/Seskab/06/2021	21-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Jun-21	OutcomeIKK_1
292	M.0296/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Permohonan Waktu Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 (IHPS II 2020) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Periode Semester II Tahun 2020 (LHP II 2020)	Presiden		M.0538/Seskab/06/2021	22-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Jun-21	OutcomeIKK_1
293	M.0297/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Laporan Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di KEK Galang Batang, Provinsi Kepulauan Riau	Presiden	ttd	M.0537/Seskab/06/2021	22-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	22-Jun-21	OutcomeIKK_4
294	M.0298/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Penerusan Surat Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alat untuk Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan Pemanenan Hutan	Deputi Lain					Deputi-Deputi Maritim	KTJ_9	KTJ_9	21-Jun-21	OutcomeKTJ_9
295	M.0299/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2021	KL		B.0224/Seskab/Polhukam/06/2021	23-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Polhukam-Seskab-KL (M.0342/Polhukam/06/2021 tgl 22 Juni 2021)	IOP_1	ISP_1	21-Jun-21	OutcomeIKK_1
296	M.0300/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah)	Presiden	ttd	M.0539/Seskab/06/2021	22-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Jun-21	OutcomeIKK_2
297	M.0300/Ekon/06/2021	21-Jun-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah)	Presiden	ttd	M.0539/Seskab/06/2021	22-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Jun-21	OutcomeIKK_2
298	M.0301/Ekon/06/2021	22-Jun-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Terkait Rencana Pembentukan Holding Sub Holding PT Pertamina	Presiden		M.0534/Seskab/06/2021	22-Jun-2021	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Jun-21	OutcomeIKK_1
299	M.0302/Ekon/06/2021	22-Jun-21	Permohonan Bantuan untuk Meningkatkan Ekspor	KL	ttd	B.0218/Seskab/Ekon/06/2021	22-Jun-21	sedang ditindaklanjuti oleh kementerian perdagangan	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	5-Aug-21	OutcomeIKK_3
300	M.0303/Ekon/06/2021	22-Jun-21	Laporan Terkait Pengawasan Penerapan Kebijakan Penanganan Covid-19	Presiden	ttd	M.0540/Seskab/06/2021	22-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Jun-21	OutcomeIKK_1
301	M.0304/Ekon/06/2021	22-Jun-21	Laporan Rapat Perkembangan Kebijakan Pupuk Bersubsidi & Implementasi Kartu Tani (Kemenko Perekonomian, tanggal 21 April, 7 Mei, 10 Mei, 20 Mei dan 24 Mei 2021).	Seskab	tindaklanjuti				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Jun-21	OutcomeKTJ_9
302	B.0293/Ekon/06/2020	24-Jun-21	Penyampaian Surat Dukungan Akses Data Kinerja BUMN melalui Sistem Informasi Manajemen BUMN					Kedeputian Bidang Perekonomian telah dibrikan hak akses kedalam Sistem Informasi Manajemen BUMN	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	1-Dec-21	OutcomeIKK_4

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
303	M.0307/Ekon/06/2021	24-Jun-21	Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet Kepada K/L Dalam Rangka Menindaklanjuti Hasil Rapat Internal Rencana Pembentukan Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero)	KL	ttd	B.0228/Seskab/Ekon/6/2021	25-Jun-21	telah dilakukan perubahan kebijakan terhadap penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga jual eceran/harga jual atas: (1) BBM melalui revisi Perpres No.191 Tahun 2014 jo Perpres No. 43 Tahun 2018; (2) LPG bagi nelayan dan petani melalui revisi Perpres No.38 Tahun 2019; dan (3) LPG tabung 3 Kg melalui revisi Perpres No.104 Tahun 2007.	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	5-Aug-21	OutcomeIKK_1
304	M.0308/Ekon/06/2021	25-Jun-21	Laporan Menteri Pertanian terkait Pemanfaatan Hasil Riset Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian	Presiden		M.0546/Seskab/06/2021	25-Jun-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	25-Jun-21	OutcomeIKK_4
305	M.0311/Ekon/06/2021	29-Jun-21	Laporan Hasil Pemantauan Bersama Terkait Pengembangan Vaksin Merah Putih	KL		B.231/Seskab/Ekon/07/2021	01-Jul-21	Kemenko Ekon telah menindaklanjuti surat Seskab tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Perkembangan Vaksin Merah Putih pada tanggal 2 Juli 2021, yang dipimpin oleh Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Deputi Koordinasi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi.	Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	27-Jul-21	OutcomeIKK_4
306	M.0312/Ekon/06/2021	29-Jun-21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	KL	-	B.0233/Seskab/Ekon/07/2021	05-Jul-21	RPerpres telah mendapat paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada setiap lembar naskah asli RPerpres dan saat ini sedang diajukan untuk mendapatkan penetapan Presiden.	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	6-Sep-21	OutcomeIKK_1
307	B.0294/Ekon/06/2021	25-Jun-21	Permohonan Pertimbangan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	KL				Dirjen PP Kemenkumham telah menyampaikan pertimbangan kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui surat nomor PPE.PP.03.03-1252 tgl 21 Juli 2021  Telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham kepada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet perihan Tanggapan atas RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Adapun saat ini RPerpres dalam tahap permintaan paraf kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	21-Jul-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
308	M.0314/Ekon/07/2021	01-Jul-21	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan/Pending Issues Rencana Aksi Ease of Doing Business (Renaksi EoDB) 2022, di Bogor tanggal 15 Juni 2021	KL	-	B.0232/Seskab/Ekon/07/2021	01-Jul-21	1. Pemda DKI dan Pemkot Surabaya telah melaksanakan pembahasan lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk memperbarui/revisi Perda berkaitan dengan indeks retribusi untuk UMKM sebesar 0,5 sesuai dengan PP 16 Tahun 2021  2. Integrasi sistem pertanahan antara Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda Jakarta sudah dalam tahap pembahasan teknis integrasi, secara prinsip telah disetujui bersama.  3. Pembahasan mengenai perubahan struktur pajak pertanahan dan struktur tarif jasa kepelabuhan sedang dalam tahap inisiasi pembentukan kajian oleh Kementerian Investasi/BKPM  4. Roadmap untuk EODB masih belum diinisiasi oleh Kementerian Investasi/BKPM.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	5-Aug-21	OutcomeKK_3
309	M.0315/Ekon/07/2021	05-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Sidang Kabinet Paripurna mengenai Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021	Presiden	arsip	M.0561/Seskab/07/2021	05-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	5-Jul-21	OutcomeKK_1
310	M.0316/Ekon/07/2021	06-Jul-21	Penyampaian Surat Gabungan Perusahaan Rokok Surabaya dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia	Seskab					Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	6-Jul-21	OutcomeKTJ_9
311	M.0317/Ekon/07/2021	06-Jul-21	Permohonan Audiensi kepada Sekretaris Kabinet secara virtual terkait Laporan Bank Dunia	Seskab	Atur waktunya setelah PPKM				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Jul-21	OutcomeKTJ_9
312	B.0321/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Percepatan Capaian Target Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional	KL				Menko bidang perekonomian sdh melakukan pembahasan dengan tim deloit dan BKPM,. Serta sudah dilakukan rapat dengan KPK untuk memperkuat NLE melalui program Stranas KPK..	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	5-Aug-21	OutcomeKK_3
313	M.0318/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Tentang Mekanisme Pengaturan Cadangan Beras Pemerintah (Rabu, 7 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB)	Presiden	arsip	M.0566/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	7-Jul-21	OutcomeKK_1
314	M.0319/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Juli 2021	Presiden		M.0569/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-Jul-21	OutcomeKK_4
315	M.0320/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Permohonan Rapat Terbatas Persiapan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022	Presiden		M.0570/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	7-Jul-21	OutcomeKK_1
316	M.0321/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 16-17 Juni 2021	Presiden		M.0568/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-Jul-21	OutcomeKK_4
317	M.0322/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024	Presiden	Dittd	M.0573/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Jul-21	OutcomeKK_2
318	M.0323/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Laporan Perkembangan Penyusunan Peta Jalan Redesain Transformasi Ekonomi Dalam Kerangka Reformasi Struktural	Presiden		M.0572/Seskab/07/2021	07-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-Jul-21	OutcomeKK_4
319	M.0324/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Laporan Peninjauan Panen Porang di Kabupaten Madiun dan Permohonan Kehadiran Presiden pada Panen Raya Porang	KL		B.0236/Seskab/Ekon/07/2021	07-Jul-21	Akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat untuk membahas kehadiran Presiden pada kegiatan Panen Raya Porang pada tanggal 2 Agustus 2021.	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	28-Jul-21	OutcomeKK_1
320	M.0326/Ekon/07/2021	08-Jul-21	Penerusan Surat Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden	Deputi Lain					Deputi-Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	8-Jul-21	OutcomeKTJ_9

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
321	B.0326/Ekon/07/2021	09-Jul-21	Penyampaian Catatan atas Surat Permohonan Bantuan Realisasi Kebun Plasma	KL				Dalam rangka menindaklanjuti surat terkait Persoalan Realisasi Kebun Plasma Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kedepatian III KSP telah menyelenggarakan 3kali rapat bilateral yang melibatkan Koperasi Sawit Sukses Mandiri (KSSM), PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta rapat koordinasi yang turut melibatkan Kementerian Pertanian. Dengan rincian sebagai berikut: 1. Audiensi dengan Koperasi KSSM pada 16 Juli 2021 2. Rapat Bilateral dengan Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur pada 23 Juli 2021 3. Rakor dengan Kementan, Pemda dan KSSM 28 Juli (PT SPMN berhalangan hadir) 4. Rapat Bilateral 3 Agustus 2021, dihadiri PT SPMN dan Kementan 5. Rencananya Deputi III KSP akan kembali melaksanakan Rakor yang mempertemukan seluruh stakeholder	Deputi-KL	IOP_3	ISP_3	16-Jul-21	OutcomeIKK_3
322	M.0327/Ekon/07/2021	09-Jul-21	Tindaklanjut Arahan Presiden Dalam Rapat Internal Pembentukan Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero)	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Jul-21	OutcomeKTJ_9
323	M.0328/Ekon/07/2021	09-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian : RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Presiden	ttd	M.0578/Seskab/07/2021	12-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Jul-21	OutcomeIKK_2
324	M.0329/Ekon/07/2021	09-Jul-21	Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK	KL	ttd	B.0239/Seskab/Ekon/07/2021	12-Jul-21	Surat Seskab telah ditindaklanjuti oleh surat Mensesneg kepada Menko Ekon perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK. Adapun pembahasan substansi RPerpres saat ini dalam tahap penyempurnaan.	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	5-Aug-21	OutcomeIKK_1
325	M.0330/Ekon/07/2021	09-Jul-21	Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina PT Bintan Alumina Indonesia di KEK Galang Batang	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	26-Jul-21	OutcomeKTJ_9
326	M.0331/Ekon/07/2021	12-Jul-21	1. Perubahan terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); 2. Permohonan Persetujuan Presiden atas: a. Rancangan PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP); b. Rancangan Permensos tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. : <b>PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP)</b>	Presiden	ttd	M.0581/Seskab/07/2021	12-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Jul-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
327	M.0331/Ekon/07/2021	12-Jul-21	1. Perubahan terkait Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); 2. Permohonan Persetujuan Presiden atas: a. Rancangan PMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP); b. Rancangan Permensos tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. : <b>Permensos tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.</b>	Presiden	ttd	M.0581/Seskab/07/2021	12-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Jul-21	OutcomeIKK_2
328	M.0333/Ekon/07/2021	13-Jul-21	Permohonan Anggaran Pembangunan Pasar Anyar Kota Tangerang	KL	dittd	B.0243/Seskab/Ekon/07/2021	13-Jul-21	Kementerian PUPR sedang mengkaji kembali permohonan pembangunan Pasar Anyar dimaksud.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	5-Aug-21	OutcomeIKK_3
329	M.0334/Ekon/07/2021	14-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Mengenai Kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022	Presiden	dittd	M.0622/Seskab/07/2021	26-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	26-Jul-21	OutcomeIKK_1
330	M.0335/Ekon/07/2021	14-Jul-21	Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus	KL	dittd	B.0246/Seskab/Ekon/07/2021	14-Jul-21	Telah diselienggarakan rapat di Kemenko Perekonomian untuk membahas pemberian Fasilitas PPH bagi pelaku usaha di KEK. Dalam rapat tersebut disepakati untuk membahas permasalahan tersebut dalam rapat tingkat menteri dan dalam hal tidak dapat disepakati penyelesaian atas permasalahan tersebut, hal tersebut akan dibahas dalam sidang kabinet	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	27-Jul-21	OutcomeIKK_3
331	M.0336/Ekon/07/2021	14-Jul-21	Permohonan Kesiediaan Presiden untuk Audiensi dan Menghadiri Opening Ceremony The 28th GIIAS 2021	Presiden		M.0591/Seskab/07/2021	14-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	14-Jul-21	OutcomeIKK_4
332	M.0337/Ekon/07/2021	14-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	dittd	M.0590/Seskab/07/2021	14-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	14-Jul-21	OutcomeIKK_2
333	M.0338/Ekon/07/2021	16-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19	Presiden		M.0593/Seskab/07/2021	16-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	16-Jul-21	OutcomeIKK_1
334	M.0339/Ekon/07/2021	16-Jul-21	Penerusan Surat Permohonan Izin Bagi Wakil Menteri LHK untuk Mengikuti the July Ministerial Meeting, Road to COP-26 UNFCCC di London, Inggris, 25-26 Juli 2021	Deputi Lain					Deputi-Deputi Marinves	KTJ_9	KTJ_9	16-Jul-21	OutcomeKTJ_9
335	M.0341/Ekon/07/2021	19-Jul-21	Laporan Menghadiri May-June Climate Change Conference SBSTA & SBI 2021 sebagai Delegasi RI (Delri), Online Conference, 31 Mei-17 Juni 2021	Deputi Lain					Deputi-Deputi Marinves	KTJ_9	KTJ_9	19-Jul-21	OutcomeKTJ_9
336	M.0342/Ekon/07/2021	19-Jul-21	Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 untuk Periode Juni - November 2020	Presiden		M.0611/Seskab/07/2021	21-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	21-Jul-21	OutcomeIKK_4
337	M.0344/Ekon/07/2021	22-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Presiden	ttd	M.0617/Seskab/07/2021	23-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Jul-21	OutcomeIKK_2
338	M.0345/Ekon/07/2021	23-Jul-21	Penyampaian Apresiasi atas Dukungan Pemerintah dan Rencana Investasi Philip Morris International (PMI) pada Triwulan III 2021	Presiden		M.0620/Seskab/07/2021	26-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	26-Jul-21	OutcomeIKK_4
339	M.0346/Ekon/07/2021	23-Jul-21	Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19	KL	Dittd	B.0254/Seskab/Ekon/07/2021	23-Jul-21	Pada tanggal 2 Agustus 2021 telah dilaksanakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk penetapan daftar PSN baru yang telah mendapat persetujuan Presiden	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	2-Aug-21	OutcomeIKK_3
340	M.0347/Ekon/07/2021	26-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Membahas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian (Senin, 26 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB)	Presiden		M.0623/Seskab/07/2021	26-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	26-Jul-21	OutcomeIKK_1
341	M.0348/Ekon/07/2021	26-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Presiden	ttd	M.0630/Seskab/07/2021	26-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Jul-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
342	M.0349/Ekon/07/2021	26-Jul-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020	Presiden	ttd	M.0634/Seskab/07/2021	26-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	26-Jul-21	OutcomeIKK_2
343	M.0350/Ekon/07/2021	27-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Intern Mengenai Revisi Undang-Undang Keppailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Presiden		M.0636/Seskab/07/2021	27-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Jul-21	OutcomeIKK_1
344	M.0351/Ekon/07/2021	27-Jul-21	Permohonan Membuka dan Memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021	Presiden		M.0639/Seskab/07/2021	28-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	28-Jul-21	OutcomeIKK_1
345	M.0352/Ekon/07/2021	27-Jul-21	Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Arahan Presiden dan Perkembangan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021	Seskab	tindaklanjuti				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-Jul-21	OutcomeKTJ_9
346	M.0353/Ekon/07/2021	29-Jul-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Mengenai Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	Presiden		M.0645/Seskab/07/2021	29-Jul-21	tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Jul-21	OutcomeIKK_1
347	M.0354/Ekon/07/2021	30-Jul-21	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Hilirisasi Ekonomi Digital	KL		B.0262/Seskab/Ekon/07/2021	30-Jul-21	1. Kemenko Perekonomian telah membentuk Tim Kecil Persiapan Pembentukan PMO Pengembangan Ekonomi Digital 2. Kemenko Perekonomian sedang menyelenggarakan diskusi <sup>2</sup> dan rapat koordinasi terkait penyusunan kerangka Pengembangan Ekonomi Digital dan pembentukan PMO	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	5-Aug-21	OutcomeIKK_3
348	B.0421/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Permohonan Izin Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	KL				Sudah dilakukan rapat harmonisasi atas 9 RPermen sesuai surat deputi pada tanggal 1 Oktober 2021	Deputi-KL	IOP_4	ISP_4	1-Oct-21	OutcomeIKK_4
349	M.0356/Ekon/08/2021	02-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Internasional	KL		B.0264/Seskab/Ekon/08/2021	02-Aug-21	Kemenkumham telah melaksanakan harmonisasi RPerka LKPP tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Internasional pada 26 Agustus 2021	Deputi-Seskab-Presiden-KL	IOP_3	ISP_3	26-Aug-21	OutcomeIKK_3
350	M.0357/Ekon/08/2021	02-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden		M.0653/Seskab/08/2021	02-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	2-Aug-21	OutcomeIKK_2
351	M.0359/Ekon/08/2021	02-Aug-21	Laporan Menghadiri Kick-Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia pada UNFCCC Climate Change Conference (COP26/CMP16/CMA3), Inggris, 31 Oktober - 12 November 2021 (KLHK, Video Conference, 19 Juli 2021)	Deputi lain		dispo deputi marves ke asdep-2 Asdep-2 ump 05/08			Deputi-Depmar	KTJ_9	KTJ_9	5-Aug-21	OutcomeKTJ_9
352	M.0360/Ekon/08/2021	03-Aug-21	Permohonan Rapat Terbatas Rencana Pembentukan Sugar Entity Gula (Sugar Co.)	Presiden		M.0658/Seskab/08/2021	03-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-Aug-21	OutcomeIKK_1
353	M.0361/Ekon/08/2021	03-Aug-21	Permohonan Bupati Sumbawa Terkait Evaluasi Kebijakan Perum BULOG	Presiden		M.0659/Seskab/08/2021	04-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	4-Aug-21	OutcomeIKK_3
354	M.0362/Ekon/08/2021	03-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial	Presiden		M.0660/Seskab/08/2021	04-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	4-Aug-21	OutcomeIKK_2
355	M.0363/Ekon/08/2021	03-Aug-21	Penyelenggaraan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-6 Tahun 2021 dan Permohonan Pembukaan oleh Presiden melalui Video Tapping (9 Agustus 2021)	Presiden		M.0661/Seskab/08/2021	04-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	4-Aug-21	OutcomeIKK_1
356	M.0364/Ekon/08/2021	03-Aug-21	Laporan Paripurna Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Tahun 2020	Presiden		M.0666/Seskab/08/2021	05-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	5-Aug-21	OutcomeIKK_1
357	M.0365/Ekon/08/2021	04-Aug-21	Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian	KL		B.0267/Seskab/Ekon/08/2021	05-Aug-21	surat tersebut sudah diterima oleh Kemenko Perekonomian dan selanjutnya sedang dalam proses tindaklanjut/kajian,	Deputi-Seskab-Presiden-KL	IOP_1	ISP_1	5-Aug-21	OutcomeIKK_1
358	M.0366/Ekon/08/2021	05-Aug-21	Penyampaian Bahan Rapat Internal Mengenai Pembentukan Single Entity Gula	Presiden		M.0667/Seskab/08/2021	05-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	5-Aug-21	OutcomeIKK_1
359	M.0367/Ekon/08/2021	09-Aug-21	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2022)	Presiden		M.0676/Seskab/08/2021	09-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Aug-21	OutcomeIKK_1
360	M.0368/Ekon/08/2021	09-Aug-21	Laporan Pertemuan Pertemuan Pertama ETIMM Indonesia dan Australia	Presiden		M.0680/Seskab/08/2021	09-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Aug-21	OutcomeIKK_1
361	M.0369/Ekon/08/2021	09-Aug-21	Laporan Hasil Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, 9-10 Juli 2021	Presiden		M.0681/Seskab/08/2021	09-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Aug-21	OutcomeIKK_1
362	M.0370/Ekon/08/2021	09-Aug-21	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2021	Presiden		M.0682/Seskab/08/2021	09-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	9-Aug-21	OutcomeIKK_4

**RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM**

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
363	M.0371/Ekon/08/2021	09-Aug-21	Permohonan Kesiapan Presiden Menghadiri dan Melepas Ekspor Komoditas Pertanian di Acara Merdeka Ekspor	Presiden		M.0683/Seskab/08/2021	09-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Aug-21	OutcomeIKK_1
364	M.0372/Ekon/08/2021	10-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK Prekursor Narkotika)	Presiden		M.0688/Seskab/08/2021	10-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Aug-21	OutcomeIKK_2
365	M.0372/Ekon/08/2021	10-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK PNBK BKBKBN)	Presiden		M.0688/Seskab/08/2021	10-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Aug-21	OutcomeIKK_2
366	M.0372/Ekon/08/2021	10-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK Tarif PNBK)	Presiden		M.0688/Seskab/08/2021	10-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Aug-21	OutcomeIKK_2
367	M.0373/Ekon/08/2021	10-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden		M.0689/Seskab/08/2021	10-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	10-Aug-21	OutcomeIKK_2
368	M.0374/Ekon/08/2021	12-Aug-21	Usulan Rapat Terbatas (Ratas) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19	Seskab	Tindaklanjuti dan persiapan				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	13-Aug-21	OutcomeKTJ_9
369	M.0376/Ekon/08/2021	13-Aug-21	Penyampaian Surat Menteri PPN/Bappenas Perihal Penyampaian Koreksi Penajaman Penargetan Bantuan Sosial Berdasarkan Tingkat Kerentanan	Presiden		M.0727/Seskab/08/2021	27-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Aug-21	OutcomeIKK_1
370	M.0377/Ekon/08/2021	13-Aug-21	Keberlanjutan Kegiatan Tematik Science Techno Park (STP) di 4 Major Universitas (ITB, IPB, UI, dan UGM)	Deputi PMK	dispo deputi PMK Catatan : 1. Teliti dan catatan atas STP 2. Kajian atas kelonggaran dalam pembangunan STP 3. Jika dimungkinkan, lanjutkan monev dan Rakor. 16/8				Deputi-Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	16-Aug-21	OutcomeKTJ_9
371	M.0378/Ekon/08/2021	13-Aug-21	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II 2021	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	16-Aug-21	OutcomeKTJ_9
372	M.0379/Ekon/08/2021	13-Aug-21	Laporan Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Cairns Group di WTO	Presiden		M.0695/Seskab/08/2021	15-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	15-Aug-21	OutcomeIKK_4
373	M.0380/Ekon/08/2021	13-Aug-21	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juli 2021	Presiden		M.0696/Seskab/08/2021	15-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	15-Aug-21	OutcomeIKK_4
374	M.0381/Ekon/08/2021	16-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	16-Aug-21	OutcomeKTJ_9
375	M.0382/Ekon/08/2021	16-Aug-21	Penyesuaian Anggaran BP2MI Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 Tahap IV	KL		B.0275/Seskab/Ekon/08/2021	18-Aug-21	BP2MI telah menyampaikan usulan revisi anggaran BP2MI kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021, dan usulan revisi tersebut telah di sahkan oleh Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-618/AG/AG.3/2021.	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	24-Aug-21	OutcomeIKK_1
376	M.0383/Ekon/08/2021	16-Aug-21	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Untuk Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Korporasi Petani Dan Nelayan	KL		B.0276/Seskab/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Surat tersebut sudah diterima oleh K/L terkait dan selanjutnya sedang dalam proses tindaklanjuti/kajian.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	18-Aug-21	OutcomeIKK_3
377	M.0384/Ekon/08/2021	16-Aug-21	Hasil Kajian dan Focus Group Discussion Penguatan Peran Koperasi sebagai Off Taker Produk Hasil Pertanian	KL		B.0274/Seskab/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Telah ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Eselon I terkait Penguatan Peran Koperasi Pertanian yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 28 September 2021.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	28-Sep-21	OutcomeIKK_1
378	M.0385/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Permohonan Kesiapan Presiden untuk Audiensi dan Menghadiri Opening Ceremony The 28th GIIAS 2021	Presiden		M.0704/Seskab/08/2021	19-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	19-Aug-21	OutcomeIKK_1
379	M.0386/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Singapura, pada tanggal 12-14 Juli 2021	Presiden		M.0705/Seskab/08/2021	19-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	19-Aug-21	OutcomeIKK_4
380	M.0387/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2021	Presiden		M.0706/Seskab/08/2021	19-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	19-Aug-21	OutcomeIKK_4
381	M.0388/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 21-22 Juli 2021	Presiden		M.0707/Seskab/08/2021	19-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	19-Aug-21	OutcomeIKK_4
382	M.0389/Ekon/08/2021	18-Aug-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Agustus 2021	Presiden		M.0708/Seskab/08/2021	19-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	19-Aug-21	OutcomeIKK_4

**RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM**

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
383	M.0391/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK PNPB PUPR)	Presiden		M.0716/Seskab/08/2021	24-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Aug-21	OutcomeIKK_2
384	M.0391/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK PNPB BPKP)	Presiden		M.0716/Seskab/08/2021	24-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Aug-21	OutcomeIKK_2
385	M.0392/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden		M.0717/Seskab/08/2021	24-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Aug-21	OutcomeIKK_2
386	M.0393/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Semester II Tahun 2021 Dan Kebijakan Tahun 2022, Tanggal 18 Agustus 2021	Seskab	monitor, tindaklanjuti				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	25-Aug-21	OutcomeKTJ_9
387	M.0394/Ekon/08/2021	24-Aug-21	Permohonan Penyelesaian Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Impor Produk Cold Rolled Coil/Sheet	KL		B.0285/Seskab/Ekon/08/2021	25-Aug-21	Menko Perekonomian sedang dalam proses penindaklanjutan Surat Seskab dimaksud	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	30-Aug-21	OutcomeIKK_3
388	M.0395/Ekon/08/2021	27-Aug-21	Permohonan Penyesuaian Aktivitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	27-Aug-21	OutcomeKTJ_9
389	M.0396/Ekon/08/2021	27-Aug-21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebanan dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	Presiden		M.0732/Seskab/08/2021	30-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Aug-21	OutcomeIKK_1
390	M.0397/Ekon/08/2021	30-Aug-21	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Amerika Serikat	Presiden		M.0738/Seskab/08/2021	30-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	30-Aug-21	OutcomeIKK_4
391	M.0398/Ekon/08/2021	30-Aug-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri	Presiden		M.0737/Seskab/08/2021	30-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Aug-21	OutcomeIKK_2
392	M.0399/Ekon/08/2021	30-Aug-21	Penyampaian Undangan Menghadiri National Day pada Expo 2020 Dubai	Presiden		M.0736/Seskab/08/2021	30-Aug-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Aug-21	OutcomeIKK_1
393	M.0400/Ekon/08/2021	31-Aug-21	Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 (Triwulan II Tahun 2021)	Seskab	monitor tidnakanlanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	1-Sep-21	OutcomeKTJ_9
394	M.0402/Ekon/09/2021	06-Sep-21	Laporan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Triwulan II (April-Juni 2021)	Seskab	Monitor tindaklanjutnya				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	7-Sep-21	OutcomeKTJ_9
395	M.0403/Ekon/09/2021	06-Sep-21	Perkembangan Ekonomi Terkini September 2021	Presiden	ditandatangani	M.0753/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	7-Sep-21	OutcomeIKK_4
396	M.0404/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Presiden	ditandatangani	M.0754/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
397	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral Dan Batubara Melalui Sinergi Proses Bisnis dan atas Antar Kementerian/Lembaga)	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
398	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional)	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
399	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu)	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
400	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram)	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
401	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik)	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
402	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis )	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
403	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPMK tentang Standar Biaya Keluaran Tahun anggaran 2022	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
404	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
405	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
406	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
407	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
408	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
409	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Penyelesaian Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
410	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
411	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02.2014 tentang Standar Struktur Biaya	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
412	M.0405/Ekon/09/2021	07-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPKM tentang Rincian Alokasi Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Per Daerah TA 2021	Presiden	ditandatangani	M.0755/Seskab/09/2021	07-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Sep-21	OutcomeIKK_2
413	M.0406/Ekon/09/2021	08-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Daftar Proyek Strategis Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0758/Seskab/09/2021	08-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Sep-21	OutcomeIKK_2
414	M.0407/Ekon/09/2021	08-Sep-21	Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019	KL	ditandatangani	B.0297/Seskab/Ekon/09/2021	08-Sep-21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan Perpres No 79 Tahun 2019 untuk membahas prioritas dalam pembangunan pasar serta meminta komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan pasar	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	8-Sep-21	OutcomeIKK_3
415	M.0409/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 18-19 Agustus 2021	Presiden	ditandatangani	M.0768/Seskab/09/2021	13-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	13-Sep-21	OutcomeIKK_4
416	M.0410/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Penyampaian Keputusan DJSN Tentang Penetapan Hasil Penilaian Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020	Presiden	ditandatangani	M.0767/Seskab/09/2021	13-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	13-Sep-21	OutcomeIKK_4
417	M.0411/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Laporan Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA)	Presiden	ditandatangani	M.0766/Seskab/09/2021	13-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	13-Sep-21	OutcomeIKK_4
418	M.0412/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Penyampaian Kajian dan Rekomendasi Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pemulihan Perekonomian Nasional	Presiden	ditandatangani	M.0769/Seskab/09/2021	13-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	13-Sep-21	OutcomeIKK_1
419	M.0413/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester 1 Tahun 2021	Presiden	ditandatangani	M.0770/Seskab/09/2021	13-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	13-Sep-21	OutcomeIKK_4
420	M.0414/Ekon/09/2021	13-Sep-21	Bahan Rapat Internal Mengenai Lanjutan Pembahasan Kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022	Presiden	ditandatangani	M.0776/Seskab/09/2021	14-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	14-Sep-21	OutcomeIKK_1
421	M.0415/Ekon/09/2021	14-Sep-21	Penyampaian Penerusan dan Hasil Kajian atas Permohonan Persetujuan Presiden atas 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional	Deputi						KTJ_9	KTJ_9	14-Sep-21	OutcomeKTJ_9
422	M.0416/Ekon/09/2021	14-Sep-21	Permohonan Banding Administratif PT Kiat Makmur	Seskab	Noted Arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	14-Sep-21	OutcomeKTJ_9
423	M.0418/Ekon/09/2021	14-Sep-21	Permohonan Persetujuan terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0777/Seskab/09/2021	14-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	14-Sep-21	OutcomeIKK_2
424	M.0419/Ekon/09/2021	15-Sep-21	Tindaklanjut Arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Keberlanjutan Penugasan BUMN Karya untuk Proyek Infrastruktur Khususnya Restrukturisasi Utang PT Waskita Karya	Presiden	ditandatangani	M.0779/Seskab/09/2021	15-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	15-Sep-21	OutcomeIKK_3

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
425	M.0420/Ekon/09/2021	15-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0782/Seskab/09/2021	17-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	17-Sep-21	OutcomeIKK_2
426	M.0423/Ekon/09/2021	16-Sep-21	Penyesuaian Refocusing dan Realokasi Tahap IV BP2MI	Seskab	Monitoring tindaklanjutnya		17-Sep-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Sep-21	OutcomeKTJ_9
427	M.0424/Ekon/09/2021	16-Sep-21	Saran dan Masukan Sehubungan Dengan Wacana Moratorium Kepailitan	KL	ditandatangani	B.0311/Seskab/Ekon/2021	17-Sep-21	Saat ini penyusunan kebijakan dimaksud tengah dikoordinasikan oleh Menko Bidang Perekonomian.	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	24-Sep-21	OutcomeIKK_1
428	M.0425/Ekon/09/2021	17-Sep-21	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet Dalam Pertemuan Dengan Perwakilan Para Direktur Bank	Seskab	noted arsip		20-Sep-21			KTJ_9	KTJ_9	20-Sep-21	OutcomeKTJ_9
429	M.0426/Ekon/09/2021	17-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan)	Presiden	ditandatangani	M.0785/Seskab/09/2021	20-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Sep-21	OutcomeIKK_2
430	M.0426/Ekon/09/2021	17-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	Presiden	ditandatangani	M.0785/Seskab/09/2021	20-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Sep-21	OutcomeIKK_2
431	M.0427/Ekon/09/2021	20-Sep-21	Permohonan dan Penyampaian Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK PNB BPapeten)	Presiden	ditandatangani	M.0793/Seskab/09/2021	21-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Sep-21	OutcomeIKK_2
432	M.0427/Ekon/09/2021	20-Sep-21	Permohonan dan Penyampaian Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK Imbalan Royalti)	Presiden	ditandatangani	M.0793/Seskab/09/2021	21-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Sep-21	OutcomeIKK_2
433	M.0428/Ekon/09/2021	22-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0796/Seskab/09/2021	22-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Sep-21	OutcomeIKK_2
434	M.0430/Ekon/09/2021	22-Sep-21	Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Badan Usaha tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara	Seskab	Noted Arsip		24-Sep-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	20-Sep-21	OutcomeKTJ_9
435	M.0432/Ekon/09/2021	22-Sep-21	Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Semester 1 Tahun 2021	Presiden	ditandatangani	M.0798/Seskab/09/2021	24-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	24-Sep-21	OutcomeIKK_4
436	M.0433/Ekon/09/2021	23-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Penambahan Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2022	Presiden	ditandatangani	M.0800/Seskab/09/2021	24-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	24-Sep-21	OutcomeIKK_1
437	M.0434/Ekon/09/2021	27-Sep-21	Laporan Triwulanan I dan II Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Presiden	ditandatangani	M.0811/Seskab/09/2021	27-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	27-Sep-21	OutcomeIKK_4
438	M.0435/Ekon/09/2021	27-Sep-21	Permohonan Kehadiran Presiden untuk Meresmikan Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking) Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia dan Perluasan Dermaga Pelabuhan JIPE di KEK Gresik	Presiden	ditandatangani	M.0812/Seskab/09/2021	27-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	27-Sep-21	OutcomeIKK_1
439	M.0436/Ekon/09/2021	28-Sep-21	Jawaban atas Permintaan Dukungan Percepatan Ekspor PT Great Giant Pineapple	Seskab	monitor tindaklanjutnya		28-Sep-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-Sep-21	OutcomeKTJ_9
440	M.0437/Ekon/09/2021	28-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0813/Seskab/09/2021	28-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-Sep-21	OutcomeIKK_2
441	M.0438/Ekon/09/2021	28-Sep-21	Laporan Perkembangan Regulasi mengenai Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional	Seskab	diterima Deputi Perekonomian		28-Sep-21		Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	28-Sep-21	OutcomeKTJ_9
442	M.0440/Ekon/09/2021	29-Sep-21	Permohonan Percepatan Integrasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi Batam Logistic Ecosystem (BLE) dan Rencana Pengembangan Pelabuhan di Batam	Seskab	Noted Arsip		29-Sep-21			KTJ_9	KTJ_9	29-Sep-21	OutcomeKTJ_9
443	M.0441/Ekon/09/2021	29-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	ditandatangani	M.0821/Seskab/09/2021	29-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Sep-21	OutcomeIKK_2
444	M.0442/Ekon/09/2021	29-Sep-21	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Presiden	ditandatangani	M.0820/Seskab/09/2021	29-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	29-Sep-21	OutcomeIKK_4
445	M.0443/Ekon/09/2021	29-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0818/Seskab/09/2021	29-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Sep-21	OutcomeIKK_2
446	M.0444/Ekon/09/2021	30-Sep-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ditandatangani	M.0822/Seskab/10/2021	30-Sep-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Sep-21	OutcomeIKK_2
447	B.0451/Ekon/09/2021	10-Sep-21	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	KL				Perpres No 87 telah didistribusi	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	24-Sep-21	OutcomeIKK_1
448	B.0458/Ekon/09/2021	14-Sep-21	Permohonan Autentifikasi dan Distribusi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	KL				Telah diautentikasi oleh pejabat K/L	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	14-Sep-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
449	M.0446/Ekon/10/2021	4-Oct-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Oktober 2021	Presiden		M.0827/Seskab/10/2021	5-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	5-Oct-21	OutcomeIKK_4
450	M.0447/Ekon/10/2021	4-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan RPMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Awal Serta Dana Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Presiden	surat dittd	M.0828/Seskab/10/2021	5-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	5-Oct-21	OutcomeIKK_2
451	M.0449/Ekon/10/2021	5-Oct-21	Laporan Penggabungan Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai Tindak Lanjut Arahan Presiden Dalam Rapat Internal	Presiden		M.0830/Seskab/10/2021	5-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	5-Oct-21	OutcomeIKK_3
452	M.0450/Ekon/10/2021	5-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) RPMK tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Presiden	surat dittd	M.0831/Seskab/10/2021	5-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	5-Oct-21	OutcomeIKK_2
453	M.0451/Ekon/10/2021	5-Oct-21	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Tahun 2020	Presiden		M.0833/Seskab/10/2021	6-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	6-Oct-21	OutcomeIKK_4
454	M.0452/Ekon/10/2021	6-Oct-21	Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Internal Presiden Penguatan Ekosistem Pangan (Rabu, 6 Oktober 2021, Pukul 13.30 WIB)	Presiden	arsip	M.0834/Seskab/10/2021	21-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	21-Oct-21	OutcomeIKK_1
455	M.0454/Ekon/10/2021	6-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak	Presiden	surat dittd	M.0837/Seskab/10/2021	7-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	7-Oct-21	OutcomeIKK_2
456	M.0455/Ekon/10/2021	6-Oct-21	Permohonan Pejabat Sekretariat Kabinet untuk menjadi Focal Point Aksi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) pada Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan	KL		B. 0020/Waseskab/10/2021	7-Oct-21	Sebagai Focal Point Aksi Stranas PK telah diselenggarakan sejumlah rapat baik yang diinisiasi oleh KPK maupun oleh Sekretariat Kabinet maupun Kemenko Bidang Perekonomian. Terakhir telah dilakukan kunjungan kerja ke Batam untuk penyelesaian tumpang tindih regulasi dalam jasa kepelabuhan di Pemprov Kepri.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	7-Oct-21	OutputIKK_3
457	M.0456/Ekon/10/2021	7-Oct-21	Laporan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2021	Presiden		M.0838/Seskab/10/2021	21-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	21-Oct-21	OutcomeIKK_4
458	M.0458/Ekon/10/2021	7-Oct-21	Permohonan Kehadiran Sekretaris Kabinet dalam West Java Investment Summit 2021		Noted Arsip					KTJ_9	KTJ_9	7-Oct-21	OutcomeKTJ_9
459	M.0460/Ekon/10/2021	8-Oct-21	Usulan Perubahan Nomenklatur Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Deputi Administrasi					Asdep-Deputi-Deputi Administrasi	KTJ_9	KTJ_9	8-Oct-21	OutcomeKTJ_9
460	M.0461/Ekon/10/2021	8-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) RPMK tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian, dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Presiden	surat dittd	M.0844/Seskab/10/2021	8-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Oct-21	OutcomeIKK_2
461	M.0462/Ekon/10/2021	11-Oct-21	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet Dalam Acara Keynote Speech Presiden RI pada OJK Virtual Innovation Day 2021		Noted Arsip					KTJ_9	KTJ_9	11-Oct-21	OutcomeKTJ_9
462	M.0463/Ekon/10/2021	11-Oct-21	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Presiden	surat dittd	M.0850/Seskab/10/2021	11-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	11-Oct-21	OutcomeIKK_4
463	M.0464/Ekon/10/2021	11-Oct-21	Pengalihan Pagu Anggaran Badan Riset dan Inovasi Tahun Anggaran 2022	Presiden	ttd	M.0848/Seskab/10/2021	11-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	11-Oct-21	OutcomeIKK_1
464	M.0465/Ekon/10/2021	12-Oct-21	Laporan Audiensi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia	Seskab	noted arsip				Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	12-Oct-21	OutcomeKTJ_9
465	B.0513/Ekon/10/2021	14-Oct-21	Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2040	KL				Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti dengan memasukkan permasalahan dimaksud pada Draf Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang PITTI Sulawesi Selatan dan akan menjadi dasar dalam prioritas penyelesaian ketidakesuaian.	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	4-Nov-21	OutcomeIKK_1
466	M.0467/Ekon/10/2021	14-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik)	Presiden	ttd	M.0862/Seskab/10/2021	15-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Oct-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
467	M.0467/Ekon/10/2021	14-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah)	Presiden	ttd	M.0862/Seskab/10/2021	15-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Oct-21	OutcomeIKK_2
468	M.0467/Ekon/10/2021	14-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN tentang PNBK KKPR)	Presiden	ttd	M.0862/Seskab/10/2021	15-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Oct-21	OutcomeIKK_2
469	M.0468/Ekon/10/2021	14-Oct-21	Permohonan Perlindungan Hukum Pelaksanaan Investasi PT Asianfast Marine Industries di Batam	KL	Ttd	B.0347/Seskab/Ekon/10/2021	15-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	15-Oct-21	OutcomeIKK_4
470	M.0469/Ekon/10/2021	15-Oct-21	Penyampaian Bahan Pertemuan Presiden dengan Ketua BPK terkait Penyampaian Buku Pendapat (Strategisc Foresight) BPK	Presiden	arsip	M.0857/Seskab/10/2021	15-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	15-Oct-21	OutcomeIKK_1
471	M.0470/Ekon/10/2021	15-Oct-21	Penyampaian Bahan Rapat Internal Tentang : 1.Pinjaman Online 2.Masalah Pertanahan	Presidn		M.0856/Seskab/10/2021	15-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	15-Oct-21	OutcomeIKK_1
472	M.0474/Ekon/10/2021	19-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol	Presiden	dittd	M.0876/Seskab/10/2021	21-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	21-Oct-21	OutcomeIKK_2
473	M.0475/Ekon/10/2021	19-Oct-21	Laporan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Presiden	dittd	M.0877/Seskab/10/2021	21-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	21-Oct-21	OutcomeIKK_3
474	M.0479/Ekon/10/2021	22-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA	Presiden	ttd	M.0880/Seskab/10/2021	22-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Oct-21	OutcomeIKK_2
475	M.0481/Ekon/10/2021	25-Oct-21	Laporan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Industri Pangan	Presiden		M.0890/Seskab/10/2021	25-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	25-Oct-21	OutcomeIKK_1
476	M.0482/Ekon/10/2021	25-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	Presiden	surat dittd	M.0891/Seskab/10/2021	25-Oct-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Oct-21	OutcomeIKK_2
477	M.0483/Ekon/10/2021	25-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	Presiden	surat dittd	M.0893/Seskab/10/2021	25-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Oct-21	OutcomeIKK_2
478	M.0484/Ekon/10/2021	25-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) RPMK tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Presiden	surat dittd	M.0894/Seskab/10/2021	25-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	25-Oct-21	OutcomeIKK_2
479	M.0485/Ekon/10/2021	25-Oct-21	Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden Terkait Penguatan Peran Koperasi	Presiden		M.0899/Seskab/10/2021	25-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	25-Oct-21	OutcomeIKK_3
480	M.0487/Ekon/10/2021	27-Oct-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) RPMK tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Presiden	ttd	M.0900/Seskab/10/2021	28-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	28-Oct-21	OutcomeIKK_2
481	M.0490/Ekon/10/2021	28-Oct-21	Permohonan Kehadiran Presiden dalam BLU Expo 2021 mengenai BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi dan Permohonan Penandatanganan MoU terkait Penerbitan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Presiden		M.0905/Seskab/10/2021	28-Oct-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	28-Oct-21	OutcomeIKK_1
482	M.0491/Ekon/10/2021	28-Oct-21	Permohonan Arahan Terkait Perpres No. 60 Tahun 2020 dan Pergub No. 137 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G	KL	dittd	B.0377/Seskab/Ekon/10/2021	29-Oct-21	PTMWS menindaklanjuti Surat Seskab untuk dapat melakukan permohonan izin pelaksanaan reklamasi dan keberlanjutan pembangunan Pulau G	Deputi-Seskab-KL	IOP_1	ISP_1	4-Nov-21	OutcomeIKK_1
483	M.0492/Ekon/10/2021	28-Oct-21	Penerusan Permohonan Audiensi Kelompok Tani Cipta Bungaraya Jaya	Deputi PMK				Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi PMK	KTJ_9	KTJ_9	28-Oct-21	OutcomeKTJ_9
484	M.0493/Ekon/10/2021	28-Oct-21	Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Raya Bautung Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	Presiden		M.0909/Seskab/10/2021	29-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Oct-21	OutcomeIKK_1
485	M.0494/Ekon/10/2021	28-Oct-21	Permohonan Audiensi Pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan kepada Presiden	Presiden	surat dittd	M.0908/Seskab/10/2021	29-Oct-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Oct-21	OutcomeIKK_1

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
486	B.0544/Ekon/10/2021	29-Oct-21	Persiapan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perdagangan Antarpulau	KL				Kementerian perdagangan akan melakukan persiapan terkait implementasi Permendag tersebut dengan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan serta berkoordinasi dengan LNSW terkait kesiapan sistem	Deputi-KL	IOP_1	ISP_1	4-Nov-21	OutcomeKK_1
487	M.0495/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Presiden	surat dittd	M.0930/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
488	M.0496/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0929/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
489	M.0497/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0926/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
490	M.0498/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Permohonan Kesediaan Presiden untuk Meresmikan Pabrik PT Yili Indonesia Dairy	Presiden		M.0936/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Nov-21	OutcomeKK_1
491	M.0499/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Laporan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan III Tahun 2021			M.0935/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	IOP_4	ISP_4	8-Nov-21	OutcomeKK_4
492	M.0500/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus	Seskab	monitor tindaklanjutnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	8-Nov-21	OutcomeKTJ_9
493	M.0501/Ekon/11/2021	1-Nov-21	Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) Tahun 2021	KL	dittd	B.0392/Seskab/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Surat sedang dalam proses kajian oleh K/L terkait.	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	16-Nov-21	OutcomeKK_3
494	M.0502/Ekon/11/2021	2-Nov-21	Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2021	Presiden		M.0923/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	8-Nov-21	OutcomeKK_4
495	M.0503/Ekon/11/2021	3-Nov-21	Progress Pembentukan Holding Industri Pertahanan	Presiden		M.0920/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Nov-21	OutcomeKK_1
496	M.0504/Ekon/11/2021	3-Nov-21	Perkembangan Ekonomi Terkini November 2021	Presiden		M.0917/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	8-Nov-21	OutcomeKK_4
497	M.0505/Ekon/11/2021	3-Nov-21	Laporan Hasil Pertemuan Informal Tingkat Menteri Kelompok Negara Anggota G-33 di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	Presiden	ttd	M.0919/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	3-Nov-21	OutcomeKK_1
498	M.0506/Ekon/11/2021	3-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang: 1. Belimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 (RPermendag Penyelenggaraan Dekonsentrasi);	Presiden	ttd	M.0921/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
499	M.0506/Ekon/11/2021	3-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang: 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022 (RPermendag Petunjuk Teknis Dekonsentrasi)	Presiden	ttd	M.0921/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
500	M.0508/Ekon/11/2021	4-Nov-21	Penyampaian Kesepakatan Postur APBN Tahun Anggaran (TA) 2022	Presiden		M.0927/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	8-Nov-21	OutcomeKK_1
501	M.0509/Ekon/11/2021	4-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan	Presiden	surat dittd	M.0928/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
502	M.0510/Ekon/11/2021	4-Nov-21	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)	KL	surat dittd	B.0387/Seskab/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Surat sedang dalam proses kajian oleh K/L terkait.	Asdep-Deputi-Seskab-KL	IOP_4	ISP_4	16-Nov-21	OutcomeKK_4
503	M.0512/Ekon/11/2021	5-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020	Presiden		M.0922/Seskab/11/2021	8-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	8-Nov-21	OutcomeKK_2
504	M.0513/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Tertentu	Presiden	surat dittd	M.0944/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeKK_2
505	M.0514/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Expandable Polystyrene (EPS)	Presiden	surat dittd	M.0945/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak Ada Penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeKK_2
506	M.0515/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (RPMK tentang Skema Subsidi Resi Gudang )	Presiden		M.0947/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
507	M.0515/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (RPMK tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Presiden		M.0947/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeIKK_2
508	M.0515/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (RPMK tentang Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai)	Presiden		M.0947/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeIKK_2
509	M.0515/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Pelunasan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Peyerahan barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)	Presiden		M.0947/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeIKK_2
510	M.0515/Ekon/11/2021	8-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (RPMK tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum)	Presiden		M.0947/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	9-Nov-21	OutcomeIKK_2
511	M.0516/Ekon/11/2021	9-Nov-21	Bahan Masukan untuk Penyusunan Briefing Sheet Rapat Internal Terkait Tindak Lanjut Investasi Hasil Kunjungan Luar Negeri (Persatuan Emirat Arab Dan Inggris)	Deputi Marves				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi Marves	KTJ_9	KTJ_9	9-Nov-21	OutcomeKTJ_9
512	M.0517/Ekon/11/2021	9-Nov-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Mengenai Lanjutan Pembahasan Kesiapan Presidensi Indonesia di G-20 Tahun 2022	Presiden	arsip	M.0948/Seskab/11/2021	9-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	9-Nov-21	OutcomeIKK_1
513	M.0518/Ekon/11/2021	9-Nov-21	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 18-19 Oktober 2021	Presiden		M.0960/Seskab/11/2021	12-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	12-Nov-21	OutcomeIKK_4
514	M.0519/Ekon/11/2021	10-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Dana Insentif Daerah	Presiden	ttd	M.0957/Seskab/11/2021	12-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	12-Nov-21	OutcomeIKK_2
515	M.0520/Ekon/11/2021	10-Nov-21	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021	Presiden		M.0958/Seskab/11/2021	12-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	12-Nov-21	OutcomeIKK_4
516	M.0521/Ekon/11/2021	12-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2022 (RPermendag Tanda Sah 2022)	Presiden	surat dittd	M.0971/Seskab/11/2021	15-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Nov-21	OutcomeIKK_2
517	M.0522/Ekon/11/2021	12-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Presiden	surat dittd	M.0970/Seskab/11/2021	15-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Nov-21	OutcomeIKK_2
518	M.0523/Ekon/11/2021	15-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Subsidi Listrik	Presiden	surat dittd	M.0969/Seskab/11/2021	15-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Nov-21	OutcomeIKK_2
519	M.0524/Ekon/11/2021	15-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0968/Seskab/11/2021	15-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Nov-21	OutcomeIKK_2
520	M.0526/Ekon/11/2021	17-Nov-21	Penyampaian Briefing Sheet dan infografis Sidang Kabinet Paripurna mengenai Arahan Presiden dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022	Presiden		M.0972/Seskab/11/2021	17-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	17-Nov-21	OutcomeIKK_1
521	M.0527/Ekon/11/2021	17-Nov-21	Penyampaian Briefing Sheet Peninjauan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIAS) 2021, Rabu 17 November 2021	Seskab				Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	18-Nov-21	OutcomeKTJ_9
522	M.0529/Ekon/11/2021	18-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	surat dittd	M.0985/Seskab/11/2021	18-Dec-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	18-Nov-21	OutcomeIKK_2
523	M.0531/Ekon/11/2021	19-Nov-21	Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 17 November 2021 terkait Pembiayaan Even Fee World Superbike (WSBK) dan MotoGPTM	Presiden	surat dittd	M.0986/Seskab/11/2021	11-Nov-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	19-Nov-21	OutcomeIKK_3
524	M.0532/Ekon/11/2021	19-Nov-21	Permohonan Penetapan Presiden atas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api – Api	Seskab	monitor tindaklanjutnya			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	19-Nov-21	OutcomeKTJ_9
525	M.0533/Ekon/11/2021	22-Nov-21	Laporan Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan dalam rangka Menghadiri Rangkaian Pertemuan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ministerial Council Meeting (MCM)	Presiden		M.0993/Seskab/11/2021	22-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Nov-21	OutcomeIKK_1
526	M.0534/Ekon/11/2021	22-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 (RPermendag)	Presiden	surat dittd	M.0990/Seskab/11/2021	22-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	22-Nov-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
527	M.0535/Ekon/11/2021	22-Nov-21	Permohonan Kehadiran Sekretaris Kabinet pada Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia Tahun 2021 (Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 23-24 November 2021)	Seskab	sesuai arahan presiden			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	22-Nov-21	OutcomeKTJ_9
528	M.0536/Ekon/11/2021	22-Nov-21	Laporan Rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-53 dan Pertemuan Terkait Lainnya	Presiden		M.0996/Seskab/11/2021	22-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	22-Nov-21	OutcomeIKK_1
529	M.0537/Ekon/11/2021	22-Nov-21	Usulan Rapat Internal Dipimpin Presiden Guna Membahas Penyelesaian Masalah Keterlanjuran Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)	Presiden	surat dittd	M.0998/Seskab/11/2021	23-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	23-Nov-21	OutcomeIKK_1
530	M.0539/Ekon/11/2021	24-Nov-21	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 (Rabu, 24 November 2021)	Seskab	File			Tidak ada Penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	24-Nov-21	OutcomeKTJ_9
531	M.0541/Ekon/11/2021	24-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020	Presiden	surat dittd	M.1005/Seskab/11/2021	24-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Nov-21	OutcomeIKK_2
532	M.0542/Ekon/11/2021	25-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)	Seskab	noted			Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	25-Nov-21	OutcomeKTJ_9
533	M.0544/Ekon/11/2021	26-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	Presiden		M.1022/Seskab/11/2021	27-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	27-Nov-21	OutcomeIKK_2
534	M.0545/Ekon/11/2021	26-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (copy 1) RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa	Presiden		M.1020/Seskab/11/2021	27-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Nov-21	OutcomeIKK_2
535	M.0545/Ekon/11/2021	26-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (copy 2) RPBSN tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil;	Presiden		M.1020/Seskab/11/2021	27-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Nov-21	OutcomeIKK_2
536	M.0545/Ekon/11/2021	26-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (copy 3) RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik;	Presiden		M.1020/Seskab/11/2021	27-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Nov-21	OutcomeIKK_2
537	M.0545/Ekon/11/2021	26-Nov-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (copy 4) (RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam)	Presiden		M.1020/Seskab/11/2021	27-Nov-21	Tidak ada penolakan	Asdep-Deputi-seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Nov-21	OutcomeIKK_2
538	M.0546/Ekon/11/2021	29-Nov-21	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal Mengenai Tindak Lanjut atas Putusan Uji Formal Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja	Presiden					Deputi-Seskab	IOP_1	Belum Outcome		OutputKK_1
539	M.0547/Ekon/12/2021	8-Dec-21	Laporan Agenda Article 6 Paris Agreement dan Agriculture pada Pertemuan Conference of the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Inggris, 31 Oktober-13 November 2021	Deputi Marves					Deputi-Deputi Marves	KTJ_9	KTJ_9	8-Dec-21	OutcomeKTJ_9
540	M.0549/Ekon/12/2021	9-Dec-21	Laporan Rapat Evaluasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019	Seskab	monitor tindaklanjutnya			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	13-Dec-21	OutcomeKTJ_9
541	M.0550/Ekon/12/2021	9-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penurunan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya	Presiden	dittd	M.1046/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
542	M.0551/Ekon/12/2021	9-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Penugasan Khusus LPEI	Presiden	surat dittd	M.1045/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
543	M.0552/Ekon/12/2021	9-Dec-21	Perkembangan Ekonomi Terkini Desember 2021	Presiden		M.1044/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	13-Dec-21	OutcomeIKK_4
544	M.0553/Ekon/12/2021	9-Dec-21	Laporan Penyelenggaraan FGD Outlook Ekonomi 2022	Presiden		M.1043/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	13-Dec-21	OutcomeIKK_1
545	M.0554/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (RPMK)	Presiden	surat dittd	M.1052/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
546	M.0555/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Briefing Sheet Rapat Intern Kabinet mengenai Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022	Presiden		M.1050/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	13-Dec-21	OutcomeIKK_1
547	M.0556/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasikan (RPMK)	Presiden	dittd	M.1051/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
548	M.0559/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Standar Industri Hijau untuk Industri Barang Lainnya dari Kaca)	Presiden	surat dittd	M.1069/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
549	M.0559/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati)	Presiden	surat dittd	M.1069/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
550	M.0559/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu)	Presiden	surat dittd	M.1069/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
551	M.0559/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet Rubber)	Presiden	surat dittd	M.1069/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
552	M.0559/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah)	Presiden	surat dittd	M.1069/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
553	M.0561/Ekon/12/2021	13-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus	Presiden	surat dittd	M.1070/Seskab/12/2021	13-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	13-Dec-21	OutcomeIKK_2
554	M.0562/Ekon/12/2021	14-Dec-21	Tanggapan Menteri Sosial atas Surat Sekretaris Kabinet terkait Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Tahun 2021 (BB-PPKM 2021)	KL	surat dittd	B.0460/Seskab/Ekon/12/2021	15-Dec-21	Kemenko Perekonomian telah menyelenggarakan rapat tindak lanjut penyelesaian BB PPKM 2021 dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk percepatan reuiu BPKP.	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	31-Dec-21	OutcomeIKK_3
555	M.0563/Ekon/12/2021	14-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (RPMK)	Presiden	surat dittd	M.1076/Seskab/12/2021	15-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Dec-21	OutcomeIKK_2
556	M.0564/Ekon/12/2021	14-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Usaha Mikro Kecil Dalam Rangka Perizinan Tunggal	Presiden		M.1075/Seskab/12/2021	15-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	15-Dec-21	OutcomeIKK_2
557	M.0565/Ekon/12/2021	14-Dec-21	Laporan The 22nd Senior Official Meeting (SOM) Tanggal 21 Oktober 2021 dan The 9th Ministerial Meeting (MM) of The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Tanggal 04 Desember 2021	Presiden		M.1077/Seskab/12/2021	15-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	15-Dec-21	OutcomeIKK_1
558	M.0566/Ekon/12/2021	15-Dec-21	Laporan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2021	Presiden	dittd	M.1078/Seskab/12/2021	15-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	15-Dec-21	OutcomeIKK_4
559	M.0568/Ekon/12/2021	15-Dec-21	Percepatan Penyelesaian Tumpang Tindih Regulasi Layanan Jasa Kepelabuhanan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	KL	dittd	B.0465/Seskab/Ekon/12/2021	16-Dec-21	Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat nomor: AL.301/13/5/DJPL/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada Kementerian Dalam Negeri perihal penyampaian data hierarki pelabuhan di Indonesia	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	28-Dec-21	OutcomeIKK_3
560	M.0569/Ekon/12/2021	17-Dec-21	Penerusan Surat Bupati Sukaharjo terkait Permohonan Penanganan Dugaan Pencemaran PT Rayon Utama Makmur (PT RUM)							KTJ_9	KTJ_9	17-Dec-21	OutcomeKTJ_9
561	M.0570/Ekon/12/2021	17-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (Cukai HT)	Presiden	surat dittd	M.1090/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
562	M.0570/Ekon/12/2021	17-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) (Cukai HPTL)	Presiden	surat dittd	M.1090/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
563	M.0571/Ekon/12/2021	17-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja	Presiden	surat dittd	M.1091/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
564	M.0572/Ekon/12/2021	17-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.	Presiden	surat dittd	M.1092/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
565	M.0573/Ekon/12/2021	20-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kolaborasi Sistem Layanan Kepabeanaan, Cukai, dan Logistik Secara Elektronik dalam Ekosistem Logistik Nasional melalui Application Programming Interface	Presiden	surat dittd	M.1097/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
566	M.0574/Ekon/12/2021	20-Dec-21	Penyampaian Peningkatan Daya Saing Pertanian	KL	dittd	B.0480/Seskab/Ekon/12/2021	20-Dec-21		Deputi-Seskab-KL	IOP_1	Belum Outcome		OutputIKK_1
567	M.0575/Ekon/12/2021	20-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	Presiden	surat dittd	M.1100/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
568	M.0576/Ekon/12/2021	20-Dec-21	Laporan Perkembangan Persiapan Vaksin Merah Putih	Presiden		M.1098/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	20-Dec-21	OutcomeIKK_4
569	M.0578/Ekon/12/2021	20-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presiden	surat dittd	M.1099/Seskab/12/2021	20-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	20-Dec-21	OutcomeIKK_2
570	M.0579/Ekon/12/2021	21-Dec-21	Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet terkait Penyesuaian Harga Gas Bumi Bagi Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik di Kawasan Industri Batam	KL	dittd	B.0484/Seskab/Ekon/12/2021	22-Dec-21	Menko Maritim dan Investasi mengkoordinasikan permasalahan ini dengan melibatkan K/L terkait	Deputi-Seskab-KL	IOP_3	ISP_3	22-Dec-21	OutcomeIKK_3
571	M.0580/Ekon/12/2021	22-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022	Presiden		M.1111/Seskab/12/2021	23-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Dec-21	OutcomeIKK_2
572	M.0581/Ekon/12/2021	22-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa	Presiden	surat dittd	M.1110/Seskab/12/2021	23-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	23-Dec-21	OutcomeIKK_2
573	M.0582/Ekon/12/2021	22-Dec-21	Arah Kebijakan Pengembangan Tanaman Kratom di Indonesia	Presiden		M.1109/Seskab/12/2021	23-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	23-Dec-21	OutcomeIKK_1
574	M.0583/Ekon/12/2021	22-Dec-21	Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal (Rapin) tentang Optimalisasi Ekspor di Bidang Perkebunan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional pada Tanggal 30 September 2020	Presiden	surat dittd	M.1108/Seskab/12/2021	23-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	23-Dec-21	OutcomeIKK_4
575	M.0584/Ekon/12/2021	23-Dec-21	Penerusan Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPermen PPN/Kepala Bappenas mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Deputi Polhukam				Tidak ada penolakan	Deputi-Deputi Polhukam	KTJ_9	KTJ_9	23-Dec-21	OutcomeKTJ_9
576	M.0585/Ekon/12/2021	24-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (RPermendag)	Presiden	surat dittd	M.1115/Seskab/12/2021	24-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Dec-21	OutcomeIKK_2
577	M.0586/Ekon/12/2021	24-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan	Presiden	ttd	M.1117/Seskab/12/2021	24-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Dec-21	OutcomeIKK_2
578	M.0587/Ekon/12/2021	24-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara Anggota D-8 (RPMK)	Presiden	ttd	M.1116/Seskab/12/2021	24-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	24-Dec-21	OutcomeIKK_2
579	M.0588/Ekon/12/2021	24-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Koordinasi dan Pelaporan Perluasan Kesempatan Kerja	Presiden	ttd	M.1122/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Dec-21	OutcomeIKK_2
580	M.0589/Ekon/12/2021	27-Dec-21	Laporan Triwulanan III Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Presiden		M.1127/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	29-Dec-21	OutcomeIKK_4
581	M.0590/Ekon/12/2021	28-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (RPerba Penatalaksanaan)	Presiden		M.1131/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Dec-21	OutcomeIKK_2
582	M.0590/Ekon/12/2021	28-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (RPerba Uji Kesesuaian)	Presiden		M.1131/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Dec-21	OutcomeIKK_2
583	M.0591/Ekon/12/2021	28-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	Presiden	ttd	M.1130/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Dec-21	OutcomeIKK_2

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
584	M.0592/Ekon/12/2021	28-Dec-21	Laporan Rapat Diseminasi Peta Jalan Kemudahan Berusaha 2021 s.d. 2024 Setelah Pengumuman Penghentian Laporan EODB oleh World Bank	Presiden	ttd	M.1133/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	29-Dec-21	OutcomeIKK_1
585	M.0593/Ekon/12/2021	29-Dec-21	Penyampaian Bahan Sekretaris Kabinet Dalam Acara Pertemuan/Audiensi Presiden Dengan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Noted					KTJ_9	KTJ_9		OutcomeKTJ_9
586	M.0594/Ekon/12/2021	29-Dec-21	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (RPMK)	Presiden	ttd	M.1129/Seskab/12/2021	29-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	29-Dec-21	OutcomeIKK_2
587	M.0595/Ekon/12/2021	29-Dec-21	Percepatan Penyelesaian Tumpang Tindih Regulasi Layanan Jasa Kepelabuhanan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	KL	ttd	B.0499/Seskab/Ekon/12/2021	29-Dec-21		Deputi-Seskab-KL	IOP_3	Belum Outcome		OutputIKK_3
588	M.0596/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Penyampaian Bahan Rapat Internal mengenai Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Presiden	arsip	M.1136/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Dec-21	OutcomeIKK_1
589	M.0597/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Arahan Presiden	Presiden	arsip	M.1137/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak Ada Penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_1	ISP_1	30-Dec-21	OutcomeIKK_1
590	M.0598/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermenperin tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah,	Presiden	ttd	M.1145/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
591	M.0598/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermenperin tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Presiden	ttd	M.1145/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
592	M.0599/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Laporan Rapat Komite Cipta Kerja Tentang Kebijakan Program Kartu Prakerja Tahun 2022 Tanggal 21 Desember 2021	Seskab				Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	30-Dec-21	OutcomeKTJ_9
593	M.0600/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap RPMK DBH CHT	Presiden	dittd	M.1144/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
594	M.0600/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden terhadap dan RPMK DBH DR	Presiden	dittd	M.1144/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
595	M.0601/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Insentif terhadap Barang yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (RPMK)	Presiden	dittd	M.1143/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
596	M.0602/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPMK Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022)	Presiden	ttd	M.1146/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
597	M.0602/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden Atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPMK Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KetenagakerjaanTahun 2022)	Presiden	ttd	M.1146/Seskab/12/2021	30-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	30-Dec-21	OutcomeIKK_2
598	M.0603/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Permasalahan Kepemimpinan dan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	Seskab	noted arsip			Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab	KTJ_9	KTJ_9	2-Dec-21	OutcomeKTJ_9
599	M.0604/Ekon/12/2021	30-Dec-21	Percepatan Penyusunan 75 (tujuh puluh lima) RDTR OSS Tahun 2021	KL	dittd	B.0520/Seskab/Ekon/12/2021	30-Dec-21		Deputi-Seskab-KL	IOP_3	Belum Outcome		OutputIKK_3
600	M.0605/Ekon/12/2021	31-Dec-21	Laporan Penyaluran Bantuan Presiden Modal Kerja Produktif tahun 2021 bagi Pelaku Usaha Mikro.	Presiden		M.1157/Seskab/12/2021	31-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	31-Dec-21	OutcomeIKK_4
601	M.0606/Ekon/12/2021	31-Dec-21	Laporan Evaluasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Permohonan Izin Penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2020-2024	Presiden	surat dittd	M.1156/Seskab/12/2021	31-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_3	ISP_3	31-Dec-21	OutcomeIKK_3
602	M.0607/Ekon/12/2021	31-Dec-21	Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan MenKUKM (RPermenKUKM) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	surat dittd	surat dittd	M.1158/Seskab/12/2021	31-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Dec-21	OutcomeIKK_2
603	M.0607/Ekon/12/2021	31-Dec-21	Arah Kebijakan Pengembangan Tanaman Kratom di Indonesia	surat dittd	surat dittd	M.1158/Seskab/12/2021	31-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_2	ISP_2	31-Dec-21	OutcomeIKK_2

**RINCIAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM DAN OUTCOME PROGRAM**

No	No Memo/ Surat	Tanggal Memo/ Surat	Perihal Memo/ Surat	Tujuan Akhir Kepada	Disposisi Seskab	No Memo/ Surat Seskab	Tanggal Memo/ Surat Seskab	Bukti Tindak lanjut/ Pemanfaatan Presiden atau K/L	Tracking	Output Program (Es I)	Outcome Program (Es I)	Tanggal Terbentuk Outcome Program	Assesment Capaian (AKRB)
604	M.0608/Ekon/12/2021	31-Dec-21	Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terkait Alokasi 30% Bagi UMKM Dalam Infrastruktur Publik	Presiden	surat dittd	M.1155/Seskab/12/2021	31-Dec-21	Tidak ada penolakan	Deputi-Seskab-Presiden	IOP_4	ISP_4	31-Dec-21	OutcomeIKK_4
605	M.0006/Ekon/01/2022	31-Dec-21	Laporan Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)-Canada Consultation ke-10 pada Tanggal 17 November 2021 melalui Video Conference	Presiden					Deputi-Seskab	IOP_3	Belum Outcome		OutputIKK_3

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP  
Halaman : 1 dari 3

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
0401	ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA	900.000.000	562.260.000	554.375.825	0	554.375.825	98,59	7.884.175
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
ABA	KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
ABA.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	441.910.000	343.575.000	339.195.010	0	339.195.010	98,72	4.379.990
201	Pengumpulan Data	112.494.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
201.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
-001	-	27.000.000	7.050.000	7.050.000	0	7.050.000	100,00	0
201.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	85.494.000	0	0	0	0	0,00	0
202	Analisis penyusunan rekomendasi	245.416.000	327.675.000	323.295.010	0	323.295.010	98,66	4.379.990
202.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	49.616.000	231.175.000	226.895.010	0	226.895.010	98,14	4.279.990
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,00	0
-001	-	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	11.195.000	7.031.000	0	7.031.000	62,80	4.164.000
-001	-	0	11.195.000	7.031.000	0	7.031.000	62,80	4.164.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	49.616.000	99.980.000	99.864.010	0	99.864.010	99,88	115.990
-001	-	49.616.000	99.980.000	99.864.010	0	99.864.010	99,88	115.990
202.AB	Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga	195.800.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	111.900.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
-001	-	111.900.000	96.500.000	96.400.000	0	96.400.000	99,89	100.000
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	83.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	83.900.000	0	0	0	0	0,00	0
203	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	84.000.000	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
203.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
203.AB	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	0	0	0	0	0	0,00	0
203.AC	Biaya Paket data dan komunikasi	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
-001	-	0	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	100,00	0
CA.6404	<b>PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>458.090.000</b>	<b>218.685.000</b>	<b>215.180.815</b>	<b>0</b>	<b>215.180.815</b>	<b>98,39</b>	<b>3.504.185</b>
ABA	<b>KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN</b>	<b>458.090.000</b>	<b>218.685.000</b>	<b>215.180.815</b>	<b>0</b>	<b>215.180.815</b>	<b>98,39</b>	<b>3.504.185</b>
ABA.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	458.090.000	218.685.000	215.180.815	0	215.180.815	98,39	3.504.185
213	Pengumpulan Data	62.049.000	118.008.000	116.162.227	0	116.162.227	98,43	1.845.773
213.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	9.000.000	0	0	0	0	0,00	0
213.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	53.049.000	118.008.000	116.162.227	0	116.162.227	98,43	1.845.773
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	19.416.000	17.570.299	0	17.570.299	90,49	1.845.701
-001	-	0	19.416.000	17.570.299	0	17.570.299	90,49	1.845.701
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	53.049.000	98.592.000	98.591.928	0	98.591.928	99,99	72
-001	-	53.049.000	98.592.000	98.591.928	0	98.591.928	99,99	72
214	Analisis penyusunan rekomendasi	158.641.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
214.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	0	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
-001	-	131.440.000	76.927.000	75.268.588	0	75.268.588	97,84	1.658.412
214.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	27.201.000	0	0	0	0	0,00	0
215	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	237.400.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
215.AA	Perumusan dan penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	126.400.000	0	0	0	0	0,00	0
215.AB	Perumusan dan penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
-001	-	75.000.000	0	0	0	0	0,00	0
215.AC	Biaya paket data dan komunikasi	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0
-001	-	36.000.000	23.750.000	23.750.000	0	23.750.000	100,00	0

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

-  
Berdasarkan SPP  
Halaman : 1 dari 2

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000.000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
0402	ASDEP BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000.000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UMKM	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
ABK.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
204	Pengumpulan Data	90.000.000	57.380.000	57.310.000	0	57.310.000	99,87	70.000
204.AA	Biaya paket data dan komunikasi	48.000.000	29.900.000	29.900.000	0	29.900.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	48.000.000	29.900.000	29.900.000	0	29.900.000	100,00	0
-001	-	48.000.000	29.900.000	29.900.000	0	29.900.000	100,00	0
204.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	42.000.000	27.480.000	27.410.000	0	27.410.000	99,74	70.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.000.000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	100,00	0
-001	-	18.000.000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	24.000.000	19.530.000	19.460.000	0	19.460.000	99,64	70.000
-001	-	24.000.000	19.530.000	19.460.000	0	19.460.000	99,64	70.000
205	Analisis penyusunan rekomendasi	158.650.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	100,00	0
205.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
205.AB	Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	79.900.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	100,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
-001	-	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	79.900.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	100,00	0
-001	-	79.900.000	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	100,00	0
206	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	251.020.000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
206.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	251.020.000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	251.020.000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
-001	-	251.020.000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	400.330.000	197.946.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UMKM	400.330.000	197.946.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548
ABK.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	400.330.000	197.946.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
216	Pengumpulan Data	215.280.000	47.550.000	47.545.960	0	47.545.960	99,99	4.040
216.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
-001	—	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
216.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	21.600.000	24.954.000	24.950.000	0	24.950.000	99,98	4.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	100,00	0
-001	—	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	18.504.000	18.500.000	0	18.500.000	99,97	4.000
-001	—	21.600.000	18.504.000	18.500.000	0	18.500.000	99,97	4.000
217	Analisis penyusunan rekomendasi	185.050.000	150.396.000	150.193.492	0	150.193.492	99,86	202.508
217.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	78.750.000	73.296.000	73.293.492	0	73.293.492	99,99	2.508
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	—	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	21.880.000	21.879.587	0	21.879.587	99,99	413
-001	—	0	21.880.000	21.879.587	0	21.879.587	99,99	413
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	51.416.000	51.413.905	0	51.413.905	99,99	2.095
-001	—	0	51.416.000	51.413.905	0	51.413.905	99,99	2.095
217.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000
-001	—	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP  
Halaman : 1 dari 2

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
0403	ASDEP BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
ABP	KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
ABP.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
207	Pengumpulan Data	90.000.000	50.260.000	50.210.000	0	50.210.000	99,90	50.000
207.AA	Biaya paket data dan komunikasi	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
-001	-	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
207.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi	42.000.000	17.260.000	17.210.000	0	17.210.000	99,71	50.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.000.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100,00	0
-001	-	18.000.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	24.000.000	5.560.000	5.510.000	0	5.510.000	99,10	50.000
-001	-	24.000.000	5.560.000	5.510.000	0	5.510.000	99,10	50.000
208	Analisis penyusunan rekomendasi	175.450.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
208.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
208.AB	Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
-001	-	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
209	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	241.657.000	300.471.000	300.409.123	0	300.409.123	99,97	61.877
209.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	241.657.000	300.471.000	300.409.123	0	300.409.123	99,97	61.877
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	53.989.000	53.987.861	0	53.987.861	99,99	1.139
-001	-	0	53.989.000	53.987.861	0	53.987.861	99,99	1.139
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	241.657.000	246.482.000	246.421.262	0	246.421.262	99,97	60.738
-001	-	241.657.000	246.482.000	246.421.262	0	246.421.262	99,97	60.738
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
ABP	KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
ABP.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
219	Pengumpulan Data	216.943.000	163.933.000	163.346.400	0	163.346.400	99,64	586.600

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
219.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	200.743.000	143.323.000	142.976.400	0	142.976.400	99,75	346.600
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	18.927.000	18.587.000	0	18.587.000	98,20	340.000
-001	-	0	18.927.000	18.587.000	0	18.587.000	98,20	340.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	200.743.000	80.299.000	80.298.800	0	80.298.800	99,99	200
-001	-	200.743.000	80.299.000	80.298.800	0	80.298.800	99,99	200
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	44.097.000	44.090.600	0	44.090.600	99,98	6.400
-001	-	0	44.097.000	44.090.600	0	44.090.600	99,98	6.400
219.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	16.200.000	20.610.000	20.370.000	0	20.370.000	98,83	240.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	4.560.000	4.320.000	0	4.320.000	94,73	240.000
-001	-	0	4.560.000	4.320.000	0	4.320.000	94,73	240.000
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	16.200.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	100,00	0
-001	-	16.200.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	100,00	0
220	Analisis penyusunan rekomendasi	175.950.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
220.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
220.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
-001	-	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0

## REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP  
Halaman : 1 dari 4

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
0404	ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.400.000.000	886.800.000	885.980.754	0	885.980.754	99,90	819.246
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
ABR	KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
ABR.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	711.106.000	466.082.000	466.061.489	0	466.061.489	99,99	20.511
210	Pengumpulan Data	529.802.000	333.638.000	333.625.386	0	333.625.386	99,99	12.614
210.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	508.619.000	256.407.000	256.394.386	0	256.394.386	99,99	12.614
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	27.764.000	27.751.476	0	27.751.476	99,95	12.524
-001	-	0	27.764.000	27.751.476	0	27.751.476	99,95	12.524
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	134.768.000	226.063.000	226.062.910	0	226.062.910	100,00	90
-001	-	134.768.000	226.063.000	226.062.910	0	226.062.910	100,00	90
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.300.000	2.580.000	2.580.000	0	2.580.000	100,00	0
-001	-	18.300.000	2.580.000	2.580.000	0	2.580.000	100,00	0
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	355.551.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	355.551.000	0	0	0	0	0,00	0
210.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	21.183.000	77.231.000	77.231.000	0	77.231.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00	0
-001	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	15.183.000	71.231.000	71.231.000	0	71.231.000	100,00	0
-001	-	15.183.000	71.231.000	71.231.000	0	71.231.000	100,00	0
211	Analisis penyusunan rekomendasi	170.124.000	131.079.000	131.071.103	0	131.071.103	99,99	7.897
211.AA	Analisis Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	108.920.000	118.401.000	118.393.403	0	118.393.403	99,99	7.597
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	46.900.000	62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	100,00	0
-001	-	46.900.000	62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	62.020.000	56.301.000	56.293.403	0	56.293.403	99,98	7.597
-001	-	62.020.000	56.301.000	56.293.403	0	56.293.403	99,98	7.597
211.AB	Analisis Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	61.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	42.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	13.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
-001	-	13.204.000	12.678.000	12.677.700	0	12.677.700	99,99	300
212	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	11.180.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
212.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
-001	-	6.010.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	100,00	0
212.AB	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0
CA.6404	<b>PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>188.894.000</b>	<b>188.894.000</b>	<b>188.740.093</b>	<b>0</b>	<b>188.740.093</b>	<b>99,91</b>	<b>153.907</b>
ABR	<b>KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>188.894.000</b>	<b>188.894.000</b>	<b>188.740.093</b>	<b>0</b>	<b>188.740.093</b>	<b>99,91</b>	<b>153.907</b>
ABR.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	188.894.000	188.894.000	188.740.093	0	188.740.093	99,91	153.907
222	Pengumpulan Data	30.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
222.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
-001	-	24.774.000	69.954.000	69.946.175	0	69.946.175	99,98	7.825
222.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
223	Analisis penyusunan rekomendasi	94.288.000	81.940.000	81.793.918	0	81.793.918	99,82	146.082
223.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	47.144.000	81.940.000	81.793.918	0	81.793.918	99,82	146.082
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	5.869.000	5.806.500	0	5.806.500	98,93	62.500
-001	-	0	5.869.000	5.806.500	0	5.806.500	98,93	62.500
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	18.544.000	76.071.000	75.987.418	0	75.987.418	99,89	83.582
-001	-	18.544.000	76.071.000	75.987.418	0	75.987.418	99,89	83.582
223.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	47.144.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	22.600.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	18.544.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	18.544.000	0	0	0	0	0,00	0
224	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	63.832.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
224.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	6.032.000	0	0	0	0	0,00	0
224.AB	Perumusan dan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	24.200.000	0	0	0	0	0,00	0
224.AC	Biaya paket data dan komunikasi	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
-001	-	33.600.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	100,00	0
<b>WA.6400</b>	<b>PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>231.824.000</b>	<b>231.179.172</b>	<b>0</b>	<b>231.179.172</b>	<b>99,72</b>	<b>644.828</b>
<b>EAB</b>	<b>LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL</b>	<b>66.144.000</b>	<b>29.149.000</b>	<b>29.149.000</b>	<b>0</b>	<b>29.149.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
EAB.002	Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
962	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
962.AA	Kegiatan pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Kedepuitan Bidang Perekonomian	66.144.000	29.149.000	29.149.000	0	29.149.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	8.400.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
-001	-	8.400.000	220.000	220.000	0	220.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	57.744.000	28.929.000	28.929.000	0	28.929.000	100,00	0
-001	-	57.744.000	28.929.000	28.929.000	0	28.929.000	100,00	0
<b>EAC</b>	<b>LAYANAN UMUM</b>	<b>381.890.000</b>	<b>193.945.000</b>	<b>193.300.172</b>	<b>0</b>	<b>193.300.172</b>	<b>99,66</b>	<b>644.828</b>
EAC.002	Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	381.890.000	193.945.000	193.300.172	0	193.300.172	99,66	644.828
968	Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	381.890.000	193.945.000	193.300.172	0	193.300.172	99,66	644.828
968.AA	Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	362.690.000	175.945.000	175.300.172	0	175.300.172	99,63	644.828
521211-RM	BELANJA BAHAN	39.200.000	16.039.000	16.039.000	0	16.039.000	100,00	0
-001	-	39.200.000	16.039.000	16.039.000	0	16.039.000	100,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	519.000	516.120	0	516.120	99,44	2.880
-001	-	0	519.000	516.120	0	516.120	99,44	2.880
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
-001	-	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	16.815.000	16.756.000	0	16.756.000	99,64	59.000
-001	-	0	16.815.000	16.756.000	0	16.756.000	99,64	59.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	49.540.000	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	100,00	0
-001	-	49.540.000	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	31.150.000	57.799.000	57.736.000	0	57.736.000	99,89	63.000
-001	-	31.150.000	57.799.000	57.736.000	0	57.736.000	99,89	63.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	242.800.000	67.913.000	67.393.052	0	67.393.052	99,23	519.948
-001	-	242.800.000	67.913.000	67.393.052	0	67.393.052	99,23	519.948
968.AB	Biaya paket data dan komunikasi	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
-001	-	19.200.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	100,00	0
<b>EAN</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERNAL</b>	<b>51.966.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>0</b>	<b>8.730.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
EAN.002	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
975	Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
975.AA	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian	51.966.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	100,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	8.400.000	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	100,00	0
-001	-	8.400.000	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	43.566.000	7.190.000	7.190.000	0	7.190.000	100,00	0
-001	-	43.566.000	7.190.000	7.190.000	0	7.190.000	100,00	0

## FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√